

Rumusan Hasil
Kongres Kebudayaan Desa
1 Juni-15 Agustus 2020



KOMUNIKASI, MEDIA, DAN *INFLUENCER*

Kebijakan Komunikasi Publik
dalam Tata Pemerintahan



KOMUNIKASI, MEDIA, DAN *INFLUENCER*

Kebijakan Komunikasi Publik dalam Tata Pemerintahan

Webinar Seri-18

Kongres Kebudayaan Desa 2020

1-10 Juli 2020



Komunikasi, Media, dan *Influencer*

Kebijakan Komunikasi Publik dalam Tata Pemerintahan

© Sanggar Inovasi Desa 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Diterbitkan oleh Sanggar Inovasi Desa 2020

Kampoeng Mataraman, Jl. Ringroad Selatan, Glugo No. 93, Panggunharjo,
Yogyakarta.

Web: www.sanggarinovasidesa.id

Penanggung jawab	: Faiz Ahsoul
Penyunting	: Irfan Afifi
Penyelia aksara	: Suhairi Ahmad
Desain dan ilustrasi sampul	: Ketjilbergerak, Arif Gunawan, Agus Teriyana
Tata letak	: Rio Ap

Cetakan pertama, Agustus 2020

xxxvi, 142 hal., 13x19cm.

ISBN :

Dilarang memperbanyak atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial. Setiap tindak pembajakan akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pengutipan untuk kepentingan akademis, jurnalistik, dan advokasi diperkenankan dalam batas ketentuan yang berlaku.



Pengantar Editor

Irfan Afifi

Komunikasi publik yang dilakukan oleh pemerintah dari pusat hingga daerah tampaknya menjadi persoalan tersendiri di masa pandemi Covid-19. Simpang siur, ketidakselarasan informasi, antara kementerian satu dengan yang menunjukkan protokol komunikasi tidak berjalan. Mungkin malah tidak ada. Situasi pandemi Covid-19 ini setiap orang mengalami *volatility*, *uncertainty*, *complexity*, dan *ambiguity* (VUCA). Ketidakpastian ini membuat masyarakat mencoba mencari informasi tentang Covid-19.

Hasil kajian Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) yang dirilis pada tanggal 7 April 2020 lalu menunjukkan sejumlah pernyataan *blunder* pejabat pemerintah Indonesia terkait wabah Covid-19. Mulai dari menganggap remeh tingkat urgensi maupun dampaknya terutama di awal ketika wabah ini muncul, hingga ketidakselarasan pernyataan yang disampaikan para pejabat tinggi negara yang memunculkan kebingungan di masyarakat. Temuan-temuan tersebut merefleksikan ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola informasi dan komunikasi publik secara tepat di masa krisis pandemi.

Uni Lubis (2020) setidaknya memaparkan beberapa kelemahan komunikasi publik pemerintah di masa pandemi menunjukkan ketaksinkronan tersebut. *Pertama*, komunikasi publik pemerintah tidak transparan, tidak membangun rasa percaya, dan cenderung menganggap enteng. *Kedua*, publik sulit mendapatkan data pergerakan kasus, karena sumber data resmi pemerintah tidak jelas. Sebagai contoh Menteri kesehatan melakukan keterangan pers secara sporadis, dengan “gurauan”. Sulit bagi publik untuk percaya terkait belum adanya kasus positif di Indonesia. *Ketiga*, komunikasi makin diperburuk oleh prioritas pemerintah yang lebih menekankan aspek ekonomi dan bisnis ketimbang aspek kesehatan. Apakah benar semua rumah sakit rujukan benar-benar siap? *Keempat*, pemerintah terkesan tidak punya protokol komunikasi yang terkoordinasi dari pusat sampai daerah. *Kelima*, transparansi data lewat sumber yang mudah diakses, perlu dilakukan, mengapa? Dalam kondisi pandemi ini nampaknya kita tidak hanya mengenal korupsi yang menimbulkan kerugian materi tapi lebih jauh ada korupsi data yang membuat

publik menjadi kebingungan. Dampak korupsi data ini bukan hanya kerugian materi namun akhirnya banyak nyawa melayang karena tidak transparannya data publik sehingga orang-orang menjadi lengah atas pandemi Covid-19 ini.

Dampaknya apa? Kepercayaan publik pada pemerintah menurun. Data terbaru menunjukkan tingkat keterpercayaan pada presiden menurun drastis ke angka 52% di era pandemi semacam ini. Hal ini belum lagi ditambah berita-berita *hoaks* yang diproduksi oleh media-media besar utama, maupun *hoaks* produksi perorangan. Belum lagi bagaimana para politisi memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan-kepentingan politik kelompoknya.

Tampaknya pemerintah perlu menerapkan *Finding Conclusion Recommendation* (FCR) data dan kebijakan agar komunikasi publik tersampaikan secara jelas dan berlandaskan pada data akurat. Konsep ini akan memberikan masukan kepada *opinion maker*, kepada presiden dan menteri agar jangan sampai salah. Namanya *personal-direction*. FCR penting di masa krisis. Sebab jika krisis tidak di-*handle* dengan data yang kuat, yang ada bolong-bolong narasinya jadi tidak jelas. Dengan membentuk protokol komunikasi yang baik dan jaringan komunikasi yang kuat, pemerintah dapat membangun opini publik yang positif. Juga terbentuk kepercayaan serta penerimaan dan dukungan masyarakat yang bisa menjadi fondasi kokoh bagi pemerintah dalam menerapkan kebijakan. Sehingga bisa membangun opini publik yang positif, kepercayaan, penerimaan dan dukungan, serta *set up foundation*.



Pengalaman Desa Panggungharjo dalam komunikasi ke warga desa menarik untuk dicermati. Praktik yang dilakukan adalah *WA-Group* untuk sementara akan di-*lock* sehingga hanya admin utama yang bisa menyampaikan informasi tentang apa yang akan pemerintah desa lakukan. Kepala desa mengambil alih kendali *WA-Group*. Pemerintah desa memastikan semua dukuh dan Ketua RT harus masuk dalam grup *WA*. Jika ada Ketua RT yang tidak memungkinkan untuk dimasukan, dimohonkan dukuh untuk mengirimkan satu orang perwakilan dari RT tersebut ke dalam grup. Bisa dari unsur Karang Taruna, PKK atau kader maupun kaum *rois* atau yang lainnya. *WA-Group* Panggung Tanggap Covid-19 khusus hanya menginformasikan kondisi desa: bukan yang lain. Termasuk tidak menyebarkan berita informasi baik foto tulisan maupun video yang tidak terkait dengan Desa Panggungharjo

Desa meyakini bahwa bahwa warga sudah sangat banyak memperoleh informasi dari berbagai sumber. Tapi dari semua sumber informasi tidak ada satu pun sumber informasi tersebut menyediakan saluran/kanal bagi warga desa untuk mengabarkan apa yang warga desa Panggungharjo hadapi.

Tiap perdukahan juga didorong membuat *WA-Group* sendiri dan Lurah Desa masuk di dalamnya untuk memegang kendali terhadap perkembangan-perkembangan yang terjadi di tiap dukuh. Maka *WAG-WAG* Panggung Tanggap Covid-19 didedikasikan untuk mengakomodasi segala keluh kesah warga desa, harapan atau kerisauan. Apapun yang dibutuhkan, masalah apa yang dihadapi oleh warga. Penyampaian informasi hanya sebatas pengalaman baik atas



inisiatif warga Desa Panggunharjo, bagaimana mereka membangun sistem sosial untuk bersama menghadapi situasi krisis ini. Memahami adanya kendala yang dihadapi dengan penggunaan aplikasi digital dalam kegiatan mitigasi ini, sehingga *platform* dibuat semudah dan sesederhana mungkin sehingga menjadikan seseorang yang tidak memiliki akses terhadap teknologi tetap bisa memperoleh manfaat dari *platform* tersebut.

Komunikasi publik yang efektif menjadi garda terdepan dari upaya untuk memberikan informasi yang akurat, menumbuhkan kepercayaan dan rasa aman kepada publik dalam situasi krisis. Pemerintah dituntut agar dapat menjadi rujukan informasi yang otoritatif bagi masyarakat, di tengah situasi yang penuh dengan ketidakpastian. Tersedianya sumber informasi yang terpercaya semakin krusial, mengingat arus informasi yang kian tak terbendung karena kemajuan teknologi informasi yang pesat. Informasi dapat tersebar dengan cepat melalui media sosial dan kerap kali mengaburkan antara informasi yang akurat dengan mis-informasi yang justru menyesatkan.

Webinar seri ke 18 tentang “Komunikasi, Media, dan *Influencer*” ini akan mengulik bagaimana model dan pola komunikasi yang harus dikembangkan selama dan paska Covid-19. Kebutuhan protokol komunikasi seperti apa yang bisa dimungkinkan untuk tidak menjadi Infodemi. Seri ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan, bagaimana komunikasi publik yang efektif dikembangkan oleh pemerintah di tengah merebaknya infodemi dalam pengelolaan Covid-19?



Beberapa pertanyaan yang bisa diajukan dan dibayangkan adalah sebagai berikut:

1. Model protokol komunikasi publik seperti apa yang bisa diimplementasikan di era pandemi Covid-19 dan sesudahnya?
2. Strategi kebijakan komunikasi seperti apa yang bisa ditawarkan pada pemerintahan desa untuk pengelolaan komunikasi kebijakan, komunikasi publik terkait pandemi dan kebijakan desa pada umumnya?
3. Program-program strategis apa yang bisa disorongkan kepada pemerintah desa untuk meng-*handle* komunikasi publik, media, yang lebih menenteramkan?
4. Bagaimana langkah penguatan peran media (konvensional, digital, termasuk *influencer*) dalam mengadvokasi krisis?
5. Bagaimana langkah penguatan peran media (konvensional, digital, termasuk *influencer*) untuk juga mendorong kampanye penguatan transparansi data atas sebaran informasi yang selama ini cenderung ditutupi dan membahayakan keselamatan kesehatan warga?
6. Bagaimana model pengelolaan dan penataan pusat informasi yang bisa diterapkan di desa? Langkah apa yang perlu dilakukan? Protokol seperti apa yang bisa menjamin akses publik terhadap informasi krisis?
7. Bagaimana peran *leadership* dalam mengelola informasi, dan menanggulangi infodemi?

Dalam rangka itu, pada webinar Seri 18 Kongres Kebudayaan Desa 2020, di Hari Kesembilan (dari rangkaian webinar seri 1 hingga seri 18, 1--10 Juli), pada Jumat, 10 Juli 2020: 13.00 s.d. 16.00 WIB, yang bertempat di Kampung Mataraman, Jl. Ringroad Selatan, Glugo No. 93, Panggunharjo, Yogyakarta, kami mengundang 5 narasumber untuk memaparkan sumbang-gagasan mereka dengan tema:

“Komunikasi, Media, dan *Influencer*: Merumuskan Kebijakan Komunikasi Publik dalam Tata Pemerintahan Desa menuju Indonesia Baru”,

1. Prof. Dr. Hermin Indah Wahyuni (Komunikasi UGM)
2. Tri Agus S, MA (APMD)
3. Puthut EA (Mojok.co)
4. FX Rudy Gunawan (Staf KSP 2014-2019)
5. Febri Diansyah (Biro Hubungan Masyarakat KPK)

Moderator: Nezar Patria (The Jakarta Post)

Kami mendorong kelima narasumber di atas untuk menyampaikan sumbang gagasan pada webinar Kongres Kebudayaan Desa tersebut, dan juga meminta mereka untuk menuliskan gagasan mereka dalam bentuk *paper*, tulisan, maupun makalah. Sebagian dari narasumber ini *alhamdulillah* berkenan menulis makalah dan menyerahkan ke panitia, namun ada sebagian dengan alasan satu dan lain hal belum bisa menyampaikannya dalam bentuk tulisan. Oleh karenanya kami terpaksa merekam sumbang gagasan mereka



dalam bentuk notulensi yang kemudian kami olah menjadi tulisan yang utuh.

Buku ini merupakan hasil dari kumpulan antologi sumbang-gagan tulisan para narasumber di acara webinar di atas, yakni dari makalah yang mereka tuliskan sendiri, maupun tulisan yang bisa kita rekam dari webinar seri ke-18 pada tema “Agama” dari rangkaian Kongres Kebudayaan Desa 2020. Selain itu, kami juga menambah tulisan dalam buku ini dari hasil seleksi *Call For Paper* (1 Juni – 15 Agustus 2020) yang juga merupakan bagian dari rangkaian acara Kongres Kebudayaan Desa. Terdapat tiga tulisan yang kami loloskan untuk tema “Komunikasi, Media, dan *Influncer*” di buku ini. Semoga tulisan-tulisan yang terekam maupun tertulis pada rangkaian webinar Kongres Kebudayaan Desa tersebut, maupun dari seleksi *Call for Paper*, yang telah menjadi kesatuan buku yang Anda pegang ini bisa memberi sumbang gagasan atas Arah Tatanan Baru Indonesia, yakni berangkat dari Desa dalam mengeja Indonesia, terutama setelah peristiwa pandemi Covid-19, yang bukan hanya melanda bangsa ini melainkan juga melanda dunia secara keseluruhan. Terakhir, selamat membaca.

Kampung Mataraman, 18 Juli 2020





Sekapur Sirih

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

*A*ssalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh, salam sejahtera bagi kita semua, om swastiastu, namo budhaya, salam kebajikan.

Ada ungkapan Jawa tentang desa yang menyatakan: “*Desa Mawa Cara, Negara Mawa Tata*”. Dalam UU Otonomi Desa No. 6/2014, ada kewenangan desa secara luas untuk mengatur cara dan mengurus rumah tangga sendiri, tetapi tidak berarti keluar dari tata ketatanegaraan NKRI. Sebelumnya, khusus untuk desa-desa

di Yogyakarta, sudah ada landasan UU Keistimewaan DIY No. 13/2012 sehingga UU Desa menjadi lebih spesifik dalam arti ada perubahan mendasar dari *Pangreh Projo* menjadi *Pamong Praja*. Termasuk penyesuaian nomenklatur Jabatan Camat pada level bawah maupun nama beberapa OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di provinsi dan kabupaten/kota. Bukan hanya perubahan nama, tetapi pelayanannya pun menjadi lebih berbudaya Jogja. Oleh karena itu, semua perangkat wajib mengikuti *short course* di Pawiyatan Pamong sehingga sesanti *desa mowo coro negara mawa tata* lebih tampak nuansanya di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Secara tematik, membaca desa adalah sebuah introspeksi atas eksistensinya selama ini. Mengeja Indonesia dengan melafalkan per huruf membentuk kata I-n-d-o-n-e-s-i-a, merupakan bentuk evaluasi perannya sebagai wadah keragaman desa se-Nusantara. Semuanya itu harus ditempatkan pada era “normal baru” daripada aspek kebudayaan.

“*New normal*” adalah *back to normal* karena kehidupan kemarin justru *abnormal*, menandai sebuah *hiper realita*, seperti ketika kita harus membeli *image* sebuah produk air yang—seolah—meningkat statusnya setelah menjadi produk kemasan. Sebuah kondisi mental yang membuat sesuatu tidak substansif, menjadi melebihi kebutuhan dasar kita sendiri. “*New normal*” adalah sebuah terapi psikis dan kultural *healing*, berefek kejut untuk merefleksi dan mengintrospeksi betapa rapuhnya kehidupan kita kemarin, untuk itu kembalilah ke jati diri dan fungsi diri kita yang nyata. Dunia kemarin sudah mati. Dunia hari ini ibarat sebagai sebuah rumah sakit besar, kita tergeletak di dalamnya dan hanya berpikir sehat dan agar tetap bisa hidup.

Di situlah kini desa berada, yang berimbis pada tata pergaulan dan tata pemerintahan desa. Akhirnya kita menjadi bagian dari generasi yang dipertemukan oleh situasi terbaru dengan perubahan relasi sosial, dinamika organisasi kerja, dan berbagai hal yang selama ini telah kita lalui. Konsekuensinya, Kongres Kebudayaan Desa harus membahas pergeseran budaya desa yang tentu tidak mudah.

Menurut pakar kebudayaan August Comte, Disanayake, maupun Alvin Tofler, setiap pergeseran peradaban ditandai oleh tahapan yang selalu mengedepankan rasionalitas. Bahwa iptek merupakan komponen utama majunya peradaban. Semakin baik penguasaan akan beragam iptek, masyarakat akan semakin mendekati tahap adaptif terhadap kemajuan dan perkembangan zaman. Cara berpikir fungsional inilah yang harus kita hidupkan dan kembangkan di setiap desa agar sejalan dengan konsep *townbie*, membangun kelompok kreatif berbasis kebudayaan seperti contoh *Jogja gumregah*.

Pada masa awal, tentu canggung dan getir, bahkan sakit untuk *melakoninya*. Sebagaimana watak perubahan, harus melewati proses bertahap, terasa ada ketidaknyamanan yang mau tidak mau kita harus hadir menjadi bagian dalam proses tersebut. Potret perubahan dan ketidaknyamanan tersebut, tampak jelas dalam proses Kongres Kebudayaan Desa yang salah satunya menghasilkan 21 buku rumusan Indonesia Menuju Tatanan Baru dari Desa.

Dampak Covid-19 berkelindan dengan disrupsi teknologi menuju era Industri 4.0 yang belum mapan. Itu pun sudah



dibayang-bayangi era Sosial 5.0 yang segera menyusul. Perubahan total ini juga berkejaran dengan pergeseran budaya desa yang belum teridentifikasi secara cermat. Untuk itu, pemerintah pusat dan daerah, termasuk desa, harus bersinergi memastikan pemeriksaan kesehatan masyarakat: tersedianya sarana medis, tersedianya jaringan pengamanan sosial untuk melindungi—mereka—yang paling rentan, dan tersedianya perlindungan kesehatan. Selebihnya, berhentilah menjadi provokator dan menyebarkan energi negatif yang tidak bermanfaat bagi siapa pun dan berpotensi menimbulkan kecemasan publik.

Gambaran strategis lingkungan desa yang telah berubah harus diikuti perubahan tata masyarakat, antara lain dengan relokasi dan *refocusing* Dana Desa. Dampak ekonomi membawa dampak sosial yang positif dalam meningkatkan peradaban empati, diikuti kesediaan saling belajar, menghargai, dan berbagi sebagai penguat modal sosial dan partisipasi publik. Penguatan ini berdampak positif pada peningkatan daya tahan ekonomi warga karena terbangunnya jaringan kerja sama, kolaborasi, dan kemitraan. Kebijakan “normal baru” atau adaptif menghadapi realitas perubahan, tidak lain dimaksudkan untuk menyatukan kehendak membangun hidup *guyub* di tengah keragaman perbedaan yang didasari oleh *mutual trust* untuk memperoleh *mutual benefit*. Untuk itu kita harus siap mengubah *mindset* budaya dalam mengelola kehidupan bersama.

Dalam penyelenggaraan pemerintah desa, lurah atau kepala desa, harus memiliki wawasan adaptasi dan kapasitas daya tahan. Bekal kompetensi dalam dunia yang kompleks dan penuh kejutan serta perubahan yang tidak terduga merupakan syarat utama. Harus

mampu melakukan lompatan *non-linier* bahkan *out of the box*. Dari *Terra Firma*, daratan yang dikenal dengan baik, ke *Terra Incognita* atau dunia masa depan. Demikianlah, semoga buku rumusan hasil Kongres Kebudayaan Desa ini bermanfaat bagi desa, bangsa, dan negara Indonesia. Akhir kata, saya ucapkan selamat dan semoga sukses. Sekian, terima kasih. *Wassalam*.

Yogyakarta, 5 Agustus 2020

Hamengku Buwono X
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta





Sekapur Sirih

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi

*A*ssalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh, salam sejahtera
bagi kita semua, om swastiastu, namo budhaya, salam kebajikan.

Melawan korupsi dari desa.

Pergeseran nilai-nilai kejujuran dan kesederhanaan menjadi “pekerjaan rumah” kita bersama. Semakin banyak anak-anak muda kota yang meski tumbuh di desa, tetapi terjangkit penyakit materialisme. Tercerabutnya suasana dan pikiran desa membuat banyak orang berpikir: apa yang ada dalam pikiran mereka hingga tercerabut dari budaya desanya, padahal berasal dari desa?

Kira-kira apa masalahnya di Indonesia? Keteladanan kepala desa dan orang tua menjadi sangat penting. Guru agama pun tak kalah penting. Di kota semakin hilang keteladanan dan sikap apresiasi sehingga muncul materialisme di masyarakat kota. Tentu butuh obat dengan sikap keteladanan dan orang yang sudah harus selesai dengan dirinya. Sikap spiritual ini banyak ditemukan di desa, harmonisasi alam dan manusia di desa baiknya tidak sekadar jadi inspirasi, tetapi harus dipraktikkan.

Materialisme yang menghantui pikiran orang kota bukan pepohonan dan sawah, melainkan mengumpulkan logam-logam. Bentley, Lamborghini, dan mobil-mobil mewah lainnya semua ada di parkir Komisi Pemberantasan Korupsi, sitaan dari kasus korupsi. Kumpulan mobil itu menjadi tidak penting. Namun, mengapa masih ada orang-orang yang ingin memilikinya dengan cara salah: korupsi? Apakah ada yang salah dengan pikiran orang kota? Kita perlu rekonstruksi bagaimana pikiran orang desa yang simpel: naik angkot, truk, dan moda transpor publik lainnya yang lebih fungsional.

Mari kita tengok pemikiran ekonom peraih Nobel: *When enough is not enough, a hedonist is born*. Ketika cukup sudah dianggap tidak cukup maka penyakit cinta dunia materialistis akan tumbuh. Pemenang Nobel ini sangat spiritual, seperti ajakan kembali ke desa dan mendalami pemikiran sederhana orang-orang desa. Namun pada prinsipnya, urusan menimbun kekayaan adalah penyakit semua orang, baik orang kota maupun orang desa.

Tantangan yang tidak kalah besar di desa, salah satunya *money politic*. Ternyata sistem politik yang kita pilih kemudian menular.



Pemilihan bupati, gubernur, sampai tingkat pusat penuh syarat *money politic*. Berharap untuk pilkades tidak ada *money politic*. Namun, harapan itu membentur kenyataan. Bahkan saling menularkan, baik dari desa ke kota maupun sebaliknya. Jadi, apakah desa menjadi inspirator korupsi karena *money politic* pilkades?

Sebenarnya sumber permasalahan ada pada politik yang tidak rasional. Kenapa tidak rasional? Kepala desa tidak ada gaji, tetapi dibayar dengan bengkok. Bengkok untuk pembangunan desa kemudian diasosiasikan menjadi milik kepala desa. Kalau panen padi tiga kali dalam setahun, dihitung paling tidak pendapatan 200 juta. Kemudian dikalikan berapa ton pemimpin ketemu angka, kalau dikeluarkan 1 miliar maka untung sedikit. Itu dari bengkok. Sementara dari dana desa maupun beberapa bantuan pembangunan infrastruktur dari pusat bisa menjadi bumerang dan jebakan pikiran koruptif. Ini harus kita pecahkan bersama karena tantangan di desa hari ini berbeda dengan dahulu.

Sistem politik yang kita pilih mahal, sistem terbuka. Sementara pendanaan negara untuk partai politik rendah. Konversi suara ternyata sering kali tidak berbanding lurus dengan pendanaan secara rasional kepada partai politik. Contohnya, gaji bupati 6,5 juta, gubernur 8,5 juta, dan wakil presiden 40 juta yang dinilai tidak laik dengan proses ketika mereka terpilih. Negara harus sudah mulai memikirkan kepala desa digaji yang cukup. Di Surabaya contohnya: lurah digaji 30 juta, camat bisa 50 juta, tetapi di desa-desa lain bagaimana? Sehingga yang terjadi, tidak sedikit kasus kepala desa hasil pemilihan secara *money politic*, kemudian melakukan upaya-upaya yang merusak perilaku masyarakat desa itu sendiri.



Mengapa 36 persen pelaku korupsi yang ditahan KPK adalah kader politik, anggota DPR, dan kepala daerah? Ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama. Angka politik sangat memengaruhi angka persepsi indeks korupsi Indonesia, jadi varietas demokrasi proyek angkanya 28, sementara dari lulusan ekonomi ratingnya 59. Jadi angka-angka ini merupakan perbandingan korupsi yang diperbandingkan setiap negara. Untuk kasus Indonesia cukup menarik karena terus menanjak, ini jarang terjadi di negara lain.

Indonesia jika dibandingkan dengan negara lain, terbaik di dunia untuk pergerakannya. Dari 17 ke 40, naik 23 poin. Cina memberantas korupsi dengan hukuman mati naik 7 poin. Kemudian Malaysia di bawah kepemimpinan Mahathir bisa *reborn* setelah di zaman Najib turun 47. Itu pun hanya menaikkan Malaysia di angka 2 poin saja. Jadi, Indonesia sudah benar dalam pemberantasan korupsi, tetapi terlalu kaya dengan isu kota sehingga di desa juga perlu dilibatkan pemberantasan korupsi. Untuk itu, ada tiga strategi yang dilakukan KPK: Penindakan agar koruptor jera, pencegahan agar orang tidak melakukan korupsi, pendidikan agar orang tidak ingin korupsi. Demikian sekapur sirih dari kami untuk 21 judul buku hasil rumusan Kongres Kebudayaan Desa. Terima kasih.

Jakarta, 5 Agustus 2020

Giri Suprardiono

Direktur Dikyanmas KPK





Sekapur Sirih

Menteri Desa, PDTT

*A*ssalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh, salam sejahtera bagi kita semua, om swastiastu, namo budhaya, salam kebajikan.

Pertama-tama, mari kita bersama-sama bersyukur kehadiran Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan Kongres Kebudayaan Desa tahun 2020. Ini adalah satu momentum yang sangat luar biasa, titik pijak atau titik tolak dari kebangkitan desa-desa yang memiliki akar budaya, di mana perencanaan pembangunan dan pelaksanaan pembangunan desa

jangan sekali-kali lepas dari tumpuan akar budaya desa setempat. Mudah-mudahan kongres ini merupakan awal untuk kongres kebudayaan desa tahun-tahun berikutnya. Kedua, selawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw. yang memberi cetak tebal kebudayaan manusia di muka bumi.

Melalui kongres desa, kita semua sudah diberikan pandangan dan paradigma baru dalam melihat dunia, termasuk kebudayaan. Kita tentunya semakin sadar bahwa di balik pandemi Covid-19 terdapat ujian sekaligus hikmah. Kita belum tahu kapan tuntasnya, tetapi kita harus mengambil langkah konkret dan strategis, salah satunya dengan merumuskan tatanan baru. Dan tentu saja kita berharap pandemi segera berlalu.

Sebagaimana dijelaskan selama kongres, pandemi Covid-19 sudah sampai pada level mendekonstruksi tataran budaya manusia. Tidak hanya kebudayaan semata, tetapi ekososial politik juga terdekonstruksi. Untuk itu, ada beberapa hal terkait rumusan kongres agar bisa berkontribusi terhadap paradigma baru Indonesia pascapandemi.

Pertama, melalui kongres kita berharap bisa mengidentifikasi nalar tebal kebudayaan masyarakat desa, seperti gotong royong atau *holopis kuntul baris*, saling peduli antarsesama masyarakat desa, sekaligus membaiknya ekosistem politik di mana masyarakat desa mampu berpartisipasi terhadap pembangunan bangsa dan negara.

Kedua, kongres diharapkan mampu berkontribusi untuk pemikiran nalar kebudayaan baru yang otentik, unik, dan inovatif yang hari-harinya dijalankan masyarakat desa. Dengan kata lain,



di balik keriuhan negara mengurus problem bangsa, masyarakat desa punya model dan modul pendekatan khas yang berasal dari cara mereka menghadapi persoalan. Ini *problem solving* yang spesifik khas desa, contoh ketika ada masalah tidak terlalu berat, cukup selesai di desa. Hukum positif tidak selalu menjadi rujukan. Misalnya, ada pencuri ayam, tidak serta-merta diurus ke kantor polisi, dimasukkan sel. Melainkan diselesaikan di desa dengan sanksi sosial yang diputuskan oleh kepala desa, yang karena kemampuan dan kewibawaan yang dimilikinya sehingga keputusan diterima oleh masyarakat.

Ketiga, forum Kongres Kebudayaan Desa yang melibatkan beragam unsur keterwakilan: akademisi, praktisi, seniman, budayawan, pemangku adat, dan elemen pemerintahan dari pusat sampai desa. Untuk itu, saya berharap agar semua unsur saling berkolaborasi. Para praktisi menceritakan bagaimana desa melaksanakan kenormalan baru di desa. Akademisi bisa mereformulasi dan meredesain bagaimana kebijakan yang adaptif bagi desa. Sebagai keterwakilan pemerintah, kami berharap ada perhatian khusus pascakongres agar lebih serius dan terelaborasi dengan kebijakan untuk kesejahteraan desa di Indonesia.

Terakhir, kami dari Kemendesa PDTT terus mencari dan mengidentifikasi narasi tentang desa, masyarakat desa, dan dinamikanya mengikuti perkembangan zaman yang bisa kita formulasikan menjadi kebijakan. *Tagline* “Desa untuk Semua Warga atau Desa Surga” merupakan inti sari pemajuan kebudayaan desa, pemajuan masyarakat desa dengan memperhatikan kearifan lokal. Dana desa jangan hanya dirasakan elite desa, tetapi dirasakan

kehadirannya oleh seluruh masyarakat desa, itu inti dari surga, desa untuk semua warga desa.

Terima kasih kepada Sanggar Inovasi Desa, pemerintah Desa Panggunharjo, dan Jaringan Kerja Kongres Kebudayaan Desa 2020 yang telah mempersiapkan dan melaksanakan kongres dengan segala risiko dan konsekuensinya. Semoga kongres dengan hasil rumusannya yang terbingkai dalam 21 judul buku ini menjadi momentum berarti bagi perubahan dan penguatan budaya desa di masa yang akan datang. Demikian sekapur sirih dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, salam budaya desa.

Jakarta, 5 Agustus 2020

Abdul Halim Iskandar

Menteri Desa, PDTT





Pidato Kebudayaan

Dirjen Kebudayaan, Kemendikbud

*A*ssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, om swastyastu, namo buddhaya, salam kebajikan.

Revolusi perdesaan sejatinya adalah revolusi kebudayaan.

Bapak, ibu, dan peserta kongres yang saya hormati. Terima kasih telah mengundang saya dan memberi kesempatan bicara di depan Kongres Kebudayaan Desa. Saya baca kerangka acuan dengan saksama, saya melihat kebudayaan tidak dipahami semata kesenian atau warisan budaya. Namun, juga sebagai keseluruhan

cara hidup, cara berpikir menyangkut kebiasaan kita, ritual, dan praktek yang terkait kebudayaan. Jadi kebudayaan dalam pengertian luas, sama seperti semangat dari UU No. 5/2017, tentang pemajuan kebudayaan Indonesia.

Pertama, kita paham bagaimana Pandemi Covid-19 mengubah cara hidup kita secara drastis. Kita membatasi pertemuan dengan orang lain, bersentuhan dengan orang lain, menjaga jarak, dan kita juga punya beberapa keseragaman. *Physical distancing*, *lockdown*, dan seterusnya, semua masih dalam bahas Inggris, bahasa asing. Ini menunjukkan respons kita pada situasi pandemi masih cenderung datang dari luar, belum sepenuhnya menjadi sesuatu yang berakar pada masyarakat kita, dari dalam. Padahal kita mempunyai khazanah pengetahuan luar biasa menghadapi situasi pandemi. Tidak sedikit orang mengatakan, situasi yang kita hadapi tidak ada bandingannya.

Kedua, pada situasi luar biasa, kita perlu langkah-langkah luar biasa juga. Pemikir Inggris mengatakan, untuk mengatasi situasi Covid-19, kita perlu sebuah revolusi perdesaan. Revolusi ini landasan kita untuk tatanan masa depan. Karena revolusi bukan sesuatu luar biasa. Dalam sejarah Indonesia, kita sering mendengar seruan revolusi, terakhir revolusi mental. Jadi, tidak ada yang luar biasa dengan gagasan revolusi. Yang luar biasa adalah ketika gagasannya diutarakan oleh seorang bankir. Orang terkaya kedua di desa.

Gagasan mengenai revolusi perdesaan bisa kita tengok dalam sebuah tulisan yang dimuat di situs *World Economic Forum*. Ini keluar dari kebiasaan lain, forum ekonomi dunia dikenal oleh kepala pemerintahan dunia sebagai kumpulan para pebisnis, ekonom, yang



membentuk sistem untuk mendominasi, jelas bukan forum untuk revolusi. Kita tidak mungkin kembali ke masa sebelum Covid-19, ke masa yang sebelum normal lama, dan kita perlu sebuah tantangan baru, tantangan yang lebih manusiawi, ramah lingkungan dan berkelanjutan. Karena kata kunci tatanan baru adalah keselamatan.

Bisa dibayangkan, ketika semua orang mendapat kesempatan mengembangkan diri dan meningkatkan kualitas hidup. Kita akan mudah sekali bersepakat untuk hal tersebut. Namun, bagaimana caranya? Jawaban paling jujur kita berikan pada pertanyaan mendasar yang kita belum ketahui bersama. Belum ada yang mengetahui bagaimana caranya untuk bisa sampai ke sana, karena tidak ada atau tepatnya belum ada cetak biru siap pakai. Namun, coba kita pastikan titik tolaknya ada pada desa. Perjalanan kita sebagai masyarakat, sebagai bangsa, dimulai dari desa. Sekitar 1550 tahun lalu, asal mula pengelompokan masyarakat dalam jumlah besar yang kemudian membentuk bangsa Indonesia. Periode selanjutnya ketika kita ingin membangun negeri modern, tetapi desa dilupakan, diabaikan. Seluruh sumber daya kita keluarkan untuk membangun sektor modern yang oleh Covid-19, diingatkan untuk kembali ke asal usul, kembali ke dasar, kembali ke akar, kembali ke desa, itu alasan utama.

Alasan berikutnya, desa telah menyiapkan kebutuhan dasar untuk normal baru, terutama pangan dan kesehatan. Dua hal pokok ini tidak boleh diserahkan semua pada pasar. Ketika pembatasan sosial diberlakukan, kemudian ada orang panik memborong bahan pangan dan obat-obatan, termasuk yang tidak diperlukan. Sementara yang memerlukan tidak bisa membeli. Penyelesaian masalah seperti

ini tidak sesederhana menangani penyelewengan, tapi ada kelemahan dalam sistem yang harus diperbaiki. Ini semata bukan soal mafia impor beras maupun gas—yang memang harus disingkirkan. Namun, ada yang lebih penting, yaitu menata ulang sistem yang berpihak, yang bisa menegaskan kedaulatan di atas sistem itu sendiri sehingga mengembalikan kemampuan kita mengelola sumber daya yang ada. Fokus utamanya untuk pemenuhan kebutuhan kita semua, terutama kebutuhan di dalam negeri. Selebihnya, bolehlah berbagi dengan negara tetangga, negara sahabat.

Dan saya kira, yang berkumpul sekarang di kongres, adalah para pejuang akar rumput yang sudah lama menekuni masalah ketimpangan dan penyelewengan, yang bergerak mengurus memuliakan kembali benih-benih lokal. Ada yang terlibat praktik agro ekonomi, ada yang mengurus pasar lokal dan nasional untuk melayani kebutuhan masyarakat, penggerak koperasi usaha kecil, BUMDes, semua elemen yang diperlukan dalam tatanan mendatang. Saatnya, kita belajar kembali dari kearifan lokal yang diturunkan dari generasi ke generasi baik lisan maupun tulisan. Hemat saya, ini kerja-kerja kebudayaan.

Pengetahuan tradisional di masa pandemi terlihat memiliki keunggulan. Kasus Covid-19 banyak sembuh karena obat tradisional. Balitbang pertanian sudah identifikasi 50 tanaman herbal untuk penangkal virus. Beberapa perusahaan jamu sudah memproduksi ramuan daya tahan tubuh untuk menghadapi Covid-19. Semua bukan sekadar romantisme, tapi pikiran rasional. Kita tidak mungkin diam menunggu vaksin datang. Sekarang, di banyak tempat, orang-orang mulai menggali pengetahuan dari naskah-naskah,



tradisi lisan, dan berbagai praktik lainnya untuk memperkuat daya tahan terhadap virus. Dan dalam prosesnya, kita menyadari betapa pengetahuan lokal yang selama ini diabaikan ternyata memiliki potensi pengembangan yang luar biasa.

Covid-19 telah memaksa kita melihat kembali jejak dan perjalanan kita. Covid-19 sudah mendesak kita memanfaatkan kekayaan budaya dan intelektual yang kita miliki. Memanfaatkan teknologi mutakhir, bermacam teknologi terbaru, temuan di berbagai bidang, kesehatan, pangan, energi terbarukan, dan pada akhirnya seluruhnya diharapkan bisa menghasilkan pengetahuan sebagai landasan untuk tatanan baru.

Kalau kita tengok lebih jauh, seluruh praktik baik tatanan baru, mempunyai nilai ekonomi yang sangat besar. Sebagai contoh, pengobatan berbasis pengetahuan lokal sekarang disebut pengobatan integratif dengan nilai total di dunia mencapai 360 Miliar Dolar. Padahal pengetahuan integratif hanya bagian kecil saja dari industri yang disebut *wellness industry* yang mencakup banyak hal: ada perawatan diri, makanan sehat, pariwisata, dan total nilainya diperkirakan sudah 4,2 Triliun Dolar. Itu data sebelum Covid-19. Dan menurut hemat saya, di masa Covid-19 justru industri berbasis pengetahuan lokal di bidang kesehatan, bidang keselamatan akan semakin berkembang. Seiring dengan meningkatnya kesadaran publik mengenai kesehatan.

Dalam sebuah studi dan riset, telah memperlihatkan bahwa 40% dari nilai total 4,2 Triliun Dolar atau 1,7 Triliun Dolar Amerika, sama besarnya dengan 25 Ribu Triliun Rupiah. Dan pada tahun



2023 kelak, nilai tersebut akan berada di Asia Pasifik. Jadi, kue yang cukup besar dari industri *Wellness* tersebut akan ada di Asia Pasifik. Pertanyaannya kemudian, Indonesia sebagai sektor perekonomian terbesar keenam di Asia Pasifik apa rencananya? Padahal, relatif kita punya semua. Keanekaragaman hayati luar biasa, salah satu yang paling besar dan lengkap di dunia. Pengetahuan lokal mengelola alam juga luar biasa. Dan jangan lupa, banyak penemuan di bidang kesehatan modern pun dilakukan di Indonesia. Para peneliti dari berbagai belahan dunia datang ke Indonesia, berinteraksi dengan orang desa, mencatat kebiasaan mereka, kemudian menghasilkan temuan yang sampai sekarang masih punya pengaruh besar dalam kedokteran modern.

Itu semua kita punya, tapi pertanyaannya, apa rencana kita? Saya percaya bahwa fokus para pengembang *Wellness* di Indonesia akan membawa angka pertumbuhan kembali bergerak naik, tapi hendaknya harapan besar ini jangan sampai mengalihkan fokus kita. Kita membangun tatanan baru bukan untuk menjadi yang paling besar. Presiden Jokowi dalam sidang IMF mengingatkan dengan sebuah pertanyaan retoris, untuk apa menjadi yang paling besar di tengah dunia yang tenggelam?

Bapak, ibu, dan peserta kongres yang saya hormati. Tatanan baru yang kita rumuskan memang seharusnya mengutamakan keselamatan dan kebahagiaan, itu kata kuncinya. Bukan angka pertumbuhan, bukan uang. Covid-19 mengingatkan kita semua bahwa uang bukan segalanya. Punya uang tapi tidak ada yang bisa dibeli, itu pelajaran berharga di masa krisis pandemi. Semua tidak mudah. Kita terbiasa dengan peralatan modern, termasuk uang.



Mengubah cara pandang dan kebiasaan memerlukan perubahan mendasar, perubahan kebudayaan. Karena itu revolusi perdesaan sejatinya adalah revolusi kebudayaan.

Benih-benih kebiasaan baru, kebudayaan baru sudah mulai bertumbuhan. Di tengah pembatasan sosial, kita mulai melihat orang kembali ke alam, bercocok tanam. Kita menangkap ada kerinduan untuk kembali belajar sejarah, kembali belajar kebudayaan, tradisi spiritual dan praktik dalam bermasyarakat. Gerakan sosial juga bertumbuhan di mana-mana. Di Yogyakarta contohnya, ada gerakan Solidaritas Pangan Jogja: membangun dapur umum untuk membantu masyarakat kesusahan. Kita mencatat para seniman memproduksi alat kesehatan seperti Alat Pelindung Diri (APD) dan *face shield* yang terjangkau.

Revolusi perdesaan sudah dimulai. Tugas kita dan tugas kongres kita ini, untuk merajut inisiatif menjadi gerakan efektif. Merajut *science* mutakhir dengan pengetahuan tradisional. Kita merajut teknologi digital dengan pranata lokal. Gerakan ini adalah gerakan interdisipliner, karena tidak ada bidang ilmu atau sektor masyarakat yang bisa menjalankan tugas besar sendirian. Di sinilah semangat gotong royong akan mendapatkan wujud nyata.

Terakhir sebagai penutup, saya memohon bantuan para pegiat desa, para aktivis kepala desa, kepala daerah yang hadir dalam kesempatan kongres ini, untuk memperhatikan balai kebudayaan di desa. Sebagian dari kita punya padepokan, sanggar, dan seterusnya. Saya sangat memohon bantuan kita semua agar seluruh institusi ini bisa bertahan di masa sulit. Bagi yang belum punya padepokan,



sanggar, mohon bantuan agar kantor desa juga bisa berfungsi sebagai balai kebudayaan pusat pemajuan kebudayaan, bukan soal gedung fisik, tapi program dan kegiatannya. Di sinilah harapan saya kita bisa mulai melancarkan revolusi kebudayaan melalui musyawarah, lumbung pengetahuan. Di sinilah saya berharap kreativitas dan energi pembaruan bisa berkonsolidasi. Perangkat desa bisa menjadi agen pemajuan kebudayaan di wilayah setempat, kami siap kerja sama dengan seluruh unsur. Semoga setelah kongres, kita bisa menghasilkan agenda aksi konkret di tatanan baru. Terima kasih. Wassalam.

Jakarta, 1 Juli, 2020

Dr. Hilmar Farid

Dirjen Kebudayaan, Kemendikbud





Daftar Isi

Pengantar Editor..... v

Irfan Afifi

Sekapur Sirih

1. **Gubernur DIY..... xiii**

Hamengku Buwono X

2. **Direktur Dikyanmas KPK..... xviii**

Giri Suprardiono

3. Menteri Desa, PDTT	xxii
-----------------------------	------

Abdul Halim Iskandar

Pidato Kebudayaan Dirjen Kebudayaan,

Kemendikbud	xxvi
--------------------------	-------------

Dr. Hilmar Farid

Daftar Isi	xxxv
-------------------------	-------------

**Komunikasi Desa: Merumuskan Kebijakan Komunikasi
Publik dalam Tata Pemerintahan Desa Menuju**

Indonesia Baru	1
-----------------------------	----------

Hermin Indah Wahyuni

Peran *Leadership* (Desa) dalam Mengelola

Informasi dan Menanggulangi Infodemi	10
---	-----------

Tri Agus Susanto

Corona, Desa, dan Negara: Bagaimana Desa

Menyelamatkan Indonesia di Era Pandemi Covid-19	22
---	-----------

Puthut EA

Jurus Jitu Reposisi dan <i>Rebranding</i> Desa	40
---	-----------

Oleh FX Rudy Gunawan

Upaya Membangun Kembali Komunikasi Publik.....	50
---	-----------

Febri Diansyah

<i>Branding</i> Desa di Jempol Milenial.....	61
---	-----------

Edy SR



Jurnalisme Desa untuk Mengentaskan Kemiskinan..... 74

Firmansyah

**Memupuk Modal Sosial Melalui Komunikasi Sains:
Sebuah Strategi Kebijakan Meningkatkan Daya Lenting
Masyarakat Desa dalam Menghadapi Pandemi..... 89**

Angga Wijaya Holman Fasa, Uus Faizal Firdausy,
dan Sanusi

Epilog 107

Ketua Panitia Kongres Kebudayaan Desa 2020

Deklarasi Arah Tatanan Indonesia Baru dari Desa..... 136

Kerabat Kerja Kongres Kebudayaan Desa 2020..... 139





Komunikasi Desa: Merumuskan Kebijakan Komunikasi Publik dalam Tata Pemerintahan Desa Menuju Indonesia Baru¹

Hermin Indah Wahyuni

Tulisan ini merupakan upaya memetakan posisi desa dalam kebijakan komunikasi publik dan tantangannya ke depan. Kajian ini penting untuk mengetahui bagaimana seharusnya desa ditempatkan dalam perbincangan arus informasi masyarakat modern.

1 Tulisan ini disarikan dari materi yang disampaikan Hermin Indah Wahyuni dalam acara webinar Kongres Kebudayaan Desa 2020, Seri 18 di Hari Kesembilan (dari rangkaian webinar seri 1 hingga seri 18, 1--10 Juli), pada Jumat, 10 Juli 2020: 13.00 s.d. 16.00 WIB. Tulisan ini dirangkaikan oleh Rheisnayu Cyntara.

Sebagai komoditas dengan karakter komunal, desa punya potensi yang luar biasa untuk dikembangkan. Desa bisa menjadi kunci pertahanan negara jika potensinya bisa dimaksimalkan. Di era pandemi seperti sekarang ini, desa dianggap dapat menjadi “*buffer zone*”, zona penyangga terakhir ketika tatanan masyarakat urban kolaps. Desa teruji sebagai lumbung pangan yang mampu bertahan di tengah gempuran pandemi. Lantas, bagaimana fakta sebenarnya di lapangan? Berdasarkan data dari Data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dari total 73.709 desa yang ada di Indonesia 174 desa masuk dalam kategori mandiri (0.23%), 3.608 desa kategori maju (4.89%), dan 22.882 desa kategori berkembang (31.04%), sisanya masih masuk dalam kategori tertinggal dan sangat tertinggal. Artinya, meski dianggap punya potensi besar, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, terutama terkait desa-desa tertinggal.

Klasifikasi Status Desa	Jumlah	%
Desa Mandiri	174	0.23 %
Desa Maju	3.608	4.89 %
Desa Berkembang	22.882	31.04 %
Desa Tertinggal	33.592	45.57%
Desa Sangat Tertinggal	13.453	18.25%
TOTAL	73.709 desa	

Salah satu hal yang perlu jadi sorotan adalah cara pandang terhadap desa yang masih menganut logika umum “*community left behind the state and business*”. Desa masih termarginalkan dalam komunikasi publik, jauh di belakang kepentingan negara dan bisnis. Desa dipandang sebagai “*disfunctional community*”, komunitas yang mengalami disfungsi akibat kerusakan struktur sebagai dampak pembangunan yang tidak berkelanjutan. Sebagai komunitas yang disfungsi, desa dianggap kurang dapat beradaptasi mengikuti lingkungan yang berubah.

Padahal untuk membicarakan desa di era ini, bayangan tentang desa era 70an hingga 80an sudah tidak relevan lagi. Desa sebagai wilayah rural sudah makin jarang ditemukan. Salah satu faktor penting yang mempengaruhinya adalah akses teknologi yang semakin terbuka dengan adanya penetrasi internet hingga pelosok Indonesia. Berdasarkan survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJI) tahun 2017 tentang penetrasi pengguna internet berdasarkan karakter kota/kabupaten, hanya 48.25% wilayah yang bisa dikategorikan sebagai rural. Sisanya sebesar 49.49% masuk kategori rural-urban dan 72.41% masuk kategori urban.

Sementara survei kepemilikan perangkat (gadget) berdasarkan karakter kota/kabupaten menunjukkan hasil yang hampir serupa. 42.06% populasi di wilayah rural sudah memiliki telepon pintar (*smartphone*), begitu juga dengan 45.42% populasi rural-urban, dan 70.96% populasi urban. Artinya, paradigma desa sebagai masyarakat minim informasi sudah tidak relevan dan perlu ditinggalkan. Data penetrasi internet dan kepemilikan perangkat menunjukkan bagaimana konstelasi desa telah berubah dari wilayah tradisional



menuju wilayah modern dengan keterbukaan arus informasi. Desa harus diposisikan ulang sebagai wilayah dalam transisi, bukan lagi wilayah rural, tetapi sudah menjadi wilayah rural-urban dengan karakteristik yang beragam. Dengan begitu, model komunikasi desa pun harus disesuaikan dengan karakteristik baru ini.

Fakta Komunikasi Desa

Desa kerap kali digambarkan sebagai masyarakat yang minim informasi. Bahkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDPT), Marwan Jafar (2014 – 2016) mengatakan peran media televisi selama ini hanya menjangkau 40% wilayah Indonesia. Hal ini menyebabkan informasi kebijakan pemerintah tidak bisa tersampaikan secara utuh kepada masyarakat, sehingga dapat mengakibatkan terkikisnya rasa nasionalisme warga desa di perbatasan sehingga masyarakat desa gampang dihasut. Itulah yang menjadi dasar terjalannya kesepakatan antara pemerintah dengan PT Elnet Media Karya dalam dalam program Layar Desa (2015). Padahal jika merujuk data yang ada, kebijakan ini menjadi paradoks karena fakta di lapangan menunjukkan akses teknologi sudah masuk hingga wilayah rural.

Selain itu, ada pula kebijakan peningkatan inovasi teknologi bagi wilayah pedesaan pada 2019 di bawah Mendes PDTT, Eko Putro Sandjojo. Inovasi ini berupa penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskudes) untuk mengupayakan pelaporan keuangan desa yang efektif dan akuntabel. Juga program “One Village One Innovation” yang memberikan pendampingan bagi 126 desa untuk pemanfaatan teknologi tepat guna (TTG) dan wacana Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil untuk menciptakan desa digital



pada 2021 yang fokus pada pengembangan ekonomi kreatif berbasis desa dan revolusi digital berbasis desa.

Beberapa inovasi yang diinisiasi oleh pemerintah tersebut sering kali tidak berjalan dengan baik di lapangan. Pasalnya program-program tersebut bukan hasil komunikasi antara kedua belah pihak, namun lebih pada ide-ide yang dipaksakan dari level atas ke bawah. Sehingga dengan karakteristik desa yang beragam, inovasi-inovasi tersebut tidak mampu diterima dengan baik oleh masyarakat desa.

Komunikasi Publik Dalam Tata Pemerintahan Desa

Komunikasi dalam tata pemerintahan desa dapat dimaknai sebagai interaksi yang terjadi di antara elemen-elemen dalam masyarakat desa. Interaksi ini melibatkan pemerintah desa beserta struktur pendukungnya dengan masyarakat secara umum (*top down*) ataupun secara interaktif masyarakat dengan pemimpinnya (*bottom up*). Komunikasi yang ideal terjadi apabila interaksi tersebut bisa dimanfaatkan untuk membahas isu-isu bersama untuk mencari solusi bagi masyarakat berupa keputusan yang rasional.

Komunikasi publik desa dalam lingkungan masyarakat informasi juga harus disesuaikan kondisi desa dalam masa transisi. Meski sudah modern dengan adanya penetrasi teknologi, komunikasi desa masih mempunyai dua karakteristik kuat. Pertama, sebagai “*face to face interaction community*” atau komunitas yang berkomunikasi dengan cara tatap muka yang mewakili karakter *gemeinschaft*, komunal, inklusif, dan konvergen. Kedua, “*community without propinquity*” atau komunitas tanpa kedekatan (dengan adanya internet, masyarakat mulai berkomunikasi lewat *gadget* tanpa harus



bertatap muka) yang mewakili karakteristik *gesellschaft*, individualis, eksklusif, dan divergen. Dua karakter tersebut merupakan bekal awal desa untuk menemukan struktur komunikasi baru, sebuah posisi antara karakteristik rural dan urban.

Konsep *public sphere* Habermas mengingatkan kita mengenai pentingnya kehadiran sistem komunikasi publik. Dengan sistem ini diharapkan masyarakat akan ikut serta dalam proses demokrasi yang sedang berlangsung. Untuk mendukungnya negara harus menjaga dirinya agar tidak melakukan intervensi yang terlalu jauh agar sistem komunikasi publik benar-benar terwujud. Konsep tersebut juga perlu digunakan untuk merumuskan komunikasi desa.

Di era kemajuan teknologi, pemerataan pembangunan jaringan internet dan optimalisasi kegiatan daring di semua lini menjadi poin penting dan menunjang keseimbangan desa dan kota. Tidak hanya bermanfaat bagi wilayah kota, optimalisasi pemanfaatan teknologi ini bisa digunakan untuk memberikan proses “*nurture*” atau pengasuhan bagi komunitas desa.

Fakta yang terjadi di lapangan, meski penting, internet masih berfungsi sebagai pelengkap daripada pengganti, dan komunikasi tatap muka masih jadi yang utama. Meskipun diskusi dominan saat ini menyebutkan bahwa internet menciptakan “komunitas virtual” yang tersebar (*dispersed*), beberapa riset menunjukkan penggunaan internet untuk memelihara komunitas lokal masih bersifat *closed-circuit*, dilakukan oleh orang-orang yang saling mengenal di area atau wilayah tertentu. Contoh sederhananya adalah pemanfaatan internet dalam mencari dukungan untuk isu-isu yang diperjuangkan oleh komunitas. Kekuatan gerakan-gerakan aktivisme daring seperti ini

sebagian besar masih terletak pada akar kelokalan mereka. Di sisi lain, grup media sosial dan aplikasi pesan singkat seperti WhatsApp, Line, dan Telegram terbukti efisien dan efektif dalam proses koordinasi aktivisme sosial di tingkat komunitas.

Internet memang membuka kemungkinan-kemungkinan baru namun ada medium yang lebih efektif yaitu kelompok diskusi, pertemuan-pertemuan, papan buletin, dan sejenisnya yang memungkinkan orang bertemu tatap muka tetap berhubungan antara pertemuan dan bertukar teks dan data. Media baru berupa web dapat memfasilitasi pengembangan “*en-clave*” budaya dan sosial-spasial. Seperti halnya orang dapat memilih untuk mempertahankan persahabatan dengan orang-orang yang tersebar di luar wilayahnya. Komunikasi yang terkomputerisasi juga mampu memfasilitasi kegiatan kelompok yang menarik. Internet adalah kendaraan yang sangat sukses untuk memobilisasi orang berdasarkan satu minat pada satu waktu, untuk menghasilkan “opini publik”.

Beberapa kelebihan media baru tersebut sudah mulai mampu ditangkap oleh desa. Inisiatif warga untuk mengombinasikan antara media konvensional dan media baru bermunculan.

1. *www.aminjaya.desa.id* adalah salah satu portal informasi yang dibangun oleh masyarakat Desa Amin Jaya di Pangkalan Bun, Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah. Portal tersebut memuat informasi berkaitan dengan profil desa, potensi desa, program, BUMDes, dan juga informasi rutin mengenai Desa Amin Jaya.
2. *www.umeanyar-buleleng.desa.id* juga melakukan upaya yang sama pada portal informasi selama masa Covid 19. Selain itu,



portal juga menampilkan kegiatan-kegiatan kebudayaan yang juga bisa digunakan sebagai materi promosi pariwisata.

Pelibatan banyak elemen dalam pemberdayaan desa juga bisa menjadi strategi pengembangan komunikasi desa. *Influencer* media sosial sebagai aktor pihak ketiga, dapat dimanfaatkan untuk membangun sejumlah besar hubungan yang relevan dengan kualitas spesifik untuk mempengaruhi pemangku kepentingan organisasi melalui produksi konten, distribusi konten, interaksi, dan penampilan pribadi di media sosial. Para *influencer* dapat berperan strategis dan signifikan saat mereka dilibatkan dalam gerakan-gerakan untuk inovasi desa. Mereka akan menjadi “*hub*” *connector* dengan lanskap yang lebih luas untuk penguatan dan pemberdayaan desa.

Komunikasi Desa: Tantangan ke Depan

Meski media baru mampu membuka banyak kemungkinan, namun masih ada beberapa tantangan dalam perumusan model komunikasi desa. Perubahan paradigma komunikasi *top down* ke *bottom up* harus ditemukan kombinasi yang seimbang (*balance*) agar menghasilkan keputusan yang rasional bagi seluruh masyarakat desa. Pengembangan sistem yang lebih organik, yang tumbuh dari ide-ide lokal harus terus didorong. Desa perlu diberikan kemandirian untuk menentukan apa yang tepat dan dibutuhkan oleh mereka.

Gap atau kesenjangan yang saat ini terjadi adalah memahami teknologi hanya sebagai teknologi saja, sehingga teknologi tidak seiring dengan tumbuhnya kultur pengguna, teknologi menjadi artificial. Harus ada optimalisasi “*deliberative process*” dalam proses-proses komunikasi berbasis elektronik semacam ini. Kesiapan kultur masyarakat untuk ikut terlibat dalam proses yang menentukan

kehidupan mereka sendiri harus dipertimbangkan. Caranya dengan menggali nilai-nilai lokalitas yang beragam antara satu desa dengan yang lain dan menjadikan *local wisdom* tersebut sebagai pendorong untuk menentukan strategi yang tepat. Pemerintah juga harus mengembangkan sistem yang *pro village* dalam pengembangan infrastruktur teknologi di Indonesia. Dengan begitu, teknologi tidak hanya akan menjadi *panacea* tetapi bisa menjadi solusi tepat bagi model komunikasi desa karena memiliki basis kultur yang sesuai dengan karakteristik penggunaannya.

Profil Narasumber

Dr. Phil. Hermin Indah Wahyuni, M.Si,

Ia mengawali studinya di Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Gadjah Mada (UGM) pada jenjang sarjana dan master. Lalu gelar doktoralnya ia raih di Leipzig University, Jerman pada tahun 2006. Disertasinya “*The Struggle to Create a Democratic Broadcasting System in Indonesia: Re-regulating Television after Political Transformation 1998*”, menyoroti tentang regulasi penyiaran khususnya televisi, pasca-Reformasi 1998.

Hingga kini, Hermin masih aktif di beragam penelitian serta menulis untuk makalah, jurnal maupun buku. Salah satu risetnya di tahun 2019 adalah tentang peran digitalisasi dalam pengambilan kebijakan pemerintahan, “Digital Government dan Demokrasi Musyawarah Menuju Proses Pengambilan Keputusan Partisipatif”. Hal senada juga ia jabarkan di buku terbarunya, “Kebijakan Media Baru di Indonesia; Harapan, Dinamika, dan Capaian Kebijakan Media Baru di Indonesia”.





Peran *Leadership* (Desa) dalam Mengelola Informasi dan Menanggulangi Infodemi

Tri Agus Susanto

Desa harus jadi kekuatan ekonomi

Agar warganya tak hijrah ke kota

Sepinya desa adalah modal utama

Untuk bekerja dan mengembangkan diri

(Desa, Iwan Fals)

Dr. Tedros Adhnom Ghebreyesus, Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dalam sambutan Konferensi Keamanan Dunia di Munich, Jerman (15/2/2020) mengatakan, “Kami tidak hanya memerangi epidemi, kami sedang berjuang melawan infodemi.”

Jika Yuval Noah Harari menyebut bahwa Covid-19 memaksa kita untuk menggandakan upaya kita untuk melindungi manusia lain dan bukanlah sikap pasrah—melainkan gabungan antara penyesalan dan harapan. Arundhati Roy menyebut pandemi ini memaksa manusia untuk putus hubungan dengan masa lalunya. Membayangkan dunia yang baru. Pandemi adalah portal, sebuah pintu gerbang menuju dunia berikutnya. Harari juga menyebut “solidaritas global” dengan beberapa poin kerja sama: seperti berbagi informasi secara global atau keterbukaan informasi antarnegara, kesepakatan ekonomi, dan lalu lintas perjalanan. Sementara Slavoj Žižek lewat bukunya *Pandemic* (2020) membawa istilah lain, menyebutnya sebagai komunisme global. Kita tak perlu terganggu dengan istilah ini. Apa yang dimaksud Žižek bukanlah politik suatu negara, melainkan sebuah kerja sama. Komunisme dalam pengertian paling sederhana, koordinasi dan kolaborasi global.

Menurut Harry Sufehmi, pendiri Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), istilah infodemi kini sudah mengglobal karena turut memperburuk situasi dan tidak menolong sama sekali. “Kita saat ini di situasi pandemi, wabah global, bukan lokal. Infodemi tidak menolong situasi yang parah ini,” jelas Harry di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Sabtu (18/4/2020).



Fenomena infodemi sering muncul di tengah masyarakat, seperti misalnya informasi yang tidak benar mengenai salah satu obat penangkal Covid-19 yang membuat masyarakat justru merasa aman dengan adanya obat tersebut sehingga mengabaikan anjuran protokol kesehatan. Bagaimana kepemimpinan di desa mengelola informasi dan menanggulangi infodemi?

Berdasarkan data Globalwebindex yang dipublikasikan pada Januari 2020, ada 160 juta pengguna aktif media sosial di Indonesia. Mereka bagian dari 175,4 juta pengguna internet dari 272,1 juta penduduk Indonesia. Youtube merupakan media sosial yang paling banyak digunakan dengan 140,8 juta pengguna. Media sosial yang digunakan terbanyak selanjutnya adalah Whatsapp 134,4 juta. Facebook 131,2 juta, Instagram 126,4 juta, Twitter 89,6 juta, Line 80 juta, Facebook 80 juta, LinkedIn 56 juta, Pinterest 54,4 juta, dan Wechat 46,4 juta orang.

Berdasarkan catatan Mafindo (2019), bersamaan dengan pelaksanaan pemilihan umum, rata-rata terdapat 100 hoaks per bulan, 60 persen di antaranya soal politik. Saat ini, rata-rata dari 100 hoaks per bulan, sebagian besar terkait pandemi Covid-19. “Masyarakat kita terlanjur ramai-ramai bergerak menggunakan media sosial, tetapi belum tahu bagaimana membaca informasi yang benar,” kata Ketua Presidium Mafindo Setiaji Eko Nugroho (Kompas, 11/6/2020). Dalam memerangi atau melawan isu atau informasi berlebihan yang keliru ini, setiap individu harus kembali merujuk pada *sanad* dan *matan*. “Dasarnya simpel untuk membantah atau mendeteksi hoaks. *Sanad* itu sumber, *matan* itu konten,” ujar Setiaji. *Sanad* adalah asal atau sumber informasi yang ada.

Sedangkan, *matan* adalah bunyi makna dan pemahaman tentang isi dari informasi yang beredar tersebut.

Pandemi membuat setiap orang semakin sering menggunakan gawai sebagai pengganti kegiatan tatap muka. Ini konsekuensi bekerja di rumah dan belajar di rumah. Risiko terjadinya infodemi semakin besar. Konten-konten berita dan isu terkait pandemi di media sosial ataupun pesan instan elektronik yang berseliweran bersamaan dengan tingginya penggunaan gawai dimungkinkan semakin sering dikonsumsi. Berita-berita menyesatkan dan membingungkan yang dibagikan oleh kawan dan jejaring lalu dijadikan acuan dalam memahami realitas yang terjadi tanpa dilakukan pengecekan fakta. Pengecekan fakta merupakan hal vital dilakukan termasuk berita yang diproduksi media ternama, jurnalisme berbasis fakta pun bisa bias dan *error* akibat kerja jurnalisme yang dipacu oleh kecepatan dan tenggat waktu. Apalagi kini ada tren media berbasis internet yang lebih mengejar klik dibanding menyampaikan fakta.

Ruralisasi

Covid-19 merupakan tes bagi sebuah kepemimpinan politik. Kekurangsiapan pemerintah daerah sebetulnya karena susunan pemerintahan kita yang Multi level, ada pemerintahan pusat (1), pemerintahan provinsi (34), pemerintahan kabupaten (415), pemerintahan kota (93), hingga pemerintahan desa (74.910). Koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi tidak bisa dengan cepat dijalankan karena panjangnya mata rantai pemerintahan yang kompleks.



Kita saat ini bisa melihat gaya kepemimpinan seperti apa yang tampil pada setiap level, mulai dari presiden, gubernur, bupati, walikota, dan kepala desa; dalam menangani masalah Covid-19 ini. Gaya kepemimpinan tidak hanya menggambarkan cara berkomunikasi tetapi yang paling penting apakah bisa mengeksekusi kebijakan di lapangan secara efektif. Ketika wabah menyerang seluruh masyarakat dia bukan lagi sekadar masalah kesehatan tetapi telah menjadi masalah politik. Seorang pemimpin harus menunjukkan apakah dia mampu mengatasi masalah ini atau sebaliknya.

Virus Covid-19 juga menyebar ke desa-desa. Banyak pekerja dari kota-kota besar dan migran dari negara-negara pandemi pulang kampung. Apakah kepala desa siap menjalankan protokol Desa Tanggap Covid-19? Sejauh mana protokol kesehatan bisa dijalankan mengingat rendahnya tingkat kepatuhan warga dan konsistensi ketegasan petugas. Bisakah para pemimpin pemerintahan desa memastikan efektivitas pilihan yang telah diambil ini?

Pandemi Covid-19 menunjukkan ada negara-negara yang tidak diperhitungkan dunia ternyata mampu menghadapi badai pandemi dengan tangguh. Misalnya Belarus, Thailand, dan Vietnam. Ketiga negara ini ternyata memiliki satu benang merah karakter yang sama di bidang perekonomian: kuat di sektor pertanian, seperti gandum, padi, perkebunan kopi, dan hortikultura sayuran. Mereka sama-sama memiliki program yang disebut sebagai ruralisasi.

Ruralisasi adalah pergeseran penduduk dari kota ke desa. Artinya, ada penguatan demografis di pedesaan. Penduduk yang kuat di wilayah desa membuat fundamental ekonomi di wilayah

rural atau pinggiran juga menjadi kuat. Belarus, Thailand, dan Vietnam berhasil menekan dampak ekonomi karena pandemi, karena memiliki fundamental perekonomian yang kuat berbasis pertanian dan perkebunan.

Marwan Jafar, anggota DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, meminta pemerintah mendorong ruralisasi di pedesaan selama pandemi Covid-19. “Ini momentum penting untuk menekan arus urbanisasi warga ke kota. Mereka menetap di desa, kembali membangun desa,” kata Marwan dalam keterangan tertulisnya, (22/4/2020). Menurut mantan Menteri Desa ini, perlu ada strategi dan langkah nyata pemerintah agar warga yang pulang ke desa karena terkena pemutusan hubungan kerja di kota, tidak kembali lagi ke kota. Tetapi, menetap di desa untuk membangun desanya. Marwan menyarankan adanya pemetaan potensi yang dimiliki masing-masing daerah dan desa. Sehingga, pemerintah tepat dalam mengintervensi program, baik di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, nelayan, dan usaha mikro lainnya. Saran lainnya adalah mendorong penciptaan keterampilan yang sesuai dengan kelompok masyarakat yang melakukan ruralisasi, sehingga mereka dapat beradaptasi dengan dunia baru dengan pola-pola modernisasi sesuai bidang. “Dibutuhkan pengembangan program pembangunan daerah dengan kegiatan dan pendekatan baru,” katanya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dari 24,79 juta penduduk miskin di Indonesia per September 2019, sebanyak 60 persen atau 14,93 juta jiwa ada di pedesaan, sisanya 9,86 juta jiwa ada di perkotaan. Data ini tentu saja akan berubah makin mengkhawatirkan setelah pandemi Covid-19 menghantam



Indonesia. Mereka yang mestinya pada 2020 bisa terangkat dari penduduk miskin, kembali miskin karena pandemi. Bahkan banyak penduduk yang sebelumnya tidak miskin kini jatuh miskin.

Data Kemendes, dari 74.953 desa sudah membentuk relawan desa tanggap Covid-19 di 4.556 desa atau sekitar 6% (CNBC,5/3/2020). Relawan desa memiliki tugas yang harus dikerjakan sesuai dengan prinsip gotong royong. Kepala desa, aparat desa, warga desa, semua melakukan kegiatan secara gotong royong. Setidaknya ada lima tugas relawan desa tanggap Covid-19. 1) Relawan desa harus bisa bekerja sama dengan Rumah Sakit dan Puskesmas. 2) Menempatkan orang dalam pemantauan (ODP) ke ruang isolasi yang telah disiapkan. 3) Menyediakan logistik bagi ODP selama di ruang isolasi. 4) Melaporkan pasien dalam pengawasan (PDP) ke Puskesmas atau Gugus Tugas Covid-19 di Kabupaten. 5) Menghubungi petugas medis gugus tugas karena relawan desa harus taat kepada protokol yang terkait dengan kebijakan-kebijakan gugus tugas yang ada di kabupaten.

Gaya Pemimpin Desa Zaman *Now*

Covid-19 yang mewabah secara global menimbulkan disrupti dan kekacauan dalam hampir semua aspek kehidupan: kesehatan, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan agama. Gagap menghadapi pandemi yang menyebar cepat, beberapa pemerintah negara demokrasi, termasuk Indonesia, mengambil keputusan dan tindakan yang tidak selalu sejalan dengan prinsip demokrasi.

Kemunduran demokrasi tampak dari penerbitan Perppu No I/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas

Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19. Perppu itu kemudian disetujui menjadi UU No. 2/2020 yang memberi wewenang sangat besar kepada pemerintah seolah tak bisa dikontrol, dipersoalkan, dan dituntut secara hukum. Pada Pasal 28 UU 2/2020 berbunyi: *“Pada saat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku maka Pasal 72 ayat (2) beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan kebijakan keuangan negara untuk penanganan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang ini.”*

Akhmad Muqowam, mantan Ketua Pansus RUU Desa, Selasa (23/6) menyatakan penyesalannya, “Ketentuan Pasal 28 angka 8 di UU Nomor 20 tahun 2020 ini sudah sangat jelas bahwa Dana Desa tidak akan ada lagi.” Ia menjelaskan Dana Desa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 72 ayat 2 UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa harus dijalankan sesuai ketentuan perundangan, yang memang UU tersebut menjadi tonggak bagi keberpihakan negara terhadap desa. Apalagi di dalam UU tersebut memuat asas rekognisi dan subsidiaritas, yaitu merupakan eksplorasi dari nilai-nilai budaya desa. Artinya desa mendapat pengakuan sebagai sebuah entitas yang harus diakui keberadaannya di Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan sekaligus diberikan kewenangan untuk mengurus sendiri kewenangan yang berskala desa.

Muqowam menegaskan, “Di situlah orkestrasi pembangunan nasional akan harmonis setelah adanya UU Desa, dalam arti



meletakkan desa sebagai subjek pembangunan. Bukan yang di masa lalu, desa hanya dijadikan sebagai objek pembangunan di Indonesia.” Karena itu, Muqowam mendesak Kemenkeu untuk menjelaskan kepada publik khususnya para aparatur desa dan masyarakat desa mengenai penghapusan Dana Desa agar masyarakat bisa menilai dan mengevaluasi keberpihakan Pemerintah terhadap desa dan masyarakat desa.

Dalam pemerintahan desa, ada tiga tipe kepemimpinan. Pertama tipe kepemimpinan regresif. Tidak ada orang lain dan apa yang diucapkan oleh kepala desa dianggap keputusan desa dan harus dipatuhi, bahasa lainnya sabda pandita ratu. Selain itu kepemimpinan ini sering kali menolak transparan, tak ada mekanisme pertanggungjawaban kepada publik. Kedua, tipe kepemimpinan konservatif-involutif yang memaknai pemerintahan cenderung normatif serta prosedural. Menjalankan pemerintahan sesuai prosedur yang ada, dalam hal akuntabilitas. Tipe kepemimpinan ini hanya membuat dokumen laporan pertanggungjawaban dan biasanya hanya mengikuti tata tertib yang sudah ada. Secara guyon tipe ini seperti slogan “*Mboten ngapusi, mboten korupsi, mboten nopo-nopo*” (Tidak menipu, tidak korupsi, tapi tak melakukan apa-apa.” Sedangkan ketiga, tipe kepemimpinan inovatif-progresif yang memaknai pemerintahan Desa sebagai proses menjalankan pemerintahan yang melibatkan partisipasi/prakarsa masyarakat, transparan serta mengedepankan akuntabilitas kinerja.

Kepala Desa kini menjadi lebih rumit. Di satu sisi ia bersama perangkat desa lainnya bersiasat bagaimana menjaga agar desanya tidak diterjang virus Covid-19 dan menangkai infodemik. Juga

menerima warga mereka yang kembali dari kota (ruralisasi) dengan menyediakan penghidupan. Di sisi lain, kepala desa dan perangkatnya, dibatasi geraknya oleh pemerintah melalui UU No.2/2020.

Mau tidak mau kepala desa harus bersiasat, kreatif, dan progresif di masa pandemi Covid-19. Pertama, dalam mengelola informasi dan menanggulangi infodemi, kepala desa dan perangkatnya harus memadukan gaya kepemimpinan yang selama ini masih berlaku di desa yaitu *guyub*, menghormati orang tua, menghormati tokoh masyarakat, ditambah dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi kekinian. Kepala desa dan perangkatnya harus mampu memanfaatkan media sosial dan cepat tanggap apabila ada indikasi infodemi di tengah warga desa. Kepala desa, Ketua RW, Ketua RT harus mempunyai grup WA di tingkat RT dan RW agar setiap muncul masalah segera bisa diselesaikan. Jika tak bisa dibahas melalui grup WA, segera berkumpul bertemu fisik baik di tingkat RT, RW maupun Desa.

Kedua, kepala desa dan perangkat desa lainnya, dalam menyasati keterbatasan anggaran dan keterbatasan lainnya, harus mampu mengerahkan semua potensi yang ada di desa. Misalnya mengajak anak-anak muda yang melek IT untuk mempromosikan hasil bumi maupun potensi lainnya dari desa. Kuncinya adalah inovasi dan adaptasi. Inovasi atau mati, adaptasi atau mati. Begitu salah satu kunci kemajuan.

Tak diragukan lagi, pandemi Covid-19 mengonfirmasi kepada kita semua bahwa desa-desa di Indonesia terbukti tangguh di tengah



keterbatasan. Desa mampu mengelola informasi dan mencegah infodemi. Desa mampu membantu kota dan negara menampung mereka yang terkena dampak ekonomi pandemi Covid-19 dan kembali ke desa (ruralisasi). Desa juga terbukti tetap berdaya meskipun kewenangannya digerogeti oleh UU No. 2/2020.

Namun, untuk mewujudkan seperti apa yang dicita-citakan penyanyi legendaris Iwan Fals yang saya kutip di awal tulisan ini, kepala desa yang memiliki tipe kepemimpinan inovatif-progresif harus mampu mengajak masyarakat berprakarsa dan berpartisipasi membangun desa sebagai kekuatan ekonomi. Dan untuk itu, contoh-contoh desa yang berhasil cukup banyak.

Yogyakarta, 25 Juni 2020

Profil Penulis

Tri Agus Susanto

Di Indonesia, tidak banyak orang yang membicarakan humor secara “serius”. Ia merupakan salah satu orang yang langka tersebut. Bahkan saking seriusnya pada humor, ia sampai menginisiasi forum diskusi bertema “Mengintip Demokrasi dari Lubang Humor” pada 1992. Saat itu pembicaranya menghadirkan Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Emha Ainun Nadjib (Cak Nun), Sjahrir, Emanuel Subangun, dan dimoderatori oleh Rocky Gerung. Berkat keseriusannya menekuni humor itulah, pada 2018 ia mendapat kesempatan mengikuti residensi penulis dari lembaga Robert Bosch Stiftung, Jerman.



Dalam program tersebut, selama sebulan Tri Agus Susanto, MA tinggal di Berlin, meneliti tentang perbandingan humor politik Jerman Timur di era sebelum unifikasi dengan humor politik Indonesia pada era Orde Baru. Baginya, humor politik menjadi jalan untuk membangun komunikasi yang baik ke masyarakat. Karena humor dapat menjadi jalan tengah untuk menyuarakan isu agar lebih sampai kepada yang dituju.

Lahir di Temanggung 13 Agustus 1963, Ia menyelesaikan pendidikan S1-nya di Universitas Negeri Jakarta (Fakultas Ilmu Politik), dan S2-nya di Universitas Indonesia (FISIP, Komunikasi Politik). Saat ini bekerja sebagai Staf Pengajar di program studi Ilmu Komunikasi STPMD “APMD” Yogyakarta.





Corona, Desa, dan Negara

Bagaimana Desa Menyelamatkan Indonesia di Era Pandemi Covid-19

Puthut EA

Berulang kali, desa-desa di Indonesia ikut ambil bagian sebagai pemecah masalah dari setiap krisis dan perlambatan ekonomi yang terjadi di negeri ini. Ironisnya, dalam proses pembangunan di negeri ini, sebetulnya yang sering terjadi justru desa terus-menerus diperas oleh negara. Daya dukung alamnya dirusak, orang-orang terbaiknya dicabut untuk ikut menggerakkan roda ekonomi kota

lewat proses sekolah. Hanya dalam waktu kurang lebih 25 tahun, jumlah penduduk desa di seluruh negeri ini telah menyusut sebanyak 10%, dari 54,1% (1995) menjadi 51,2% (2010), lalu 47,7% (2015), dan kini bersisa 44.3% (2020). Bahkan, BPS memperkirakan bahwa 15 tahun lagi, pada tahun 2035 nanti, hanya akan bersisa sepertiga (33,4%) saja rakyat Indonesia yang masih mukim di desa-desa. Singkatnya, penduduk perdesaan kita menjadi jauh lebih sedikit dibanding warga kerumun kota. Sehingga, ungkapan yang selama ini sering diulang-ulang bahwa sebagian besar (mayoritas) penduduk Indonesia hidup di perdesaan, jelas sudah tidak relevan lagi.

Bahkan orang desa terdidik dengan dukungan desa, yang kemudian tumbuh menjadi kelas menengah kota pun sering menjadi bagian penting dari proses sentralisasi lahan desa kepada orang atau kelompok masyarakat tertentu. Namun, ketika krisis dan perlambatan ekonomi terjadi, kota-kota terlihat rapuh untuk menyangga negara. Desa yang terperas sumber daya alam dan manusianya, kembali harus menopangnya. Cara negara memperlakukan kota sebaiknya harus disetel ulang, dicari gelombang yang pas dan berkeadilan. Tapi sebelum menyetel ulang, sebaiknya digeser dulu cara pandang dan paradigma negara dalam melihat apa itu desa dan betapa strategis posisi desa untuk negara agraris sekaligus maritim ini.

Sebetulnya, untuk melihat bagaimana ironisnya hubungan antara desa, kota, dan negara, bisa kita lihat lewat film-film perjuangan. Desa menjadi basis untuk melawan kekuatan kolonial. Perang gerilya sebagai salah satu strategi ampuh melawan musuh karena kalah dalam persenjataan, hanya bisa terjadi jika didukung oleh kekuatan desa. Secara ekonomi dan politik, para pejuang kita



dihidupi dan dilindungi oleh desa. Begitu tentara kolonial tahu, maka desa-desa diserbu. Para pejuang pergi ke hutan, berkelit dari kejaran musuh. Di saat seperti itulah, desa-desa dibuat porak-poranda oleh kelakuan tentara kolonial, bahkan banyak yang dibakar hingga menjadi abu.

Di era ketika Indonesia memasuki babak pembangunan, kira-kira beginilah yang sering terjadi. Anak-anak desa bersekolah dengan hasil perekonomian desa. Ketika mereka sudah terdidik, sebagian besar dari mereka bekerja di kota. Energi mereka diperas di sana. Ketika mereka menikah, bahkan saat akan membeli rumah, kadang menjual aset orang tua mereka di desa. Pada saat seperti inilah, terjadi proses konsentrasi kepemilikan lahan di desa oleh segelintir orang dan kelompok tertentu. Saat mereka kena masalah ekonomi, baik secara personal maupun karena pengaruh eksternal, kembali mereka membebani desa. Ada yang menitipkan anak-anak mereka ke desa terlebih dulu untuk dirawat orang tua mereka, ada yang istri dan suami yang balik ke desa dulu. Bahkan tak jarang semua pulang ke desa, menitipkan nasib mereka pada desa, jika keadaan pulih, mereka kembali ke kota. Saat mereka sudah menua, pensiun, renta diperas oleh kota, sebagian dari mereka kembali ke desa dalam situasi yang sudah tidak produktif lagi dan kembali menjadi beban desa.

Dari ilustrasi di atas, terlihat betapa timpang dan tidak adilnya relasi antara desa dengan kota. Itu masih belum apa-apa jika kita teruskan lagi. Jika di desa ada sumber mineral yang dipandang punya nilai ekonomis penting, maka ditambanglah hanya dengan perhitungan perekonomian sesaat, tanpa memedulikan keberlanjutan dan kelestariannya. Orang-orang desa yang berusaha

mempertahankan tanah dan perekonomian mereka yang sudah teruji kuat dan berkelanjutan, dipaksa menjual tanah mereka untuk ditambang. Para petani yang semula mandiri secara ekonomi, berubah menjadi tidak produktif karena hanya mengelola lahan yang makin sempit, dan bahkan banyak yang akhirnya menjadi pekerja tambang. Sekian puluh tahun kemudian, ketika mineral di sana habis diangkut, tersisa lubang menganga. Alam yang rusak. Yang tersisa di sana tinggal rasa putus asa. Orang-orang sudah kehilangan lahan dan kemandirian mereka. Alam pun sudah banyak.

Sialnya, negara tidak pernah melihat hal seperti ini sebagai sebuah persoalan ekonomi dan sosial yang besar. Bahkan negara kerap hadir sebagai promotor dan *beking* dari industri ekstraktif yang kerap memeras desa menjadi tak berdaya. Padahal desa itu sendiri, bermakna berdaya dan mandiri. Tapi mereka dilumpuhkan. Alamnya dirusak, sumber daya manusianya dicabuti. Jika memang Indonesia mendefinisikan negara ini sebagai negara agraris sekaligus maritim, maka jelas sokoguru perekonomiannya adalah desa. Sayangnya, justru perlakuan negara terhadap desa tidak pernah bisa dibilang adil.

Memang, semenjak pemerintahan SBY, lalu dilanjutkan pemerintahan Jokowi, ada dana yang dialirkan di desa. Tentu kebijakan itu patut kita apresiasi. Masalahnya adalah jika daya dukung alam sebagai salah satu modal desa yang penting telah dirusak, konsentrasi lahan ada pada segelintir orang dan kelompok tertentu terus terjadi, serta sumber daya manusia terbaiknya terus diangkut ke kota, maka gelontoran uang ke desa bisa tidak maksimal untuk menggerakkan perekonomian desa. Lagi pula, apa memang dana sejumlah itu cukup untuk membangun (memperbaiki kembali)



desa yang selama ini dirusak oleh sistem perekonomian pengeruk sumber daya dan merusak lingkungan kehidupan?

Pada tahun 1983, Prof. Sarbini Somawinata (alm)—salah seorang ‘Begawan Ekonomi Indonesia’ selain Prof. Soemitro Djojohadikusumo (alm), meskipun mereka berdua sangat sering tidak sependapat dan mengambil posisi berlawanan—pernah menyatakan bahwa dibutuhkan dana paling sedikit Rp 1 miliar untuk membangun satu desa secara memadai dan menyeluruh. Itu dinyatakan pada masa di mana nilai tukar rupiah masih di bawah Rp 1.000 (tepatnya Rp 626) per AS\$ 1. Sekarang nilai tukar rupiah mencapai Rp 14.400 per AS\$ 1. Artinya, naik 23 kali lipat. Maka, bertolak dari hitungan Prof. Sarbini, mestinya setiap desa sekarang mendapat alokasi dana desa paling sedikit Rp 23 miliar! Jika kerusakan sumber daya dan lingkungan kehidupan di pedesaan, juga termasuk dihitung biaya kerusakan dan pemulihannya (*externality costs*), maka jumlah itu harus ditambahkan lagi sebanyak 6-8 kali lipat menjadi Rp 138 -184 miliar! Dalam kenyataannya, setiap desa kini hanya menerima dana rerata pada kisaran Rp 1 – 2 miliar saja.

Ketika Pandemi Terjadi

Berbeda dengan krisis dan perlambatan ekonomi yang pernah terjadi di negeri ini, krisis kali ini diawali dengan krisis kesehatan yang membawa implikasi pada krisis ekonomi. Sehingga yang terjadi di desa kemudian juga dua hal besar: menjadi penyangga perekonomian sebagaimana yang sudah pernah terjadi, sekaligus penghadang penyebaran pandemi.

Sistem informasi soal pandemi dan berbagai kebijakan menyikapi ini, memang sempit simpang siur. Dalam hal ini memang bisa dipahami. Karena pandemi ini bersifat mendadak, dan sebelumnya tidak pernah terjadi. Wajar jika hampir semua negara di seluruh dunia gagap dalam merespons dan menghadapinya. Tapi warga desa, mesti berkuat dengan hal nyata.

Banyak dari keluarga mereka yang akhirnya pulang kampung karena tidak lagi memiliki pekerjaan di kota. Begitu mereka pulang, itu artinya ada dua. Pertama, beban desa makin bertambah. Kedua, desa menjadi teritorial persebaran Covid-19. Untuk soal pertama, itu lumrah terjadi, walaupun jelas bedanya. Karena daya dukung desa untuk menerima 'beban buangan' dari desa sudah tidak sehebat dulu. Proses pemiskinan desa, industri ekstraktif yang merusak ekosistem dan perekonomian desa, juga sentralisasi kepemilikan lahan, tentu menjadi sebab kenapa desa tidak seberdaya dulu. Dan jika pemerintah tidak berhati-hati, makin lama desa makin tidak berdaya. Kedua, respons desa untuk melindungi warganya dari intaian dan persebaran Covid-19. Reaksi desa di Yogyakarta dan beberapa daerah lain kemudian mirip, semacam *lockdown* ala kampung. Jika istilah ini tidak dipahami dengan baik, tentu bisa berbahaya karena bisa terjadi proses 'menyalahkan korban'.

Desa merespons dengan cara seperti itu karena dua hal. Pertama, informasi saat itu masih simpang-siur. Kedua, secara faktual, mereka menyaksikan ada banyak orang yang memasuki kampung mereka. Sehingga mereka harus responsif. Pada prakteknya pun, istilah *lockdown* yang dipakai di spanduk-spanduk desa tidak sama dengan makna dalam protokol kesehatan versi 'resmi' pemerintah. Warga



desa hanya menutup akses jalanan kampung menjadi lebih sedikit, agar mudah menjaga dan mengawasi setiap orang yang keluar dan masuk.

Anehnya, respons seperti itu dinilai negatif. Padahal bukan hanya itu yang dilakukan oleh desa. Mereka menyediakan rumah-rumah karantina buat keluarga mereka yang balik ke desa. Mereka juga menyuplai bahan makanan bagi sesama. Masih bisa dicek di berbagai tautan berita, warga desa berbagi sayuran dan bahan makanan lain bagi korban terdampak Covid-19.

Di beberapa desa di Gunungkidul, Yogyakarta, bahkan melakukan gerakan yang luar biasa. Mereka mengorganisir sumber daya desa untuk disuplai ke Jakarta, ke warga mereka yang sedang bekerja di Jakarta. Orang-orang yang kehilangan pekerjaan di Jakarta diminta jangan pulang dulu, dan diberi bantuan dari desa, sembari mereka mempersiapkan rumah karantina. Ketika orang-orang yang bekerja di kota sudah tidak punya daya tahan lagi untuk meneruskan hidup di kota, dan mereka memutuskan balik, rumah karantina sudah selesai, sistem sosial serta daya dukung warga sudah pun sudah siap.

Tentu kita semua bisa angkat topi kepada, sekali lagi, bagaimana desa-desa di Indonesia menjadi bempes kuat dalam menahan laju krisis sekaligus penyakit. Tapi dengan kejadian yang berulang seperti itu, tentu saja dengan tensi dan derajat yang berbeda, tidakkah kita perlu memikirkan ulang bagaimana relasi desa-kota menjadi lebih sehat lagi. Plus, bagaimana kebijakan negara lebih adil lagi dalam melihat dan memposisikan desa?

Desa dan Strategi Tolak Bala'

Bagi warga desa, istilah pandemi mungkin terdengar asing. Tapi mereka terbiasa dengan ragam istilah yang menyerupai itu seperti misal pagebluk dan bala' alias bencana. Di Indonesia, juga negara lain, pandemi Covid-19 memiliki implikasi pada terjadinya krisis ekonomi alias paceklik. Tapi di desa-desa, sebetulnya istilah paceklik pangan, yang biasanya ditandai dengan berbagai peristiwa gagal panen, tidak terjadi.

Di beberapa desa di Yogyakarta, begitu terjadi indikasi krisis pangan, petani yang semula mesti mengistirahatkan dulu tanah mereka se usai panen padi, banyak yang memutuskan untuk memperpendek fase istirahat tanah, langsung berproduksi lagi. Di bulan Juni sampai November nanti, ada beberapa komoditas pertanian strategis yang menjadi andalan petani untuk meraup banyak uang, sedang dalam masa panen yang bagus. Tiga di antaranya: kopi, cengkeh, dan tembakau.

Tapi tentu saja, imbas dari krisis ekonomi, hasil panen tersebut terancam tidak terserap oleh pasar, atau setidaknya tidak mendapatkan harga yang nisbi bagus. Harga cengkeh yang biasanya tembus 80 ribu rupiah per kilogram, sampai saat tulisan ini dibuat rata-rata belum bergerak dari kisaran 60 ribu per kg. Harga kopi kering yang masih ada kulitnya, ada di bawah harga normal yang biasanya berkisar 18 ribu sampai 22 ribu rupiah. Sepertinya harga komoditas tembakau pun bakal bernasib sama, karena industri hasil tembakau (IHT) mengalami guncangan juga, selain cukai diketok sangat mahal pada akhir tahun lalu, *demand shock* juga terjadi karena



banyak orang mulai tak punya uang. Laut Indonesia masih terus menghasilkan komoditas ikan yang bagus. Tapi lagi-lagi, karena permintaan turun, harga ikan pun tidak bagus.

Sebetulnya, hal yang harus disadari bersama adalah ketika desa-desa di Indonesia sedang panen komoditas pertanian yang bagus seperti cengkeh, tembakau, kopi, kakao, vanila, dll, termasuk ikan dan komoditas laut yang lain, itu artinya adalah ada uang yang masuk cukup banyak ke desa. Uang itulah yang sesungguhnya menggerakkan roda perekonomian desa. Memang dana desa penting, tapi bukan yang utama dalam menggerakkan roda perekonomian desa. Karena sudah sejak dulu, desa punya kekuatan dan kemandiriannya sendiri. Sebagai perbandingan saja, jika rerata dana desa setiap tahun adalah satu miliar rupiah, sesungguhnya itu hanya setara dengan pendapatan satu keluarga di sebuah desa di lereng Gunung Sumbing saat panen tembakau. Atau hanya setara dengan pendapatan satu keluarga petani cengkeh di Munduk, Bali Utara, saat harga cengkeh bagus. Atau kalau mau jauh lagi, hanya setara dengan pendapatan dua keluarga di daerah Gura Bunga, Tidore, saat panen cengkeh. Jika komoditas pertanian itu kita hitung dari pola perputaran uangnya, lebih dahsyat lagi, karena jejaring ekonomi dan budaya di desa itu terjaga dan sentosa.

Petani dan nelayan sebagai aktor utama yang ada di desa, menjalankan sistem kemandirian dan keberdayaan mereka, dan tidak mudah diguncang oleh pengaruh dari luar. Mereka punya sistem perekonomian yang sudah mereka jalani dan hitung sendiri. Menurut saya, petani dan nelayan adalah wirausahawan. Sebab mereka memproduksi sesuatu, punya risiko dalam pekerjaan mereka,

termasuk bisa rugi. Budaya olah tanah, mensyaratkan banyak hal seperti sistem pengetahuan, kerja sama kolektif, manajemen tanam, bahkan sampai punya konsekuensi pada suplai pangan. Itu artinya, benarlah bahwa istilah bertani itu yang tepat adalah budi daya pertanian. Karena di sana tersimpan makna yang luas, tautan yang erat antara ‘budi’ alias olah pikir, dan ‘daya’ alias kemampuan rekayasa dan responsif, sehingga semua itu menjelma menjadi kebudayaan.

Gotong royong misalnya, bagi orang kota atau elite politik, mungkin slogan saja. Atau ada kata tapi tak punya korelasi dalam perilaku mereka. Bagi orang desa, tidak perlu kata gotong royong itu digembar-gemborkan, karena hal itu merupakan praktek nyata kehidupan sehari-hari. *Guyub*, kebersamaan, ikatan komunalitas yang masih tinggi, menjadi modal sosial yang sangat besar di desa. Bahkan, mereka, orang-orang desa, mau merawat luka dan penderitaan orang-orang kota.

Desa sudah membuktikan berkali-kali, termasuk dalam mengatasi pandemi Covid-19 ini, menjadi faktor penting dan strategis. Sayangnya, semua itu tidak membuat kita semua lebih perhatian terhadap desa. Jika Anda menonton televisi dan liputan media lain soal Covid-19, terasa betul bahwa media pun mengalami bias kota sentris. Benar bahwa kota adalah mula pandemi, dan benar bahwa di kotalah korban paling banyak. Tapi mereka luput melihat bagaimana desa menjadi faktor dominan dalam mengatasi pandemi ini. Coba bayangkan kalau desa-desa tidak melakukan *lockdown* kampung, bayangkan jika mereka tidak mau menerima kembali orang-orang yang tidak punya pekerjaan lagi di kota, sangat sulit



membayangkan bagaimana suplai makanan untuk orang-orang kota jika desa berhenti memproduksi.

Ke depan, jika pandemi ini akan berlangsung begitu panjang, maka masa depan bangsa ini jelas ada di desa. Kalau tidak secepatnya cara pandang kita dan kebijakan pemerintah tentang desa dibereskan, maka pandemi ini akan berakibat lebih parah dalam jangka waktu yang lama.

Berdaya, Mandiri, dan Lestari

Industri dan skema kerja manusia modern yang ada di kota, membawa dan mempercepat proses manusia kehilangan sebagian kendali atas diri mereka sendiri. Mari kita bayangkan hal ini. Jika sebuah kota tiba-tiba digedor oleh gempa, rumah-rumah ambrol, sistem informasi macet, infrastruktur ambruk, transportasi tak bisa bergerak, listrik padam dan tak mungkin segera dipulihkan dalam sekian minggu ke depan, apa kira-kira yang terjadi? Sebagai negara yang bertahta di atas singgasana cincin api, tentu itu bukan hal yang musykil terjadi.

Kekacauan. Rasanya itu pasti. Tapi hal yang seperti di atas dalam dua dekade ini pernah berkali-kali terjadi. Tsunami menghantam Aceh. Yogyakarta kena *lindu*. Palu dihantam gempa. Saya, sekali lagi secara kebetulan merekam beberapa kiat dan siasat warga *gampong* di Aceh dalam bertahan hidup. Saya bahkan menjadi relawan selama hampir setahun saat Yogyakarta diguncang *lindu*. Adat, kedekatan dengan alam, daya dukung lingkungan (dalam hal ini tentu saja pangan), sangat berperan penting dalam situasi yang sangat darurat. Belum lagi, kolektivitas dan sikap komunalisme yang masih kuat,

menjadi tumpuan baik secara sosial maupun secara psikologis untuk bisa bertahan ketika kampung didera krisis yang bersifat keras dan mendadak. Dari sana, daya hidup kembali menjalur. Semua menjadi nisbi mudah untuk diperbaiki. Kehidupan dilanjutkan.

Dalam situasi yang sangat ekstrem, di luar segala rencana, niscaya desa lebih bisa bertahan dan berdaya dibanding kota jika terjadi bencana.

Menjadi kota, seolah mantra penting dalam proses pembangunan sekarang ini. Dan keputusan itu, sialnya, diputuskan oleh para elite politik dan pengambil kebijakan yang tinggal di kota. Bias kota sentris sangat tampak sekali. Cara pandang kota sentris ini misalnya, bisa dengan mudah kita dapatkan, saat gunung dikeruk untuk tambang mineral. Bagi 'orang kota' itu hanya gunung. Gundukan tanah belaka. Tapi bagi orang desa, itu sumber hidup yang bisa membuat mereka berdaya, mandiri, dan lestari. Di sana ada ekosistem. Di sana ada tautan diri-sebagai-manusia dengan alam-yang-menghidupi. Ikatan manusia atas tanah dan air, bukan semata kalkulasi ekonomi. Kalau begitu cara menghitungnya, maka semua hal di dunia ini, baik gunung, hutan, dan laut, akan kehilangan pesonanya. Semua hanya tampak uang semata. Begitu semua itu diuangkan, kita akan kehilangan banyak hal yang lebih besar.

Saya jujur saja tidak mengerti, kenapa variabel berdaya, mandiri, dan terlebih lestari, tidak pernah menjadi pertimbangan penting dalam proses pembangunan di era kiwari ini. Tentu sekali lagi, saya tidak sedang meromantisir desa, dan menatap desa dengan rasa melankolis. Saya tahu persis, desa sebagaimana peradaban manusia,



pasti mengalami dinamika. Saya juga tidak ingin menatap kota dengan rasa yang pesimistis. Tapi kota, jika disimak betul tulisan ini, selalu merujuk pada kuasa dan bagaimana kebijakan diputus dan diedarkan di seluruh negeri.

Saya bahkan tidak menolak, dan harus mengakui bahwa perkembangan teknologi informasi, begitu berguna bagi desa. Banyak desa bisa langsung menjual produk khas mereka langsung ke konsumen, tanpa rantai perdagangan yang panjang, yang acap kali merugikan para petani. Dengan internet dan sistem komunikasi, misalnya, para petani bisa langsung mengakses harga dan komoditas apa yang sedang dibutuhkan. Dengan sistem informasi, plus infrastruktur standar seperti jalan yang mulus dan jembatan yang kokoh, membuat pergerakan komoditas dari desa ke kota lebih masuk akal dan ekonomis.

Namun, makin maraknya industri ekstraktif yang mengubah hutan menjadi tambang, gunung-gunung dihancurkan, laut dicemari, pulau-pulau kecil dikeruk dan dikotori, mau tidak mau rasanya wajib bagi kita semua untuk memandang lebih cemas dan kritis lagi tentang apa yang sedang berlangsung di desa-desa di seluruh Indonesia.

Menjelang Penutup

Semua virolog di seluruh dunia sepakat bahwa Covid-19 terjadi karena ketidakseimbangan alam. Kita dengan mudah akan tahu, kenapa alam menjadi tidak seimbang. Sayang, dalam semua skenario mengatasi pandemi ini, kita hanya sibuk pada dua hal: pertama,

bagaimana menemukan vaksin dan obat Covid-19, dan bagaimana roda perekonomian berputar lagi.

Tentu dua hal itu tidak keliru. Pertanyaan pentingnya adalah bagaimana kita menjawab akar persoalan kenapa Covid-19 muncul di muka bumi ini? Bukankah itu hal yang sangat penting? Jika hal itu tidak diatasi, taruhlah kelak vaksin ditemukan, namun akar persoalan tidak diselesaikan, ketidakseimbangan ekologi terus terjadi, bukan tidak mungkin virus-virus yang lebih ganas dan mematikan akan bermunculan kembali?

Dari sini kemudian kita bisa mafhum, cara pandang dan model pendekatan kota sentris kepada desa, tampaknya menjalar dari cara kita memandang dunia. Karena kita makhluk yang berpikir, maka tugas kita adalah menaklukkan dunia. Menaklukkan dalam hal ini, adalah merusaknya. Jika akar persoalan ini tidak dijawab, maka yang disebut menggerakkan roda ekonomi itu berarti mari kita keruk dan rusak lagi alam, tanpa memperhatikan kelestarian, tanpa mempertimbangkan orang-orang yang hidup di sana, dan tak perlu mengindahkan anak cucu kita.

Kita dengan alam hanya diikat oleh satu-satunya hukum yakni hukum ekonomi, itu pun ekonomi uang sesaat. Pragmatisme ekonomi. Sistem ekonomi yang sudah pasti tidak berkelanjutan, bersifat destruktif, dan yang menjadi incaran tentu saja sebagian besar ada di wilayah desa. Di sana tersimpan minyak, gas, batubara, dan berbagai mineral.

Kita tidak sedang memikirkan sistem ekonomi yang lebih punya daya hidup, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Imajinasi



kita tumpul hanya karena tidak sanggup membayangkan jika desa-desa di seluruh negeri ini berdaya, mandiri, dan lestari, maka negara ini akan kokoh, kuat, dan tahan akan guncangan. Dengan begitu, industri yang mestinya kita bangun adalah industri yang bertumpu pada komoditas pertanian dan hasil laut. Industri yang lebih memungkinkan lebih banyak orang untuk merasa bahagia.

Dengan begitu, kita bisa mendekati desa dengan cara yang lebih arif lagi. Mantra produksi yang cepat dan massal, sudah selayaknya kita renungkan, apakah itu kompatibel dengan hukum kelestarian dan keberlanjutan. Sebab kalau cara lama terus kita pertahankan, maka dalam sekian puluh tahun ke depan, yang tersisa adalah lubang-lubang menganga di area bekas tambang, para petani yang kehilangan daya hidupnya, alam yang lelah diperas sampai tak ada lagi yang tersisa.

Ke depan, siapa yang bisa menguasai pangan, akan menguasai perekonomian. Itu bukan saya yang mengatakan. Juga bukan para romantis pencinta lingkungan. Kalimat itu diucapkan oleh Jack Ma, salah satu orang yang namanya mulai disejajarkan dengan Bill Gates, Mark Zuckerberg, dan Larry Page. Dan bukan tidak mungkin kita akan mengalami kesulitan pangan.

Tanda-tandanya sudah terlihat jelas sejak beberapa tahun terakhir pada tiga indikator pokok dan penting: semakin sempitnya lahan-lahan pertanian pangan produktif di perdesaan, terus menurunnya tingkat produktivitas per satuan luas lahan tersebut, dan kian meningkatnya jumlah dan jenis impor bahan pangan (termasuk bahan pangan pokok seperti beras).

Data resmi dari BPS memperlihatkan, selama lima tahun terakhir (2014-2019) terjadi pengurangan lahan pertanian di pedesaan sebesar 7.7% atau sekitar 600.000 hektare. Ini termasuk penyempitan atau perubahan tata guna (fungsi) lahan pertanian pangan di beberapa daerah penghasil utama padi atau beras. Di Jawa Barat, misalnya, pada akhir 2013, luas lahan sawah padi di sana masih 925.000 hektare. Akhir 2018, sudah menyusut menjadi 911.800 hektare atau berkurang sekitar 13.225 hektare (1,43%). Di Jawa Timur, provinsi penghasil beras terbesar secara nasional, tingkat produktivitas lahan padi sawahnya bergerak turun sampai 3,68% (dari 59,8 kuintal per hektare pada tahun 2013, menjadi hanya 57,6 kuintal per hektare pada tahun 2018). Di daerah yang mengalami kenaikan tingkat produktivitas, kenaikannya juga tidak terlalu besar, rerata di bawah 1,0%. Misalnya, Jawa Barat, mencatat tingkat produktivitas 58,8 kuintal per hektare pada tahun 2013, menjadi hanya 58,9 kuintal per hektare pada tahun 2018. Dengan kata lain, kenaikannya hanya 0,2%.

Dan, semua itu kian diperparah oleh impor bahan pangan pokok yang terus berlangsung. Sampai akhir 2019 dan awal 2020 (semester I), impor beras kita masih lebih dari 444,5 ribu ton dengan nilai AS\$ 184,2 juta (Rp 2,5 triliun)! Itu baru beras saja. Impor aneka sayuran masih 770,3 ribu ton dengan nilai AS\$ 770,1 juta (Rp 10,7 triliun). Impor daging mencapai 262,3 ribu ton dengan nilai AS\$ 829,8 juta (Rp 11,6 triliun). Impor gula lebih mencengangkan lagi, mencapai 4,09 juta ton dengan nilai AS\$ 1,3 miliar (Rp 19,1 triliun). Bahkan, garam pun masih impor, mencapai 2,5 juta ton dengan nilai AS\$ 95,5 juta (Rp 1,3 triliun). Untuk beberapa jenis bahan pangan



pokok ini saja (belum termasuk impor beberapa bahan pangan lain seperti gandum, kedelai, bawang merah dan putih, cabe, bahkan singkong), jumlahnya sudah sangat fantastis: 8,06 juta ton dengan nilai total AS\$ 3,1 miliar (Rp 44,5 triliun)!

Namun, yang paling penting, sebelum itu semua terjadi, kita sebenarnya sudah terlebih dulu kehilangan rasa hormat atas air, laut, gunung, hutan, dan pepohonan.

Seorang jurnalis penggerutu, sekaligus seorang petualang, mencoba mencari tempat-tempat yang membahagiakan di muka bumi ini. Tentu kita dengan mudah tahu, orang itu bernama Eric Weiner, yang kemudian membukukan pencarian gilanya itu dengan judul: *The Geography of Bliss* (2009). Dia mencoba menolak parameter ekonomi *Gross National Income*, dan menggantikannya dengan konsep *Gross National Happiness*. Ada satu ungkapannya yang kemudian menyentak dunia, “Ketika pohon terakhir ditebang, ketika sungai terakhir dikosongkan, ketika ikan terakhir ditangkap, barulah manusia akan menyadari bahwa dia tidak dapat memakan uang.”

Yogya, 6 Juni 2020

Profil Penulis

Puthut EA

Ia menulis sejak SMP, yakni menulis Geguritan untuk majalah *Panjebar Semangat* dan *Jayabaya*. Selepas SMA, ia hijrah ke Yogyakarta untuk kuliah di Fakultas Filsafat, Universitas Gadjah Mada. Sejak itu ia akrab dengan dunia menulis dan meneliti berbagai

masalah sosial di Indonesia. Selain itu, dia juga mengajar menulis di berbagai komunitas literasi, dari Aceh sampai Papua. Serta membantu beberapa lembaga untuk menyusun kurikulum pelatihan, juga membuat berbagai bahan dan media belajar.

Karya tulisnya saat ini lebih 26 karya. Di antaranya, tiga buah novel, delapan buku kumpulan cerpen, dan dua buku naskah drama. Lalu ada dua buku kumpulan esai, dua buku biografi, dan sebuah buku prosa lirik. Saat era reformasi 1998, ia aktif di Komite Perjuangan Rakyat untuk Perubahan (KPRP). Lalu menerbitkan buletin “Bongkar”, untuk memberi informasi politik secara lugas, gampang, dan mudah dibaca. Baginya, salah satu prinsip yang ia pegang adalah menyediakan ruang sebesar-besarnya untuk kerja-kerja kemanusiaan sebagai sukarelawan. Terutama untuk komunitas kecil dan kelompok masyarakat yang terpinggirkan secara ekonomi, politik, sosial dan budaya. Kiprahnya saat ini tercatat sebagai sebagai pendiri media daring *Mojok.co*, lembaga KBEA, inisiator Komunitas Kretek, dan masih banyak lagi. Ia juga dikenal sebagai seorang sastrawan.





Jurus Jitu Reposisi dan *Rebranding* Desa

FX Rudy Gunawan

Di tengah pandemi Covid-19, desa ibarat naskah kuno dari lembar-lembar daun lontar yang teronggok berdebu di pojok sebuah museum kebudayaan yang selalu sepi pengunjung. Hanya segelintir orang tertarik membacanya. Padahal di dalam naskah kuno itu jurus-jurus jitu untuk *survive* di tengah pandemi dan kemudian membangun fondasi baru tatanan kehidupan pascapandemi mungkin bisa kita temukan.

Faktanya, selama 10 tahun terakhir, desa baru menjadi pembicaraan yang cukup seru saat lahirnya Undang-undang Desa tahun 2014 sampai Presiden Joko Widodo mulai menggelontorkan dana desa ke seluruh desa di Indonesia sejak tahun 2015. Namun semua pembicaraan seru itu sebenarnya bukanlah pembicaraan tentang desa *itself*, melainkan pembicaraan pemerintah pusat mengenai persoalan desa.

Desa sendiri nyaris tidak dibicarakan sebagai sebuah entitas dengan kekayaan sosial, ekonomi, politik, dan kultural luar biasa yang melalui UU Desa dijamin hak-hak dan kewenangannya. Pembicaraan tentang desa memang tidak memicu polemik seperti polemik antara budayawan Goenawan Mohamad dan sastrawan AS Laksana baru-baru ini yang sukses memicu reaksi para intelektual, budayawan dan pemikir sains, agama dan filsafat dalam konteks serangan pandemi Covid-19. Serangan yang telah memorakporandakan tatanan kehidupan masyarakat dunia saat ini.

Lantas mengapa pembicaraan tentang desa tidak bisa menjadi polemik yang seru? Desa hanya bisa menjadi polemik seru jika sebagai naskah kuno yang teronggok di museum kebudayaan berhasil ditarik keluar dari kotak kaca yang memenjarakannya. Lalu naskah itu harus dibersihkan dari rayap dan dibaca ulang dengan nyaring dan lantang karena di dalamnya ada banyak jawaban bagi persoalan hidup manusia (modern). Kedua, desa baru akan menjadi pembicaraan seru jika ada ruang luas untuk mewedahi pembicaraan itu. Dari sinilah lahir gagasan Kongres Kebudayaan Desa untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia dan untuk pertama kalinya



juga sebagai sebuah kongres virtual (1—16 Juli 2020) di sebuah desa di kawasan Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kongres Kebudayaan Desa (KKD) digagas oleh Lurah Desa Panggungharjo Wahyudi Anggoro Hadi bersama anak-anak muda desanya yang tergabung dalam sebuah lembaga bernama Sanggar Inovasi Desa (SID). Temanya adalah Membaca Desa Mengeja Ulang I-N-D-O-N-E-S-I-A. Tema ini ingin menguatkan Indonesia dimulai dari desa dengan premis “masa depan Indonesia ada di desa”. Ini sesuai dengan makna kata ‘desa’ dalam bahasa Jawa kuno: tempat hidup yang layak, sejahtera, dan patut. Dalam pengertian ini juga tersirat makna desa sebagai kawasan yang merdeka dan berdaulat.

‘Membaca (Lagi) Desa’

Pembicaraan tentang desa sebenarnya tidak kalah penting dibanding pembicaraan tentang sains, agama, dan filsafat karena di dalam kehidupan desa ketiga hal besar itu sudah mewujudkan sebagai praksis keseharian rakyat desa yang diwariskan nenek moyang mereka. Contoh, ketika radikalisme tiba-tiba disukai dan menjadi tren di sejumlah masyarakat kota, orang desa tidak terpengaruh dan tetap hidup nyaman dalam perbedaan. Ini berkat praksis *tepa selira* atau toleransi yang sudah mengakar dalam kehidupan desa.

Tatanan kehidupan masyarakat desa yang sederhana merupakan hasil pergulatan para nenek moyang dalam menggeluti pengalaman kosmologis, epistemologis, dan ontologis sekaligus. Hanya saja mereka tidak mewacanakannya menjadi aliran pemikiran atau ideologi tertentu. Dengan demikian, filsafat desa adalah filsafat yang

tidak terpenjara dalam alam pemikiran. Filsafat desa adalah filsafat yang mewujud dalam budi pekerti, perilaku, dan tindakan.

Iniilah kekuatan desa yang bahkan tak disadari oleh orang-orang desa sendiri. Dalam situasi pandemi, kekuatan ini bisa menjadi modal sosial-budaya-ekonomi sekaligus menjadi jawaban saat kita berupaya menata ulang fondasi masyarakat *new normal* sebagaimana diinginkan KKD.

KKD bertujuan memberikan gambaran sektor-sektor pembangunan desa di era pandemi dan imaji sebuah tatanan baru pemerintahan dan masyarakat desa. Penggambaran itu meliputi analisis, dekonstruksi, dan rekonstruksi sektor pembangunan desa, arah kebijakan, dan strategi pencapaian beserta programnya sehingga mampu memberikan pedoman pencapaian tatanan hidup baru. Untuk itu KKD melibatkan pemangku desa (pemerintah desa, lembaga, komunitas, dan warga), pemikir, akademisi, birokrat, pelaku bisnis, dan media.

Upaya KKD membaca (lagi) desa dalam konteks ini, menurut saya, memerlukan sekurang-nya dua hal. Pertama, menempatkan kembali (reposisi) desa sebagai sumber nilai praksis kehidupan yang mungkin bisa *matching* dengan konteks era teknologi informasi saat posisi dan kedudukan manusia tidak lagi paling superior (terancam antara lain oleh *artificial intelegent*). Kedua, merumuskan strategi komunikasi dalam rangka *branding* ulang (*rebranding*) 'desa sebagai alternatif jawaban' atas rontoknya tatanan masyarakat yang ditopang baik oleh kekuatan kapitalisme, sosialisme, ataupun fundamentalisme.



Tema arah tatanan baru Indonesia *New Normal* membawa kita pada pertanyaan mendasar: apa itu Normalitas? Apakah pada masa sebelum pandemi segala sesuatu yang dianggap normal itu benar? Apakah jika yang disebut normal itu memarginalkan desa dan menenggelamkan kekayaan dan potensi desa kita masih harus menganggapnya normal? Apakah yang disebut normal itu kita anggap baik-baik saja jika membiarkan alam dieksploitasi habis-habisan dan keseimbangan hubungan antara manusia dan alam kemudian berantakan?

Dalam konteks ini, jika asumsi kita desa memiliki potensi besar untuk berperan dalam membangun tatanan baru, apa yang harus kita lakukan? Kita berhadapan dengan kondisi desa yang sudah berpuluh tahun tergerus arus kapitalisme, modernisasi, dan globalisasi sehingga kekuatan desa pun memudar terus-menerus. Pertanyaannya kemudian adalah dalam kondisi seperti itu, langkah dan strategi apa yang harus dilakukan untuk merevitalisasi kekuatan desa sehingga bisa menjadi solusi, baik dalam menjalani kehidupan di masa pandemi maupun untuk berperan penting dalam proses membangun tatanan baru Indonesia pascapandemi?

Mengeja I-N-D-O-N-E-S-I-A Era *New Normal*

Indonesia di era *new normal* ibarat sesosok wajah tersaput kabut di pinggiran danau Toba yang tertutup keindahannya. Wajah itu baru akan terlihat jelas saat kabut hilang namun akan kembali kabur saat kabut datang lagi esok hari. Tentu hal ini tidak boleh dibiarkan. Indonesia harus berjuang menjadi sosok yang jelas di era *new normal*, bahkan jika tersaput kabut. Sama halnya dengan situasi pandemi,

setiap manusia harus berjuang untuk tetap hidup di tengah dunia yang tersaput virus tak kasatmata.

Maka strategi kebudayaan Indonesia *new normal* perlu dirumuskan untuk menata peradaban baru. Pandemi mengharuskan manusia dengan segala daya, akal budi, dan kreativitas untuk melakukan perlawanan dan terus berjuang. Dan perjuangan itu bisa jadi memang harus dimulai dari desa sebagai ruang pertahanan yang cukup kuat dan strategis karena dalam konteks mengeja I-n-d-o-n-e-s-i-a, desa merupakan entitas negara yang paling dekat dengan warganya. Pemerintahan desa adalah ujung tombak negara yang paling dekat dengan rakyatnya.

Namun rentang kekuasaan antara pusat dan desa, bahkan setelah lahir UU Desa, masih relatif berjarak jauh. Dalam *chat* saya dengan seorang politisi anggota legislatif pada suatu malam yang *sumuk*, kami sampai pada sebuah kesimpulan bahwa di tengah pandemi, politik di pusat kekuasaan berjalan sendiri dengan *nature*-nya, nyaris tanpa kepekaan pada situasi rontoknya tatanan kehidupan karena Covid-19. Ini jelas memprihatinkan. Kekuatan-kekuatan politik tetap bergerak untuk kepentingan kelompok masing-masing. Entah itu menyusun barisan untuk merebut kekuasaan pada 2024 atau sekadar menyelamatkan diri dari serangan lawan politik dalam kasus-kasus aktual yang tengah bergulir.

Situasi ini adalah bagian yang harus dieja ulang. Situasi ini juga yang mungkin membuat negara kita mendapat banyak catatan kritis yang intinya dianggap kurang baik dalam penanganan pandemi Covid-19. Namun untuk mengeja ulang Indonesia, pertama-tama



tentunya kita harus memahami peran setiap huruf yang membentuk kata I-n-d-o-n-e-s-i-a. Kebetulan ada satu huruf D yang bisa kita maknai sebagai simbol keberadaan dan eksistensi Desa dalam struktur pemerintahan negara Indonesia. Jika seluruh *stake holder* bangsa sepakat dengan pemaknaan ini, maka implikasinya Desa harus menjadi unsur penting dalam tatanan Indonesia era *new normal*.

Pada titik ini kita membutuhkan sebuah strategi komunikasi yang jitu sebagai upaya melakukan reposisi dan *rebranding* desa di mana D adalah unsur penting dalam mengeja Indonesia. Strategi komunikasi yang pernah saya lakukan adalah membuat sebuah media khusus tentang desa, yaitu Koran Desa pada tahun 2014 sampai 2015 bersama lurah Panggunharjo. Gagasan membuat Koran Desa didasari oleh konsep strategi komunikasi yang terdiri dari 3 poin, yaitu:

1. Menciptakan sebuah ruang informasi berbagai peristiwa yang terjadi di masyarakat desa, baik dalam hubungan antar kelompok masyarakat maupun antara masyarakat dengan pemerintah.
2. Menjadi tempat bertukar gagasan dan aspirasi berbagai kelompok masyarakat desa sebagai bagian dari proses belajar antardesa sekaligus mendorong partisipasi warga desa dalam kehidupan sosial-politik-ekonomi dan budaya masyarakat.
3. Mem-*branding* desa melalui sebuah media profesional khusus tentang desa sebagai upaya merebut ruang publik di tingkat

nasional yang selama ini nyaris tidak memberikan perhatian pada isu desa.

Itulah tiga poin strategi komunikasi yang pernah saya lakukan melalui koran desa yang saat itu masih berupa media cetak dan dilengkapi dengan web yang karena kekurangan sumber dana dan sumber daya manusia akhirnya setelah berjalan selama sekitar 6 bulan terpaksa harus berakhir. Kini saya mencoba kembali dengan mendirikan media daring *katadesa.id* bersama kawan-kawan jurnalis yang memiliki kepedulian pada persoalan dan isu desa.

Sebagai penutup, menurut hemat saya, agenda penting KKD adalah melahirkan dan mendorong kesepakatan dan komitmen bersama dari seluruh *stake holder* bangsa tentang posisi strategis desa dalam membangun tatanan baru Indonesia yang *clear and distinct* di segala kondisi. Langkah awalnya adalah melakukan upaya bersama untuk mereposisi dan *rebranding* desa melalui sebuah strategi komunikasi yang efisien dan efektif. Faktanya desa ada sebelum Indonesia lahir dan fakta juga bahwa sampai kini kita masih kerap terbata-bata membaca Indonesia. Kita memang masih perlu terus mengeja ulang Indonesia, terutama ketika berbagai krisis menerjang sebagai akibat gelombang perubahan besar yang tengah berlangsung dalam kehidupan umat manusia.

Jika langkah pertama *rebranding* dan reposisi berhasil dicapai, maka langkah-langkah selanjutnya tetap masih merupakan sebuah perjalanan panjang yang membutuhkan komitmen besar untuk bersama merevitalisasi kekuatan desa dalam mewujudkan tatanan baru Indonesia era *new normal*. Pada saat itu, barulah pembicaraan



tentang entitas desa dengan segala kekuatan daya hidupnya dalam konteks mengeja ulang I-n-d-o-n-e-s-i-a akan menjadi lebih ramai dibandingkan polemik sains, filsafat, dan agama. Pada saat itulah revitalisasi kekuatan hebat yang dimiliki desa bisa mewujudkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia dalam ejaannya yang baru.

Yogyakarta – Jakarta, 3-7 Juli 2020

Profil Penulis

F.X. Rudy Gunawan

Jalan hidupnya tidak jauh dari menulis. Mulai cerita pendek, esai, novel, dan artikel jurnalistik. Sejak 1992, ia telah menerbitkan karya dan bekerja sebagai jurnalis. Lebih dari 30 bukunya telah diterbitkan oleh Gramedia, Grafiti, Bentang Pustaka, Galang Press, Media Presindo, dan Gagas Media. Di penerbit Gagas Media ia menjadi salah satu penggagas dan pendirinya. Temanya pun beragam, mulai dari dunia aktivis, kehidupan malam, kisah jalanan, maupun dunia sastra dan budaya.

Berkat kemampuan menulisnya tersebut, pria kelahiran Cirebon ini dipercaya menjadi tenaga ahli di Kantor Staf Presiden (KSP) Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi, tahun 2014-2019. Selain itu, pada tahun 2000, Rudy turut mendirikan PSI (Perkumpulan Seni Indonesia) bersama Seno Gumira Ajidarma, Arahmaiani, Nezar Patria, dan Landung Simatupang. Dan di tahun berikutnya, sebagai cerpenis, ia menerbitkan karyanya Zarima; Kumpulan Cerpen (Bukan) Pilihan Kompas (Galang Press, 2001).



Selain karya fiksi, ia juga menulis karya nonfiksi. Di antaranya *Orang Hilang; Sebuah Catatan Lepas Seputar Korban Penculikan* (Pabelan Jayakarta, 1998). Lalu *Budiman Sudjatmiko; Menolak Tunduk* (Grasindo, 1999) dan *Premanisme Politik* (ISAI, 2000). Pada tahu 1990-an, ia juga menulis esai dan karya filsafatnya dalam buku *Filsafat Sex* (Bentang, 1993), serta *Pelacur dan Politikus* (Grafiti Press, 1997). Selanjutnya di awal 2000-an, Rudy menulis *Refleksi Atas Kelamin; Potret Seksualitas Manusia Modern* (Indonesia Tera, 2000), *Skandal; Seks Sebagai Metafora* (Grasindo, 2001), *Mendobrak Tabu; Seks, Kebudayaan, dan Kebejatan Manusia* (Galang Press, 2001) dan kumpulan esai *Krisis Orgasme Nasional* (Galang Press, 2002).





Upaya Membangun Kembali Komunikasi Publik²

Febri Diansyah

Dalam situasi wabah Covid-19 yang sedang berlangsung ini, banyak hal yang sangat krusial bagi masyarakat. Salah satu yang paling dibutuhkan saat ini adalah informasi. Orang-orang bertanya-tanya mengenai situasi hari ini, apa yang harus dilakukan, dan apa yang sedang pemerintah upayakan dalam penanganan

² Tulisan ini disarikan dari materi yang disampaikan Febri Diansyah dalam acara webinar Kongres Kebudayaan Desa 2020, Seri 18 di Hari Kesembilan (dari rangkaian webinar seri 1 hingga seri 18, 1—10 Juli), pada Jumat, 10 Juli 2020: 13.00 s.d. 16.00 WIB. Tulisan ini disarikan oleh **Kusharditya Albi**.

wabah ini. Kebutuhan akan informasi itu dapat tercapai apabila kita menjalin komunikasi dengan baik.

Di era sekarang, arus informasi menjadi sangat banyak dan beragam. Kita memasuki era di mana kita bisa menyebutnya sebagai era “tsunami informasi”. Semua informasi saling tindih dan terkadang diragukan kebenarannya. Di sinilah peran komunikasi nantinya. Dengan adanya komunikasi yang terjalin dengan baik, maka akan memunculkan kepercayaan publik.

Sebelumnya, saya akan sedikit menguraikan mengenai teori Shannon dan Weaver dengan model komunikasinya. Menurut mereka, komunikasi yang baik adalah komunikasi yang tidak hanya menyampaikan pesan, tetapi komunikasi yang dapat memberi pengaruh pada perilaku si penerima (*receiver*).

Hal semacam itu juga sering gagal dipahami oleh pejabat publik. Jika saya berbicara mengenai pejabat, maka saya berbicara mengenai pejabat publik di berbagai level. Kebanyakan komunikasi publik yang dilakukan pejabat memang sudah memahami mengenai target informasinya. Namun, mereka sering lupa mengenai bagaimana pesan itu disampaikan, dengan alat apa, bagaimana hambatan (*noise*) ketika proses penyampaian pesan, dan terakhir mengenai *feedback*. *Feedback* inilah yang sering dilupakan oleh pejabat publik.

Beberapa hal mengenai proses komunikasi tersebut menjadi sangat penting ketika kita ingin membangun komunikasi pada masyarakat desa. Desa memiliki karakteristik yang berbeda dengan pola-pola komunikasi yang berada pada level lain. Masyarakat yang berada di desa punya karakteristik mengenal satu sama lain dan



mereka hampir lebih sering melakukan komunikasi setiap harinya. Maka dari itu, penting untuk memperhatikan cara-cara komunikasi publik di dalam desa.

Komunikasi Publik dalam KPK

Berbicara mengenai komunikasi publik yang dilakukan KPK, maka sudah tentu saya akan berbicara mengenai pengalaman saya. Setiap instansi apapun, saya pikir memiliki prinsip-prinsip yang baik dalam komunikasi publik. Dalam KPK, setidaknya terdapat 3 prinsip dasar yang dipegang dalam melakukan komunikasi publik.

Yang pertama, mengenai media informasi dan cara pendistribusian informasi. Yang kedua, kami juga mengutamakan tanggung jawab kepada publik. Saluran informasi atau alat-alat komunikasi juga digunakan sebagai bentuk akuntabilitas terhadap publik. Dan undang-undang pun telah memerintahkan hal tersebut. Kemudian yang jarang kami cermati adalah mengenai jejaring. Saya pikir ini juga menjadi *concern* bagi para humas dan pihak yang bertugas dalam komunikasi publik. Jejaring di desa ini menjadi sangat penting karena akan menumbuhkan sifat saling percaya.

Menurut saya sangat perlu untuk kedekatan antara pemberi pesan dan penerima pesan. Dalam konteks ini, tentu mengenai pejabat publik dan masyarakatnya. Jadi, ketika masyarakat memerlukan informasi atau kejelasan suatu perkara, pejabat publik harus memberi informasi dengan jelas. Jika memang ada informasi yang belum bisa disampaikan pada publik, atau yang sifatnya rahasia, perlu ada penjelasan juga mengenai itu. Keterbukaan ini menjadi kunci penting dalam menjalin jejaring pada publik.

Kami selalu mencoba mengombinasikan ketiga hal tersebut dalam melakukan komunikasi publik, terutama mengenai jaringan. Jaringan ini sangat penting, jika dalam konteks KPK maka jaringan tersebut adalah jaringan anti korupsi. Dengan jaringan ini, maka KPK akan dijaga dengan rasa kepemilikan bersama. Jika suatu saat KPK diserang, maka publik akan membela, dan ketika KPK memiliki kesalahan, maka publik juga bisa melakukan kritik. Nah, untuk mencapai hal tersebut, tentu butuh proses komunikasi dan pemahaman terhadap karakteristik publik, baik ketika berbicara langsung, maupun melalui media, agar komunikasi terjalin dengan baik.

Sasaran Komunikasi Publik

Dalam sasaran komunikasi, tentu ada sasaran eksternal dan internal. Untuk sasaran eksternal, kami sudah menentukan mengenai siapa saja sasaran pada wilayah eksternal. Dalam hal ini media menjadi salah satu perantara yang paling signifikan dalam penyampaian ke publik. Kita punya pekerjaan penting yang sering kita lupakan, mengenai komunikasi publik yang efektif dari sebuah institusi publik bahkan pada tingkat desa.

Yang sering terjadi adalah kegagalan dalam mendefinisikan mengenai siapa yang menjadi sasaran komunikasi. Terkadang yang kita lakukan hanyalah menempel selebaran di papan informasi. Padahal level informasi itu berbeda-beda. Apakah publik hanya sekedar mengetahui saja. Atau ada harapan dari pemberi informasi terhadap pesan yang disampaikan. Saya pikir perlu perhatian sampai kepada titik tersebut.



Kita bisa mengambil contoh dalam kasus wabah Covid-19 ini, misalnya pemerintah sering menyampaikan informasi hanya pada pemberitahuan penambahan jumlah kasus. Saya pikir tidak cukup dengan seperti itu. Seharusnya ada *impact* dari komunikasi, sehingga masyarakat mengubah pola hidup mereka, menjadi sesuai dengan protokol-protokol yang telah ditetapkan. Jadi ada upaya yang lebih intens dalam komunikasi publik. Terutama pada desa, karena interaksi antara pemberi pesan dan penerima menjadi lebih dekat.

Ada salah satu hal lagi yang perlu diperhatikan mengenai pejabat publik. Di dalam KPK sendiri, sebenarnya banyak pihak yang bisa berbicara, tetapi juru bicara tetap menjadi sentral komunikasi publik. Seorang juru bicara harus memegang prinsip kejujuran, menguasai masalah dengan berpegang pada data dan fakta, dan memperhatikan penampilan. Pejabat publik juga tidak bisa hanya memakai sikap “*no comment*”, perlu adanya penjelasan mengapa sebagian informasi belum dapat disampaikan.

Jadi selain memiliki *public speaking* yang baik, juru bicara juga harus bisa menjadi penghubung yang baik antara KPK dan media. Selain konferensi pers dan *door stop*, kami juga sering melakukan diskusi-diskusi terbuka, baik mengenai kasus-kasus yang ada di KPK ataupun di luar masalah KPK. Dengan begitu maka akan terjalin kepercayaan yang tidak hanya dilakukan secara satu arah.

Tentu saya tidak hanya berbicara mengenai KPK saja. Lebih dari itu, konsep-konsep komunikasi yang baik perlu diterapkan pada komunikasi publik dalam level apapun. Di desa, kita bisa mengambil

jujur bicara yang dapat dipercaya, serta tidak lupa mengenai sasaran komunikasinya, agar menjadi lebih efektif.

Saluran Komunikasi Publik

Pada tahun 2019, terdapat sekitar 997 berita tentang KPK setiap harinya. Untuk tahun 2020 tercatat sekitar 575 berita per hari. Survei ini kami kelola setiap hari bersama teman-teman media. Selain survei tersebut, kami juga memiliki kanal web KPK yang berisi materi pencegahan korupsi. Di dalamnya juga ada dongeng dan *stand up comedy*, untuk memaksimalkan distribusi informasi tentang pencegahan korupsi. Kami juga mengelola media sosial seperti Twitter, Facebook, dan Youtube.

Hal semacam itu penting untuk diperhatikan, karena kami melihat data mengenai bagaimana perubahan konsumsi media sejak 5 tahun terakhir. Kita bisa lihat fenomena globalnya, terutama di Indonesia sendiri. Memang saya belum menemukan survei yang lebih spesifik mengenai konsumsi media di Indonesia. Namun, saya pikir semua sepakat bahwa memang ada perubahan pola konsumsi media pada hari ini.

Mengenai saluran komunikasi, saya sudah menyebutkan bahwa kita tidak hanya berbicara tentang pemberi pesan, informasi yang disampaikan, dan apa yang kita inginkan dari penerima pesan. Saluran komunikasi juga menjadi penting terhadap komunikasi yang efektif. Jika kita memakai saluran yang berbeda dengan masyarakat, tentu target audiensnya tidak akan maksimal. Karena itulah penting untuk memetakan saluran-saluran ini.



Kita sudah mulai memetakan saluran ini sejak 5 tahun terakhir. Sejak tahun 2015, televisi menjadi sumber informasi yang paling dominan, bahkan sampai tahun 2019. Hal menarik yang menjadi perhatian kami adalah media sosial memiliki peningkatan yang cukup signifikan, dimulai dari persentase 15% hingga mencapai hampir 50% pada tahun 2019. Kemudian untuk surat kabar yang sebelumnya memiliki persentase sekitar 60%, berubah drastis menjadi 14%.

Menurut data reportal, dari 270 juta penduduk Indonesia, ternyata persentase penggunaan *handphone* dan internetnya cukup besar. Data ini tentu sangat penting agar kita tahu, saluran komunikasi mana yang akan kita pilih menjadi prioritas. Kita perlu memperhatikan karakteristik dan memperhatikan, kira-kira media sosial apa saja yang sering digunakan oleh publik agar komunikasi kita menjadi lebih efektif.

Komunikasi Krisis

Komunikasi pada masa wabah Covid-19 saya pikir perlu untuk memperhatikan mengenai komunikasi di saat krisis. Di masa seperti ini, semua orang menjadi panik dan ketakutan. Semua negara, termasuk Indonesia, belum benar-benar mengetahui bagaimana cara menghadapi situasi ini. Bahkan pernyataan-pernyataan yang *blunder* sering kita dengar. Dan semua itu menimbulkan ketidakpastian mengenai apa yang harus dilakukan.

Pada kondisi krisis ini, yang perlu dilakukan adalah melakukan pendekatan krisis. Yang perlu diperhatikan soal komunikasi krisis

adalah mengenai prinsip 5C. Pertama, komunikasi harus dilakukan dengan *care*. Seorang pemberi pesan harus memberikan rasa empatinya pada penerima pesan, tidak boleh hanya sekedar memberi pesan. Jangan sampai ketika memberi informasi, dilakukan dengan tertawa-tawa, yang justru akan semakin menimbulkan amarah bagi korban.

Kedua, yang sering menjadi kegagalan adalah mengenai *commitment*, yakni tanggung jawab dan kesungguhan bahwa pemerintah akan segera menyelesaikan masalahnya. Kemudian mengenai *consistency* dan *coherency*. Pejabat publik tidak boleh menyebarkan kebingungan, misalnya pejabat yang satu mengatakan informasi A, tetapi pejabat yang lainnya mengatakan informasi B. Itulah yang menyebabkan kepanikan dan *distrust* terhadap instansi-instansi yang berwenang.

Ada juga mengenai kejelasan informasi. Semua tahu bahwa informasi harus *clear*. Tapi apakah semuanya paham bahwa kejelasan informasi ini juga jelas bagi seluruh kalangan masyarakat. Apakah akan mudah dipahami bagi kalangan yang belum mendapat pendidikan cukup. Saya kira itu Pekerjaan Rumah kita bersama.

Terakhir, yang sering dilupakan adalah mengenai *community*. Ini yang sering dilupakan orang-orang yang bekerja di bidang kehumasan. Bahwa penting untuk membangun jejaring, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, yaitu membangun rasa saling percaya. Maka dari itu, KPK selalu memasukkan prinsip ini dalam pelaksanaan komunikasi publik.



Komunikasi Krisis dalam Lingkup Desa

Untuk prinsip komunikasi krisis di KPK sendiri, kami selalu menjaga reputasi dan mengendalikan situasi krisis. Lalu bagaimana dengan komunikasi krisis di wilayah desa. Saya pikir yang perlu diperkuat adalah partisipasinya. Konsep komunikasi di desa harus dapat memperkuat jejaring komunitasnya, agar penyampaian informasi berjalan dengan baik.

Desa perlu memperhatikan prinsip-prinsip lain dalam membangun komunikasinya. Karena desa memiliki karakteristik yang berbeda, yakni adanya prinsip-prinsip komunal. Jadi, yang perlu diperhatikan adalah komunikasi interpersonal, pemanfaatan seni budaya, penggunaan media yang akrab dengan masyarakat, teknologi yang sederhana, dan partisipasi anak muda desa dalam menjalin komunikasi.

Komunikasi interpersonal berguna bagi masyarakat desa untuk mencapai pengertian satu sama lain. Lalu penggunaan media yang akrab karena hal itu akan berhubungan dengan saluran komunikasi yang tepat sasaran. Teknologi yang dipakai pun harus menyesuaikan kesiapan komunitasnya. Jika, yang dipakai adalah aplikasi Whatsapp misalnya, maka teknologi tersebut yang dipakai. Lalu mengenai pelibatan anak muda adalah soal membangun jejaring di wilayah desa.

Selain itu, ada tiga hal lagi yang perlu diingat. Pertama, mengenai kepastian informasi, jangan sampai ketika terjadi situasi krisis, semua orang kemudian menjadi pemberi informasi. Hal

itu akan menimbulkan kebingungan bagi masyarakat, maka perlu adanya satu sumber yang jelas.

Yang kedua, selain memperhatikan kepastian sumber informasi, perlu adanya saluran komunikasi yang responsif dan partisipatif. Ketika muncul suatu informasi, beberapa orang akan menanyakan hal-hal yang lebih lanjut. Jika, pertanyaan-pertanyaan ini tidak diakomodir dengan saluran yang jelas, maka masyarakat akan mencari sumber lain yang justru akan menjadi *noise* dalam proses komunikasi.

Terakhir, saya yakin isu yang ada di desa akan sangat beragam. Oleh karena itu, isu-isu yang muncul di dalam desa perlu dikelola bersama. Dalam konteks KPK misalnya, ada kajian mengenai penggunaan dana desa, atau potensi korupsi dan penyimpangan. Sehingga, isu-isu yang berkembang antar desa perlu dikelola dengan membangun jaringan-jaringan antar desa.

Profil Narasumber

Febri Diansyah

Ternyata, minat besarnya adalah bidang hukum. Hal yang baru disadarinya, setelah setahun kuliah di Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas, Padang. Selang setahun kemudian, ia memutuskan merantau untuk kuliah di Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada (UGM). Dan selama kuliah tersebut, ia aktif di *Indonesia Court Monitoring* (ICM), sebuah lembaga pengawasan peradilan di Yogyakarta.



Setelah lulus dari UGM tahun 2007, Febri Diansyah memilih bergabung dengan Indonesia Corruption Watch (ICW). Menjadi tim program monitoring hukum dan peradilan. Tugasnya memantau persidangan koruptor di Indonesia. Karena selama ini masih banyak praktik mafia peradilan dalam kasus korupsi. Dan sejak itu Febri makin dikenal, hingga akhirnya menjadi bagian Komisi Pemberantasan Pemilu (KPK) pada 2013, di Fungsional Direktorat Gratifikasi.

Kini, Febri sebagai Kepala Biro Hubungan Masyarakat KPK, yang telah ia jabat sejak 2016. Sempat merangkap peran sebagai juru bicara KPK, ia menjadi rujukan utama informasi kasus-kasus korupsi besar di Indonesia. Bahkan ia sempat dinobatkan sebagai aktivis anti korupsi paling berpengaruh oleh lembaga riset politik Charta Politika Indonesia pada awal 2012. Apresiasi tersebut diberikan atas tingginya intensitas pernyataan Febri dalam menyorot beragam kasus korupsi yang menyita perhatian publik di sepanjang tahun 2011.





Branding Desa di Jempol Milenial³

Edy SR

Pandemi COVID-19 tiba-tiba kembali menghadirkan desa. Desa dinilai tangguh menghadapi krisis akibat wabah tersebut. Budaya “*ndeso*” justru dipandang lebih siap menghadapi COVID-19 ketimbang budaya kota. Bahkan istilah “*new normal*” pun dianggap hanya untuk orang kota, karena di desa semuanya baik-baik saja.

Tapi benarkah demikian? Jangan-jangan, nilai-nilai yang dianggap *ndeso* tersebut sebenarnya merupakan nilai-nilai bersama.

3 Tulisan disajikan untuk Call for Papers “Kongres Kebudayaan Desa” Desa Panggungharjo, 1 Juni-15 Agustus 2020.

Tidak peduli orang desa atau orang kota. Tidak memandang tua ataupun muda. Jangan-jangan nilai-nilai tersebut selama ini ada di manapun dan pada siapa pun, tapi tidak disadari. Dan COVID-19 justru jadi momentum bagi kita untuk mengingatkannya kembali. Menyadarinya lagi, itulah nilai-nilai dasar kemanusiaan. Tidak peduli kita tinggal di desa, maupun di kota.

Dan bisa jadi pula, nilai-nilai tersebut tidak disadari karena stigma *ndeso* adalah udik, kuno, ketinggalan zaman, tidak kekinian, dan tidak keren. Sedang kota dipandang sebaliknya. Penuh gemerlap cahaya, karena semua lampu sorot mengarah ke sana. Dan karena itu pula, selama ini kota selalu dipanggungkan dari generasi ke generasi. Kota dijadikan ukuran sukses, meski sebenarnya menyimpan banyak hal yang tidak beres.

Jadi, inilah saatnya *angle* kamera diarahkan ke desa. Nilai-nilai *ndeso* mesti menempati panggung utama. Bicara desa harus sama kerennya dengan saat menuturkan kota. Dan itu, ada di tangan generasi muda. Karena hari ini, obrolan secara digital lebih mendominasi. Jangan berharap nilai-nilai *ndeso* menjadi *mainstream*, kalau desa tidak hadir sebagai topik di beragam media sosial.

Hari ini, tagar desa di platform Instagram baru ada 300.000. Sedang jumlah desa di Indonesia ada 75.000. Jika diasumsikan desa-desa tersebut membuat “#desa”, maka secara analisa sederhana, setiap desa baru *posting* empat tagar desa. Jumlah yang masih sangat jauh untuk menjadi *mainstream*. Sedang di saat bersamaan, kanal berita *online* Suara.com mengaku dalam sehari bisa menerbitkan 600 postingan di akun media sosialnya.



Optimisme Digital

Awal 2019, *Hootsuite-We are Digital* melaporkan bahwa Indonesia merupakan negara keenam di dunia yang paling optimistis dengan digitalisasi. Riset ini mengukur persentase populasi warga negara yang percaya bahwa teknologi digital akan membuka peluang baru. Angka optimismenya, ada sebanyak 71% warga Indonesia. Indonesia hanya kalah dari Nigeria (80%), India (79%), Uni Emirat Arab (76%), Maroko dan Filipina (74%), serta Kenya (72%).



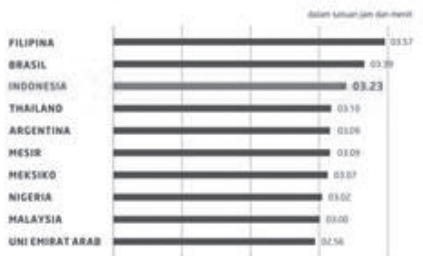
Laporan tersebut masih dilengkapi lagi dengan data durasi pengguna media sosial dalam sehari. Indonesia menempati posisi ketiga di dunia, yaitu selama tiga jam dua puluh tiga menit (03.23). Nyaris tiga setengah jam dalam sehari, warga Indonesia aktif di



media sosial melalui beragam perangkat. Dan angka tersebut hanya diungguli oleh Filipina (03.57) atau nyaris empat jam sehari. Lalu Brasil (03.39) di posisi kedua.

DURASI BERMEDIA SOSIAL

Rata-rata waktu yang dilakukannya pengguna media sosial dalam sehari, untuk bermedia sosial melalui beragam perangkat.



SUMBER: HOOTSUITE - WE ARE DIGITAL, 2016

#BRANDPRENEUR

Dan masih berdasar rangkaian riset *Hootsuite-We are Digital*, ada dua platform media sosial yang mendominasi di Indonesia yaitu Facebook dan Instagram. Platform berlogo huruf “F” biru, mendominasi dengan 130 juta akun. Jika penduduk Indonesia diasumsikan berjumlah 260 juta jiwa, maka bisa dibayangkan, Facebook digunakan oleh separuh warga Nusantara. Selanjutnya, di Indonesia ada 53 juta akun Instagram. Platform berbagi foto dengan logo kamera ini, masih terus bergerak naik, seiring mudahnya orang

berfoto ria dengan kamera ponsel. Belum lagi kontribusi *traffic* yang disumbangkan oleh Youtube, Tik-Tok, dan Podcast yang belakangan trennya juga naik.

Angka-angka tersebut tentu menarik dicermati dalam konteks *branding* desa di era digital. Nilai-nilai *ndeso* tidak bisa lagi didiamkan, dan hanya mengandalkan diturunkan secara turun-temurun tanpa meninggalkan jejak digital yang masif. Ini bukan perkara viral atau tidak viral. Tapi ini menjadi bagian strategis, agar nilai-nilai *ndeso* mudah ditemukan di mesin pencari. Lalu menjadi rujukan dari generasi ke generasi di masa depan. Dan itu harus segera dimulai sekarang, dari jempol-jempol generasi milenial maupun generasi setelahnya.

Penetrasi media sosial yang begitu dominan, juga merupakan potensi *branding* desa yang luar biasa. Jempol generasi milenial yang paham nilai-nilai *ndeso*, harus digerakkan untuk meluaskan nilai-nilai tersebut. Karena media sosial merupakan aset *horizontal marketing*, pemasaran sebaya. Antar pengguna saling memengaruhi, *peer to peer effects*. Dan jika nilai-nilai *ndeso* tersebut lalu-lalang di beragam obrolan mereka, maka akan ada potensi menjadi pemahaman bersama.

Sekali lagi, nilai-nilai *ndeso* harus dihadirkan di ranah digital agar menjadi kesadaran baru bagi generasi milenial. Saat ini, desa-desa yang keren, merupakan buah kreativitas sosok kepala desanya yang keren juga. Tapi ketika itu tidak meninggalkan jejak digital yang memadai, maka generasi selanjutnya akan kesulitan melanjutkan nilai-nilai *ndeso* yang keren tersebut. Sehingga capaian tersebut



hanya akan berhenti di sosok. Tidak terarsip yang mudah diakses secara luas oleh lintas generasi. Dan kalau seperti itu, jangan heran jika generasi di masa depan harus mulai dari nol lagi.

Subkultur Digital

Ada tiga subkultur digital yang akan makin berpengaruh di masa depan. Yakni generasi muda, perempuan dan warganet. Mereka mendominasi tidak hanya karena jumlahnya, tapi juga karena pengaruhnya. Karena itu, *branding* desa tidak bisa mengabaikan potensi penting mereka. Ketiganya mesti dilibatkan dalam beragam pengembangan desa. Baik di tataran taktis maupun strategis.

Generasi muda, dalam konteks sekarang adalah generasi milenial dan generasi setelahnya, memiliki keunggulan kompetitif berupa pikiran yang terbuka. Mereka lebih mudah mengakomodir beragam gagasan baru dibanding generasi-generasi sebelumnya. Generasi milenial beranjak memiliki peran dalam penentuan kebijakan maupun pengambilan keputusan. Sebelumnya, peran tersebut berada di generasi sepantaran orang tua mereka. Sayangnya, generasi orang tua mereka, yang umum disebut generasi X, tidak semuanya mampu beradaptasi dengan perubahan di era digital.

Ketidakmampuan beradaptasi sebagian generasi X tersebut, di beberapa tahap masih menghambat generasi milenial. Begitu pula kondisi di desa. Tidak semua pemangku kepentingan di desa, siap beradaptasi dengan kehadiran generasi milenial. Akhirnya pilihannya, generasi milenial yang berhasil meyakinkan generasi “*old school*” akan bersinergi di masa transisi yang tidak mudah, atau justru

meninggalkan desa, karena merasa lebih terakomodir di kota. Ini jelas menjadi kerugian bagi desa, jika tidak segera disadari sejak dini.

Sedang perempuan, merupakan subkultur digital yang bakal punya banyak peran penting karena keunggulan demografinya. Tentu tidak semata-mata jumlahnya, tapi juga terkait dengan potensi intelektual dan pengaruhnya di beragam ranah kebijakan. Hadirnya para pemimpin perempuan di desa mesti diakomodir dengan baik. Seperti halnya potensi generasi muda, potensi perempuan harus dikelola sejak awal sebagai aset *branding* desa.

SUBCULTURE



EDYSR.COM

#BRANDPRENEUR

Berbagai studi kasus selama pandemi COVID-19 misalnya, justru menunjukkan bagaimana peran vital perempuan dalam



menghadapi krisis wabah tersebut. Sejak dari lingkup rumah tangga, desa, hingga negara. Mereka terbukti turut berkontribusi menjaga ketahanan ekonomi rumah tangga. Berkat mereka pula, gotong royong ekonomi desa menjadi bagian dari kebijakan mitigasi COVID-19 yang saling menguatkan.

Di belahan negara lain, meski mungkin masih butuh riset lebih lanjut, tapi kita bisa menyaksikan bagaimana negara-negara yang dipimpin perempuan justru lebih responsif dan handal dalam menghadapi COVID-19. Sehingga angka penderita COVID-19 di negara-negara tersebut segera melandai. Ke depan, inspirasi para perempuan tersebut juga bakal tumbuh di desa-desa. Karena itu, yang perlu dipersiapkan sejak sekarang adalah, melepas kekang budaya atau nilai-nilai bagi perempuan, yang sudah terbukti tidak relevan lagi.

Dan subkultur digital yang terakhir adalah warganet. Warga “pribumi” di era digital ini, jelas bakal berperan sangat vital. Mereka lahir saat digitalisasi sudah berjalan baik. Tidak butuh masa transisi dan proses adaptasi seperti generasi sebelumnya. Warganet telah *digital savvy* sejak anak-anak, remaja, hingga kini dewasa. Keunggulan kompetitifnya adalah koneksitas antar mereka. Merekalah pelaku *peer to peer* di era digital yang sesungguhnya.

Perspektif sosial, ekonomi, politik hingga budaya mereka, tak lepas dari konteks digital. Bahkan beragam persoalan yang selama ini, dari generasi ke generasi seolah tidak mendapat solusi, tiba-tiba semuanya tampak mudah diberesi secara digital. Berbagi gagasan mereka juga dengan mudah saling dipadupadankan melalui beragam

platform digital. Dan kemudian perspektifnya turut memengaruhi bahkan menekan pengambilan kebijakan publik.

Dan dalam konteks desa, peran penting warganet tersebut juga harus segera menjadi kesadaran bersama. Karena kini, desa tidak bisa lagi hanya mengandalkan komunikasi formal dari kantor kepala desa. Rembug desa tidak lagi berupa kumpulan di aula balai desa. Tapi lebih dari itu, desa butuh gotong royong digital. Kolaborasi dari beragam jempol. Ibaratnya, warganet bisa tersebar di mana saja, namun untuk *branding* desa, mereka harus satu klik: #desa.

Desa Harus Keren

Ibarat *brand*, desa harus punya *brand value*. Nilai-nilai baik dari desa tersebut harus disadari oleh subkultur digital. Tidak hanya berhenti di level para pemangku kepentingan. Karena dalam konteks *branding* desa, para subkultur digital tersebut merupakan *influencer*. Merekalah yang akan meluaskan pengaruh melalui beragam platform digital. Detik ini, semua status, *caption*, foto, dan video mereka tentang desa, merupakan *endorsement*. Kesaksian yang bisa jadi lebih mujarab ketimbang pidato para pejabat desa.

Desa mesti menjadi aset *branding* yang keren, baik secara *tangible* maupun *intangibile*. Sekarang memang era “pameran”, karena itu desa butuh menghadirkan pengalaman baik bagi subkultur, untuk dipamerkan di media sosial mereka. Eksotika desa berupa udara bersih, air jernih, dan pangan yang sehat misalnya, tidak boleh lagi cuma dianggap sebagai romantisme tentang desa di masa lalu, yang kemudian cuma dikenang oleh generasi “*old school*”. Eksotika



tersebut dibutuhkan generasi milenial dan generasi setelahnya, untuk mengawali kesadaran nilai-nilai desa.

Mereka butuh merasakan yang mudah dicerna. Jika generasi “*old school*” mendewa-dewakan wacana idealisme desa berdasar kenangan masa lalunya, maka subkultur digital perlu “kenangan” itu hadir. Nyata, di detik ini, dan mereka mengalami. Dan itu akan jadi pemantik mereka untuk bergerak mencari kepingan nilai-nilai desa yang selama ini terlewat. Tentu dengan cara mereka yang kekinian, yang kaya informasi dan kemudahan akses referensi.

Contoh sederhana, istilah “gotong royong” jadi berasa tidak keren bagi subkultur digital, karena kesannya terlalu identik dengan bersih-bersih got atau gang. Tapi begitu dibahasakan “kolaborasi”, mendadak kesannya keren. Karena kolaborasi identik dengan *content creator* yang kekinian. Tidak peduli, bahwa kemudian kontennya juga berupa gotong royong membersihkan got yang direkam kamera, lalu dibagikan dengan tagar “KolabsWarga”.

Hal yang tampak sepele seperti ini sejatinya jadi strategis jika dibaca dari kacamata *branding* desa. Karena aset yang sifatnya *intangible* atau tak kasat mata, juga butuh *bridging* untuk memahaminya. Dan ketika nilai-nilai *ndeso* tersebut kemudian menjadi *mainstream*, maka desa juga bisa hadir secara utuh di hadapan generasi milenial dan setelahnya. Desa tidak hanya disadari sebagai tempat mudik ke tanah leluhurnya, namun desa juga akan disadari sebagai tempat lahirnya nilai-nilai luhur yang dirawat oleh para leluhurnya.

Karena itu, seluruh keunggulan kompetitif desa tersebut, harus dikonsep secara kontekstual agar ramah untuk diluaskan. Termasuk

menjadi isu *mainstream* bagi media massa *major label*. Sehingga *branding* desa tidak bergantung pada media baru berlabel “desa”, yang jangkauannya masih terbatas. Sekali lagi, ini juga menjadi bagian dari langkah strategis. Jika tidak, media massa *major label* akan terus memahami desa sebagai isu pinggiran dan hanya akan jadi *headline* di halaman muka, saat mengalami bencana besar. Kalau demikian, sungguh tidak keren.

Digital Branding

“Membaca Desa, Mengeja Ulang Indonesia” berarti menata *branding* desa dengan perspektif digital. Bukan mengubah semuanya, tapi mengelola nilai-nilai *ndeso* menjadi “konten” yang lebih mudah dicerna dan ramah untuk diluaskan. Jejak digital adalah aset penting. Karena desa dengan segala aset *tangible* dan *intangibile*-nya, harus mudah ditemukan di mesin pencari. Jika 75 ribu desa di Indonesia mudah ditangkap mesin pencari, maka betapa kayanya referensi kita tentang desa. Kalau masing-masing desa tersebut gotong royong digital dengan seribu postingan Instagram bertagar desa, maka sudah akan ada 75 juta “#desa” di platform berbagi foto tersebut. Itu belum di Facebook, Twitter, Youtube, maupun Tik-Tok.

Nilai-nilai *ndeso* tidak hanya dihadirkan berupa nasihat para tetua, tapi juga bisa hadir lewat status, foto, maupun video. Bahkan video lucu ala Tik-Tok juga bisa dikonseptkan untuk itu. Teladan nilai-nilai baik desa, bisa disimak berulang-ulang lewat platform video. Bisa ditularkan secara *peer to peer* oleh generasi milenial dan generasi setelahnya. Lalu setiap tahun, pengalaman baik tersebut secara otomatis akan hadir di “album memori” masing-masing platform



media sosial. Artinya, kita telah melengkapi *branding* desa yang selama ini mengandalkan *offline*, dengan aset *online* yang luar biasa.

Bauran *offline* dan *online*, yang biasa dikenal dengan istilah *omni-channel* ini, merupakan racikan strategis dalam *branding* desa. Karena kemudian desa menjadi topik di mana-mana. Baik di dunia nyata, maupun virtual. Harapannya, saling berbagi pengalaman tersebut akan menjadi semacam “*rating*”. Penilaian atau pengakuan atas nilai-nilai baik ala *ndeso*. Dan selayaknya *rating*, pengalaman yang mengesankan tersebut akan bergulir menjadi rekomendasi.

Jika pemerintah desa beriklan, maka bisa dipastikan, iklannya akan segera dilewati dengan klik tombol *skip*, atau bahkan segera ditutup dengan klik tanda silang. Tapi kalau *branding* desanya melahirkan rekomendasi dari mulut ke mulut, dari jempol ke jempol, dan dari hati ke hati, maka kesan baik tersebut akan meluas dengan sendirinya. Karena *branding* desa sejatinya menghadirkan ikatan emosional *peer to peer* berdasar nilai-nilai desa yang baik tersebut. Dan meluaskannya secara digital merupakan bagian dari strategi menghadirkan tatanan baru Indonesia secara *ndeso*.

Profil Penulis

Edy SR

Brandpreneur

Gagasannya tentang “brandpreneur” didedikasikan untuk dunia wirausaha, “brand strategy for enterpreneur”. Namun uniknya, bekal awal menggeluti *branding* justru banyak ia dapat dari dunia sepak bola. Mulai dari brand activation Pesta Pelajar Tabloid Bola (2004-

2006), Piala Coca-Cola (2006-2009), Manchester United Premier Cup 2012, hingga rangkaian sebelas kota Intersport Futsalfest 2013. Bahkan ia sempat menjadi tim pemasaran Lisensi Resmi FIFA untuk Nonton Bareng Piala Dunia 2010 di Indonesia. Dan pada 2017, perspektif branding-nya turut mewarnai desain Kurikulum Pembinaan Sepak bola Indonesia terbitan PSSI.

Kini, Edy SR konsen dengan *digital branding*. Berkat intensitasnya bersama para pelaku startup. Tahun 2018, ia menjadi pemateri “Branding Strategy for Startup” dan juri “Business Pitching Competition” di program Inovator Inovasi Indonesia Expo, untuk Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. Selang setahun kemudian, ia dipercaya sebagai konsultan startup transportasi *online*, Bistar. Dan selama masa pandemi Covid-19, Edy SR mendedikasikan dirinya sebagai relawan *branding* untuk platform *Pasardesa.id*, sebuah inisiatif mitigasi ekonomi dari Desa Panggungharjo.





Jurnalisme Desa untuk Mengentaskan Kemiskinan⁴

Firmansyah

Pada interaksi penulis sebagai jurnalis di Provinsi Bengkulu selama 10 tahun desa merupakan tempat yang tiada habis untuk dikisahkan dengan cerita-cerita yang inspiratif, mengejutkan, memilukan hingga membanggakan. Ada banyak cerita kemandirian ekonomi, kepedulian terhadap lingkungan hidup, pemberdayaan

4 Tulisan disajikan untuk *Call for Papers* "Kongres Kebudayaan Desa", Desa Panggungharjo, 1 Juni-15 Agustus 2020.

pendidikan, wisata, kuliner, adat, budaya, hingga perjuangan bangkit dari kemiskinan saya temui.

Cerita dari kampung itu bila dikemas dengan apik dan menarik tentu saja berguna dalam upaya menentukan arah kebijakan pembangunan di perdesaan. Ada ribuan cerita dari desa menurut saya apabila dibagikan pada khalayak akan berguna bagi kebijakan pembangunan nasional termasuk memerangi kemiskinan.

Satu contoh, di Provinsi Bengkulu, Kabupaten Lebong terdapat sebuah desa bernama Sungai Lisai. Desa ini sudah ada sejak ratusan tahun lalu di tengah belantara bersama warganya, pasca Indonesia merdeka Sungai Lisai masuk dalam zona Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS). Secara hukum wilayah taman nasional tak diizinkan ada aktivitas pembangunan, sementara warga Desa Sungai Lisai membutuhkan akses jalan menuju pusat pemerintahan Kabupaten Lebong, Muara Aman, terkait kepentingan ekonomi, sosial dan kesehatan. Persoalan menjadi rumit.

Seorang bocah dari desa itu meninggal dunia karena telat dibawa ke pusat kesehatan karena buruknya akses jalan. Warga harus menggotong bocah tersebut melewati hutan rimba selama 4 jam hingga tiba di rumah sakit lalu meninggal dunia akibat telatnya mendapatkan penanganan medis.⁵

Kepala Desa Sungai Lisai, Hajron, berangkat dari sejumlah kejadian tragis seperti itu meminta pemerintah dan Balai TNKS untuk memberikan kebijakan melalui sejumlah media massa

5 Firmansyah (2018). "Nasib Warga Situs Warisan Dunia Tembus Hutan Rimba Saat Sakit Parah". <https://regional.kompas.com/read/2018/01/22/11530091/nasib-warga-situs-warisan-dunia-tembus-hutan-rimba-saat-sakit-parah?page=all>. *kompas.com* 22 Januari 2018 diakses 26 Juni 2020.



alhasil keluhan kepala desa dikabulkan oleh pemerintah dengan memberikan akses jalan.⁶

Hajron dalam keluhannya terkait pembangunan desa menyebutkan tidak adanya akses terhadap media massa dan wartawan menjadikan desanya sulit untuk menyampaikan usulan terkait kebijakan taman nasional kala itu. Ia merasa beruntung saat ada beberapa jurnalis yang kebetulan singgah ke desanya lalu terjadilah komunikasi dan tersampaikan semua keluhan desa.

Hajron mungkin termasuk beruntung secara kebetulan ada jurnalis yang bertandang ke desanya yang tempatnya jauh di tengah rimba TNKS hingga tersampaikanlah keluhan warganya. Sejauh ini tidak banyak media massa arus utama, pers, jurnalis atau wartawan yang bisa secara total meluangkan waktunya untuk mengabarkan cerita-cerita dari desa dan kampung. Media massa arus utama sering kali mengalami hambatan untuk menyentuh seluruh desa-desa di Indonesia. Bila cerita itu hanya disandarkan pada media massa arus utama maka dapat dipastikan ketimpangan cerita kota dan desa terus terjadi seperti saat ini.

Ketimpangan cerita kota dan desa itu menghasilkan media massa seperti menara gading yang terpisah pada kepentingan masyarakat.⁷ Media massa menjadi menara gading sosial, yang egois menentukan kemauan sendiri, termasuk urusan etika. Masyarakat tidak diberi ruang yang layak untuk berkontribusi memantau media.

6 Azhar, Rajeman (2016). "Jalan Sungai Lisai Bisa Dibangun". <https://bengkuluexpress.com/jalan-sungai-lisai-bisa-dibangun/> bengkuluexpress.com 3 Maret 2016 diakses 26 Juni 2020.

7 Arif Mustam (2011). "Mengawal Media agar Tak Jadi Tirani. Profesionalisme, Sejarah, dan Masa Depan Pers Daerah", Jurnal Dewan Pers Edisi No. 5, Mei 2011.

Padahal, peran masyarakat sesungguhnya menjadi energi menuju profesionalisme. Banyak yang mengkritik pers hari ini cenderung menjadi corong kaum elit pemilik media misalnya, pemilik modal mengakibatkan bias kepentingan alias tidak begitu peduli dengan persoalan mendasar masyarakat.

Bias kepentingan media ini terlihat dalam Siregar, dkk.⁸ Berdasarkan riset serta hasil penelusuran data, ditemukan bahwa berita tentang pemilik media cenderung bias kepentingan pemilik dan/atau kelompok afliasinya. Kelompok afiliasi ini bisa berhubungan dengan pemodal, pejabat, dan lainnya yang lebih memiliki akses terbuka pada media massa.

Pers media arus utama memiliki persoalan, kepentingan pemodal lebih mengutamakan dari pada kepentingan publik. Kepentingan publik menjadi tersingkirkan oleh kepentingan modal. Media massa memiliki dua wajah. Ashadi Siregar dalam tulisan Alfarabi⁹ menyebutkan media massa memiliki dua wajah sebagai institusi bisnis dan institusi sosial. Kedua sifat ini membawa implikasi dalam orientasi keberadaannya. Sebagai institusi bisnis media massa sama halnya dengan korporasi, yaitu menjalankan operasinya dengan orientasinya ke dalam (*inward looking*), untuk kepentingan sendiri. Sedang menjalankan institusi sebagai institusi sosial, berorientasi keluar (*outward looking*) untuk kepentingan masyarakat. Pada kondisi ini menjadikan pers nasional saat ini seperti gamang dalam menjalankan kedua peran secara ideal.

8 Siregar Effendi Amir, Rahayu, Puji Rianto, Wisnu Martha Adiputra (2014). "Menakar Independensi dan Netralitas Jurnalisme dan Media di Indonesia". Jurnal Dewan Pers Edisi nomor 9, Juni 2014.

9 Alfarabi (2010). "Kajian Komunikasi Kritis Terhadap ekonomi Politik Media". Jurnal Idea Fisipol UMB, 1-84 Volume 4 Nomor 17, Juni 2010.



Pers memiliki posisi penting dalam memerangi kemiskinan tidak bisa dipungkiri peran pers sangat penting dalam mengangkat masalah kemiskinan. Pers berfungsi menambal kekosongan informasi yang seharusnya disediakan oleh aparat atau pejabat yang lalai menjalankan tugasnya. Pemerintah cenderung hanya ingin melenyapkan kemiskinan artinya menutupi dari ekspose pers, bukan mengatasi dan mengentaskan si miskin. Seolah jika kemiskinan tidak terekspos, dengan sendirinya kemiskinan itu tidak ada. Tugas pers adalah selalu mengingatkan, dengan terus mengekspos kemiskinan. Tugas pers dan jurnalisme bukanlah menghibur, melainkan mengabarkan fakta dan realitas. Informasi tentang kemiskinan, terutama memang ditujukan kepada para pengambil keputusan, agar mereka lebih benar dalam mengelola negara dan memperbaiki taraf hidup masyarakat. Rendahnya perhatian pers Indonesia pada problem kemiskinan, jangan-jangan adalah pertanda bahwa pers tengah mengalami kemiskinan jurnalistik.¹⁰

Nugraha¹¹ menytir pasal 6 UU no 40 tahun 1999 tentang pers menyebut pers nasional melaksanakan peranan sebagai berikut: 1) Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui. 2) Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi dan hak-hak asasi manusia serta menghormati kebhinekaan. 3) Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat akurat, dan benar. 4) Melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. 5) Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

10 Dewan Pers (2007). "Pers dan Kemiskinan". (https://dewanpers.or.id/publikasi/opini_detail/51/Pers_dan_Kemiskinan) 2 Maret 2007 diakses 26 Juni 2020.

11 Nugraha Bekti (2011). "Pers Daerah: Mati Enggan, Hidup Segan. Profesionalisme, Sejarah, dan Masa Depan Pers Daerah", Jurnal Dewan Pers Edisi No. 5, Mei 2011.

Sedangkan dilihat dari fungsinya pers bisa dikatakan mempunyai fungsi antara lain: sebagai Informasi (*to inform*), sebagai Edukasi (*to educate*), sebagai Koreksi (*to influence*), sebagai Rekreasi (*to entertain*), sebagai Mediasi (*to mediate*), dan sebagai Solusi (*to solve the problem*).

Pada perkembangan selanjutnya media massa juga berfungsi sebagai kontrol sosial mengawasi kinerja penguasa dalam bentuk idealis. Impian idealis agar media massa bertindak ideal dalam menjalankan fungsinya saat ini menjadi pertanyaan besar. Apakah media massa bekerja pada kepentingan publik atau kepentingan penguasa/kelompok modal?

Bill Kovach¹² menulis “9 Elemen Jurnalisme” menyebutkan, salah satu elemen terpenting dari jurnalistik adalah berpihak pada kepentingan publik. Memihak pada kepentingan orang banyak (massa). Pendapat ini sekaligus meluruskan kembali fungsi pers secara idealis adalah berpihak pada kepentingan bersama dan khalayak luas.

Harapan akan pers dan media massa yang ideal menjadikan persoalan masyarakat terutama kemiskinan sebagai kepentingan utama dalam setiap pemberitaan dan produksi media massa masih seperti mimpi yang sulit dijangkau masyarakat perdesaan. Berangkat dari sejumlah pertimbangan di atas maka menurut hemat penulis sudah saatnya desa-desa di Indonesia harus membangun jurnalisme desa untuk melawan semua persoalan di tingkat desa termasuk masalah kemiskinan.

12 Kovach bill & Tom Rossenstiel (2006). *9 Elemen Jurnalisme*. Penerbit Pantau, Jakarta.



Pembahasan

Perdebatan mencari jalan keluar antara kepentingan antara pers yang membela pemodal (kelompok mapan) atau khalayak luas terus terjadi di kalangan ilmuwan sosial. Muncul sejumlah gagasan di tengah perdebatan tersebut salah satunya gagasan yakni jurnalisme warga.

Jurnalisme warga berarti warga yang aktif mengumpulkan informasi, memverifikasi, menulis dan kemudian menyebarkan; baik melalui blog personal, portal jurnalisme warga, media komunitas, mau pun media arus utama yang menyediakan kanal khusus bagi jurnalis warga. Sejatinya, jurnalisme warga bukan barang baru di Indonesia. Radio telah memulainya, jauh sebelum internet banyak diakses masyarakat.¹³

Jurnalisme warga memiliki pengertian yang berbeda dengan jurnalisme publik. Jika jurnalisme publik dilakukan oleh pekerja jurnalistik profesional, maka jurnalisme warga dilakukan oleh warga yang awam dengan kerja-kerja jurnalistik. Akan tetapi, keduanya memiliki filosofi yang sama yaitu pemberdayaan masyarakat. Jurnalisme warga lebih bertujuan untuk melibatkan warga secara langsung dalam produksi berita.¹⁴

Jurnalisme warga pertama kali dimunculkan di Amerika Serikat sekitar tahun 1998 gerakan ini muncul atas krisis kepercayaan terhadap media-media arus utama dan kecewa terhadap kondisi

13 Ningtyas, Ika (2014). "Demokratisasi Media Melalui Jurnalisme Warga". <https://www.remotivi.or.id/amatan/33/demokratisasi-media-melalui-jurnalisme-warga>. remotivi.or.id, 22 Desember 2014 diakses 26 Juni 2020.

14 Wedhaswary Inggried Dwi (2008). "Perkembangan Jurnalisme Warga di Indonesia" (Studi Kasus pada Metro TV, Radio Elshinta, www.kompas.com, www.panyingkul.com). Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, hal 18.

politik pada masa itu. Inti dari jurnalisme warga ialah masyarakat berperan sebagai objek sekaligus subjek berita. Perdebatan juga muncul terkait apakah produk jurnalisme warga adalah karya jurnalistik. Menurut hemat penulis bila itu dilakukan dengan standar etika pers yang ketat hal itu dapat teratasi.

Jurnalisme warga dapat diadopsi dan dimodifikasi sebagai jalan tengah untuk menjadikan jurnalisme yang berkeadilan bagi warga desa, konsep ini dapat dikatakan sebagai jurnalisme desa. Membangun desa yang memiliki seperangkat lengkap organisasi media massa dalam format jurnalisme desa.

Pengalaman di Bengkulu

Jurnalisme desa menjadi sebuah peluang juga tantangan di Indonesia untuk diadopsi pada desa-desa di Indonesia. Pengetahuan menyoal pers, media massa, sumber daya manusia, perangkat lunak, tata kelola keuangan hingga tugas keredaksian harus dikenalkan pada masyarakat desa terutama kaum muda dalam organisasi karang taruna.

Pada tulisan ini saya memberikan contoh bagaimana jurnalisme desa digagas oleh masyarakat di Provinsi Bengkulu, Kabupaten Kepahiang Desa Batu Ampar, Kecamatan Merigi. Desa Batu Ampar dalam dua tahun terakhir warga dibantu oleh beberapa jurnalis profesional menginisiasi mendirikan sebuah web jual beli *online*, *www.toko.batuampar.id*, untuk mendukung usaha yang dilakukan masyarakat setempat¹⁵.

15 Carminanda (2020). "Pasarkan produk lokal, desa di Bengkulu buat website jual beli online". <https://bengkulu.antaranews.com/berita/112534/pasarkan-produk-lokal-desa-di-bengkulu-buat-website-jual-beli-online>. antarabengkulu.com 3 Juli 2020. Diakses 5 Juli 2020.



Web ini cukup membantu perekonomian masyarakat. Desa ini menghasilkan sejumlah produk seperti gula aren, kopi, kerajinan tangan dan lainnya. Dalam satu bulan sejak web diluncurkan pertengahan tahun 2020 permintaan gula aren meningkat menjadi 500 kilogram per bulan yang dijual ke Palembang dan Kota Bengkulu begitu juga dengan hasil produk desa lainnya.

Jauh sebelum web diluncurkan sejumlah jurnalis melakukan proses berbagi ilmu jurnalistik dengan pemuda dan warga setempat bagaimana mengelola sebuah media, pelatihan jurnalistik, fotografi hingga membuat video juga dilakukan. Keputusan membuat web jual beli adalah pilihan warga desa setelah terjadi diskusi panjang dibantu sejumlah jurnalis. Web *www.toko.batuampar.id* terus berproses seiring waktu dan menemukan bentuknya sendiri. Bisa saja sejumlah inisiatif akan terus tumbuh dari masyarakat dengan hadirnya media tersebut guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Selain Desa Batu Ampar, Desa Sumber Urip, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu lebih dahulu melakukan hal serupa. Desa Sumber Urip didampingi organisasi perempuan *Women Crisis Center* (WCC) dibantu sejumlah anggota Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Bengkulu membangun media desa yang diberi nama “Lentera Perempuan”.

Lentera Perempuan didirikan oleh kelompok perempuan Desa Sumber Urip, berbasiskan media cetak sederhana. Karya jurnalistik perempuan desa itu ditempelkan di pusat desa, masjid, balai desa dan pasar. Media ini berisikan persoalan kesehatan perempuan, reproduksi, peran perempuan dan isu-isu perempuan lainnya.

Lentera Perempuan menjadikan perempuan desa setempat sebagai jurnalis, penulis, dan manajer pengelolaan media. Kehadiran Lentera Perempuan di Desa Sumber Urip menjadi perhatian warga setempat, bahkan efek kehadiran Lentera Perempuan sejumlah kebijakan desa berhasil ditelurkan oleh pemerintah desa yang berhubungan dengan peran perempuan dalam pembangunan desa. Begitu juga kebijakan desa dalam melindungi perempuan dan anak dari tindak kekerasan rumah tangga.

Saat ini Lentera Perempuan terus bermetamorfosis melakukan pembuatan konten informasi berbasis film-film pendek, karikatur, poster tentang perempuan dan anak. Ke depan Lentera Perempuan terus melakukan pengembangan berbasis media daring dan Youtube atau memanfaatkan media internet (media sosial).

Belajar dari pengalaman dan fenomena dua jenis media alternatif tersebut dapat dipetik sejumlah pelajaran yakni, pertama kehadiran media berbasis jurnalisisme warga desa dapat meningkatkan perekonomian desa hal itu terlihat dalam larisnya pembeli produk-produk dari desa. Kedua, ternyata media desa dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah desa. Hal ini terlihat dari Lentera Perempuan, hadirnya media ini dengan wacana dan isu yang spesifik menyoal perempuan maka pemerintah desa membuat sejumlah kebijakan desa yang berorientasi pada kebutuhan perempuan. Ketiga, jurnalisisme desa meningkatkan pengetahuan dan pendidikan masyarakat desa.

Mulai dari Mana?

Memulai membangun jurnalisisme desa tidak serumit seperti dalam teori ilmu jurnalistik. Langkah pertama yang dapat dilakukan



yakni pihak desa mengakses atau membangun jaringan dengan organisasi profesi jurnalis. Pada tulisan ini saya contohkan AJI, PWI, IJTI dan sejenisnya. Melakukan kontak dengan perguruan tinggi juga langkah baik, termasuk dengan sejumlah organisasi gerakan sipil.

Apabila kontak telah terbangun maka biasanya organisasi jurnalis tersebut akan menggelar sejumlah pendidikan untuk warga/karang taruna termasuk target utamanya adalah tumbuhnya kesadaran warga desa akan pentingnya media bagi masyarakat. Pendidikan tingkat awal ini bertujuan berbagi pemahaman bahwa pers hadir harus berpihak pada kepentingan masyarakat umum. Pendidikan ini biasanya mengangkat persoalan, potensi dalam kehidupan masyarakat desa serta bagaimana pers harusnya hadir.

Melangkah tahap berikutnya biasanya mulai digelar pelatihan jurnalistik tingkat dasar seperti jurnalisme dasar, teknik wawancara, teknik menulis, fotografi, video, hingga memperkenalkan dinamika dan hukum pers di Indonesia. Hal yang tak kalah penting memperkenalkan kode etik jurnalistik.

Pendidikan berikutnya mulai memperkenalkan manajemen redaksi, *fundraising* dana publik, mengelola media sosial guna keperluan keberadaan sebuah media massa. Bila pada tingkat ini dirasa sudah cukup maka tidak menutup langkah berikutnya untuk memulai membangun media desa. Memilih mendirikan media desa dapat disesuaikan dengan kondisi desa apakah memiliki akses internet, listrik atau tidak. Bila akses internet listrik dan internet minim, maka pilihannya dapat dilakukan dengan membangun media cetak dengan kemampuan pendanaan desa.

Saat media desa sudah hadir baik dalam bentuk daring atau cetak maka tata kelola manajemen yang didapatkan dalam pelatihan-pelatihan sebelumnya perlahan mulai diterapkan. Agenda-agenda pembangunan media desa ini harus dilakukan secara terukur bersama perangkat desa, masyarakat, dan kelompok pendamping.

Ada banyak pelatihan jurnalisme untuk masyarakat yang digelar namun berakhir dengan hasil yang kurang maksimal. Secara umum penulis berpendapat ada sejumlah penyebab kurang maksimalnya hasil pelatihan-pelatihan serupa. Penyebab kegagalan melahirkan media desa yang serius disebabkan oleh faktor lemahnya keberpihakan pemerintah desa untuk membangun media desa. Ketiadaan sumber dana untuk media desa salah satu penyebabnya. Sesungguhnya hal ini dapat dicari jalan keluarnya dengan donasi warga agar media desa dapat bersikap mandiri dan independen.

Penyebab berikutnya adalah pelatihan-pelatihan kejournalistikan tidak dilakukan secara bertahap dan konsisten. Padahal rangkaian pelatihan tersebut harus memiliki target dan tolok ukur ketat. Penyebab lainnya adalah rendahnya minat warga. Terkait rendahnya minat warga ini dapat disiasati dengan sejumlah stimulus seperti membuat lomba jurnalisme warga, lomba fotografi khusus warga desa dan banyak pendekatan lainnya.

Tantangan

Mendirikan media desa atau jurnalisme desa tentu saja memiliki sejumlah tantangan seperti terdapat sejumlah desa di Indonesia yang belum memiliki akses internet dan listrik. Bila tantangannya adalah ketiadaan jaringan listrik dan internet maka jurnalisme desa dapat



dibangun seperti cara Lentera Perempuan. Media desa dibangun menggunakan metode konvensional, media cetak yang disebar dan ditempatkan di pusat-pusat keramaian desa. Totalitas dan konsistensi akan membuahkan hasil akan keberadaan media ini.

Tantangan berikutnya adalah bagaimana mendorong masyarakat desa mau menulis. Langkah ini tidak terlalu sulit. Kerja sama dengan organisasi jurnalis seperti AJI, PWI, IJTI, atau organisasi jurnalis profesional, perguruan tinggi dan mahasiswa akan memungkinkan mendorong lahirnya penulis-penulis produktif dari desa.

Pelatihan menulis, fotografi, pembuatan video, manajemen redaksi, mengelola media sosial dan pengetahuan lainnya juga harus dilakukan untuk memperkuat kehadiran media desa. Materi pendidikan jurnalis yang diberikan dapat berupa jurnalisisme dasar, teknik wawancara, menulis berita *hardnews*, menulis berita feature dengan bentuk humanis, inspiratif dan menggugah. Objek latihan menulis, fotografi dan video dapat menggunakan potensi yang ada di dalam desa seperti potensi wisata, budaya, kuliner, produk wirausaha desa dan lainnya. Langkah ini tidak sulit dilakukan saat ini bila disokong dengan Dana Desa (DD) yang disepakati bersama masyarakat.

Pendidikan kejournalistikan dan manajemen media desa harus diberikan secara bertahap disokong dengan dana desa. Bila dirasa sumber daya desa yang dilatih sudah cukup mumpuni untuk mengelola media desa maka dapatlah diputuskan media desa seperti apa yang harus dibangun, apakah media desa berbasis daring, atau cetak. Ini disesuaikan dengan kondisi desa termasuk ketersediaan akses internet dan listrik.

Lahirnya media desa selain mengabarkan soal potensi desa dalam bentuk berita juga dapat dikolaborasikan dengan sistem jual beli hasil pertanian, wirausaha termasuk promosi wisata desa. Media desa juga dapat mengembangkan diri menjadi beragam bentuk layanan jasa dan kebutuhan masyarakat lainnya.

Kesimpulan

Jurnalisme desa yang mengkrystal dalam hadirnya media desa dapat membantu perkembangan dan pengentasan kemiskinan. Ada banyak peluang yang dapat tercipta dengan lahirnya media desa yang dikelola secara mandiri oleh warga desa secara total dan komitmen. Hadirnya media desa dapat menambal lubang kesenjangan pemberitaan desa dan kota yang sudah lama terjadi saat ini.

Hadirnya media desa sudah barang tentu ikut membantu mengentaskan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat terutama pemuda menjadi jurnalis desa yang handal dan profesional layaknya jurnalis pada media arus utama. Media desa diyakini akan dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah terhadap program-program pembangunan di perdesaan.

Membangun media desa tentu saja memiliki sejumlah tantangan seperti penyiapan sumber daya desa, hingga terbatasnya akses internet dan listrik di sejumlah desa di Indonesia. Namun, tantangan ini akan menjadi sebuah peluang bila masyarakat desa memiliki komitmen dan totalitas yang baik untuk hadirnya sebuah media desa yang mengusung kepentingan warga desa.

Sebagai jalan keluar atas tantangan tersebut desa-desa di tanah air dapat melakukan kerja sama dengan sejumlah lembaga



profesi jurnalis yang saat ini hadir di tingkat kabupaten-kabupaten di Indonesia, seperti AJI, PWI IJTI dan lainnya. Kolaborasi dan membangun jaringan dengan perguruan tinggi juga merupakan langkah tepat untuk melahirkan jurnalisme di desa.

Hal terpenting lainnya adalah komitmen pendanaan dari desa di tahap awal mendirikan media massa juga perlu dilakukan dengan jumlah dana yang rasional dan harus dipertanggungjawabkan pada masyarakat desa setempat.

Firmansyah, Lahir di Plaju, 26 September 1983. Pria yang sehari-hari bekerja sebagai wartawan di Kompas.com wilayah Bengkulu ini merupakan mahasiswa aktif di Program Studi Magister Ilmu Komunikasi, FISIP Universitas Bengkulu. Pria yang pernah mengikuti Liputan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) *Confrence of Parties* (COP) tentang Perubahan Iklim ke 21 di Paris, Prancis pada tahun 2015 dan peraih Penghargaan Media Award Liputan Konflik Agraria digelar Konsorsium Pembaruan Agraria digelar Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) pada tahun 2016 ini juga tercatat sebagai anggota Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi Bengkulu Periode 2018-2021. Wa : +62 812-7921-6384. Surel: firmansyah.kompas@gmail.com.





Memupuk Modal Sosial melalui Komunikasi Sains: Sebuah Strategi Kebijakan Meningkatkan Daya Lenting Masyarakat Desa dalam Menghadapi Pandemi¹⁶

Angga Wijaya Holman Fasa, Uus Faizal Firdausy, dan Sanusi

Modal sosial memegang peranan penting dalam proses penciptaan kohesi sosial, terlebih dalam menghadapi kondisi bencana di mana interaksi tolong-menolong antaranggota

¹⁶ Tulisan disajikan untuk *Call for Papers* Kongres Kebudayaan Desa, Desa Panggunharjo, 1 Juni-15 Agustus 2020.

masyarakat menemukan urgensinya. Berbeda dengan instrumen fisik, modal sosial tidak akan habis jika dipergunakan, melainkan semakin meningkat kualitasnya.¹⁷ Dengan kata lain, rusaknya modal sosial lebih sering disebabkan bukan karena dipakai, melainkan karena ia tidak dipergunakan. Absennya modal sosial di masyarakat dapat mengakibatkan berkurangnya daya rekat sosial.

Berkenaan dengan konteks mutakhir, penyebaran sindrom pernapasan virus Corona (Covid-19) tidak semata-mata menimbulkan masalah kesehatan publik. Karena begitu masif penyebarannya, pandemi ini telah menimbulkan persoalan lain pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, antara lain persoalan ekonomi, politik, pertahanan, keamanan, sosial, bahkan budaya. Tanpa disadari, perubahan pada berbagai aspek tersebut turut mengubah perilaku masyarakat di seluruh dunia, termasuk cara pandang antarsesama manusia. Perubahan perilaku dan cara pandang antarsesama manusia ini juga terjadi di Indonesia sebagai dampak pandemi Covid-19.¹⁸

Seiring bertambahnya jumlah pasien sejak medio Maret 2020, timbul kecemasan di tengah masyarakat terhadap pandemi ini. Alih-alih menumbuhkan rasa solidaritas sosial, reaksi psikologis ini justru berubah menjadi rasa takut berlebihan yang diselimuti stigma negatif terhadap pasien Covid-19. Tidak sekadar terjadi pada masyarakat perkotaan yang kerap diasosiasikan berkultur patembayan (*gesselschaft*), fenomena ini pun menghinggapi

-
- 17 Wijanarko, Mochamad. (2016). "Modal Sosial Masyarakat Desa Rahtawu: Studi Kasus Pelestarian Hutan Muria di Kabupaten Kudus", Jurnal Masyarakat dan Budaya, Volume 18 No. 1 Tahun 2016.
- 18 Rizkiayu, Anita, "Salah Kaprah Stigmatisasi dan Diskriminasi terhadap Pasien Covid-19", <https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/13/164454765/salah-kaprah-stigmatisasi-dan-diskriminasi-terhadap-pasien-covid-19?page=all> (diakses 07 Juli 2020).

masyarakat perdesaan yang berkultur paguyuban (*gemeinschaft*) menurut dikotomi sosiologis Tonnies.¹⁹ Peristiwa pengasingan sosial pada salah satu dusun di daerah Jawa Timur di mana akibat terdapat beberapa warganya yang menjadi pasien Covid-19, seluruh warga kampung terkena stigma dan terisolasi. Bahkan, akibat perlakuan itu para warga yang profesinya sebagai pedagang sayur keliling hilang mata pencahariannya, demikian juga para pekerja harian yang sering beraktivitas di luar dusun²⁰. Selain itu, terdapat pula jenis praktik stigmatisasi berupa penolakan jenazah, penolakan petugas pemakaman, dan petugas medis. Dengan kata lain, stigma yang melekat pada seseorang atau sekelompok orang tertentu membuat penerima stigma menerima perlakuan diskriminatif dari kelompok mayoritas, sehingga mereka merasa tertolak oleh lingkungannya.

Fenomena sosial ini menjadi anakronisme dengan kondisi ideal yang seyogyanya terjadi di masyarakat, yakni kohesi sosial yang berkelindan dengan aksi solidaritas sosial. Pada satu sisi terlihat bahwa solidaritas sosial masyarakat Indonesia begitu tinggi dan sangat responsif, dengan sigap, setiap ada bencana, masyarakat Indonesia selalu mengulurkan tangan untuk saling membantu dan menolong. Namun di sisi lain terdapat tantangan kecenderungan praktik pengasingan sosial. Karena Covid-19, sikap dan perilaku masyarakat Indonesia yang *guyub* dan gemar bergotong royong hasil pengejawantahan norma-norma sosial yang bersifat informal—

19 Tonnies, Ferdinand. (2001). *Community and Civil Society*. Terj: Jose Harris dan Margaret Hollies. Cambridge: Cambridge University Press.

20 "Dapat Stigma Negatif Gara-gara Covid-19, Warga Satu Dusun di Ngawi Dicap Sebagai Kampung Corona", rmojlatim.id/2020/05/14/dapat-stigma-negatif-gara-gara-covid-19-warga-satu-dusun-di-ngawi-dicap-sebagai-kampung-corona/ (diakses 07 Juli 2020).



meminjam istilah Fukuyama²¹, sebagai salah satu bagian dari modal sosial, menjadi tergerus. Padahal modal sosial masyarakat adalah peran vital dalam menumbuhkan kohesi sosial, terlebih di kala bencana.

Modal Sosial dan Daya Lenting Masyarakat

Dalam menghadapi kondisi bencana, dibutuhkan daya lenting masyarakat. Daya lenting yang dimaksud di sini adalah kemampuan sebuah sistem, komunitas, atau masyarakat yang terpapar ancaman bahaya untuk bertahan, menyerap, berakomodasi, dan pulih dari dampak-dampak sebuah ancaman bahaya dengan tepat pada waktunya dan secara efisien, termasuk melalui pemeliharaan dan pemulihan struktur-struktur dan fungsi-fungsi dasar yang paling mendasar.²² Dengan kata lain, proses pemulihan dan pengentasan bencana bergantung pada ketersediaan modal sosial untuk mengelola kondisi bencana yang dialaminya.

Pentingnya memupuk modal sosial di masyarakat dalam menjaga daya lenting masyarakat dalam menghadapi bencana seperti keadaan pandemi sesuai dengan penjelasan Sima²³ yang menunjukkan cara-cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan daya lenting masyarakat terhadap bencana. *Pertama*, advokasi kesadaran (*awareness advocacy*) terhadap bencana. *Kedua*, peran kolektif komunitas dalam upaya pengurangan risiko bencana di

21 Fukuyama, Francis. (2002). *Trust: Kebajikan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran*. Yogyakarta: Penerbit Qalam.

22 Asian Disaster Reduction and Response Network (2010), *Terminologi Pengurangan Risiko Bencana*, Bangkok: UNISDR Asia and the Pacific Office.

23 Sima, Biondi (2016). "3 Cara Meningkatkan Daya Lenting terhadap Bencana", <https://openstreetmap.id/english-3-ways-to-strengthen-disaster-resilience-lessons-learned-from-indonesia/> (diakses 07 Juli 2020).

mana partisipasi warga menjadi tumpuan dalam proses tanggap dan mitigasi bencana. *Ketiga*, ketersediaan data dan informasi yang andal dan valid serta dapat diakses dengan mudah dan aplikatif. Khusus cara yang kedua, partisipasi aktif warga, muncul dari kesadaran kolektif untuk produktif menghasilkan karsa dalam menghadapi bencana.

Karsa untuk produktif tersebut sesuai dengan pendapat Putnam²⁴ mengenai modal sosial yaitu produk relasi manusia satu sama lain, khususnya relasi yang intim dan konsisten yang mengacu pada jaringan, norma, dan kepercayaan yang berpotensi pada produktivitas masyarakat. Sementara itu, Burt²⁵ mendefinisikan modal sosial adalah kemampuan masyarakat untuk melakukan hubungan keterikatan satu sama lain dan untuk kemudian menjadi kekuatan yang sangat penting bagi setiap aspek eksistensi sosial. Cohen dan Prusak²⁶ berpendapat bahwa modal sosial adalah setiap hubungan yang terjadi dan diikat oleh suatu kesalingpercayaan (*trust*), kesepahaman (*mutual understanding*), dan nilai-nilai bersama (*shared value*) yang mengikat anggota kelompok untuk membuat aksi kolektif dapat dilakukan secara efisien dan efektif. Dengan demikian, modal sosial merupakan sumber daya yang memegang peranan penting dalam praktik solidaritas warga yang timbul apabila terpupuknya nilai-nilai kebersamaan sehingga merekatkan relasi antarwarga untuk produktif.

24 Putnam, Robert. (1993). "The Prosperous Community: Social Capital and Public Life", The American Prospect, Volume 13.

25 Burt, Ronald S. (1992). "Excerpt from The Social Structure of Competition", dalam *Structure Holes: The Social Structure of Competition*. Cambridge, MA and London: Harvard University Press.

26 Cohen, S., dan Prusak L. (2001). *In Good Company: How Social Capital Makes Organization Work*. London: Harvard Business Press.



Pada masyarakat perdesaan (*rural communities*), modal sosial tidak dianggap sebagai kekayaan yang sifatnya tertutup dan terbatas, yang hanya melanggengkan mitos dan pelestarian tradisi, namun sangat terkait dengan ide wilayah dan identitas budaya. Ketika modal sosial membawa manfaat positif, modal sosial cenderung dikaitkan dengan pluralitas identitas budaya, sejumlah besar jaringan hubungan sosial yang beragam, percampuran dan jalinan spasial.²⁷ Dengan kata lain, selain keterikatan spasial, bagi masyarakat perdesaan, identitas budaya memegang peranan penting dalam pembentukan modal sosial.

Salah satu wujud identitas budaya di Indonesia adalah gotong royong yang berarti bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan. Sikap gotong royong memiliki nilai moral yang tinggi, seperti ikhlas untuk berpartisipasi, kebersamaan, dan saling membantu antarsesama karena lebih mengutamakan kepentingan bersama. Sifat gotong royong pada dasarnya memiliki tujuan yang sama walaupun di perdesaan sifat gotong royong dan kekeluargaan lebih menonjol daripada di perkotaan. Menurut Koentjaraningrat²⁸ gotong royong atau tolong menolong dalam komunitas kecil bukan saja terdorong oleh keinginan spontan untuk berbakti kepada sesama, tetapi dasar tolong menolong adalah perasaan saling membutuhkan yang ada dalam jiwa masyarakat. Dengan demikian, berkenaan dengan modal sosial nilai-nilai gotong royong adalah bentuk modal sosial yang telah tumbuh pada masyarakat Indonesia.

27 Jo Lee, Arnar Árnason, Andrea Nightingale dan Mark Shucksmith (2005). "Networking: Social Capital and Identities in European Rural Development", *Sociologia Ruralis*, Volume 45, Nomor 4.

28 Koentjaraningrat (2002). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Daya Lenteng Masyarakat Desa di Masa Pandemi

Modal sosial menyajikan gambaran tentang kebersamaan masyarakat, persatuan, dan rasa saling mempercayai guna mampu melalui bencana yang dialami. Agar memiliki daya lenteng terhadap bencana pandemi, suatu masyarakat desa harus memiliki tingkat derajat modal sosial tertentu agar mampu mengelola ketidakpastian yang dihadapi masyarakat di kala pandemi. Untuk menghadapi tantangan dan ketidakpastian selama pandemi, masyarakat harus duduk bersama untuk memitigasi ancaman bencana tersebut. Ketika derajat modal sosial di masyarakat tinggi, upaya meminta anggota masyarakat mempraktikkan perubahan perilaku demi memutus rantai penularan COVID-19 akan menjadi lebih mudah. Untuk kepentingan bersama, anggota masyarakat akan dengan sukarela melakukan setiap yang diminta guna memutus rantai penyebaran COVID-19.²⁹ Namun apabila derajat nilai modal sosial di suatu masyarakat rendah maka penanganan pandemi ini akan sangat berat untuk dilakukan dan bahkan memiliki dampak sosial yang berbahaya.

Tingkatan derajat modal sosial pada masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci seperti yang disebutkan Lee, Rianti, & Park³⁰, yaitu faktor internal masyarakat meliputi karakteristik individu dan pengetahuan masyarakat, sedangkan faktor eksternal antara lain penyuluhan dan akses terhadap informasi.

29 Rawat, S., & Wu, A. M. (2020). "Why social capital is essential in the fight against COVID-19". Retrieved July 25, 2020, from <https://www.policyforum.net/why-social-capital-is-essential-in-the-fight-against-covid-19/>.

30 Lee, Y., Rianti, I. P., & Park, M. S. (2017). "Measuring social capital in Indonesian community forest management". *Forest Science and Technology*, 13(3), 133-141. <https://doi.org/10.1080/21580103.2017.1355335>



Kejadian praktik pengasingan sosial terhadap pasien Covid-19 seperti yang terjadi terhadap warga Dusun Karakan, Sidomoyo, Godean DIY Yogyakarta³¹, Konawe Selatan³², dan Minahasa Utara³³ menunjukkan tingginya faktor eksternal dalam menurunkan derajat modal sosial di masyarakat. Kasus yang terjadi di Dusun Karakan di mana warga satu dusun dikucilkan oleh warga dusun lain disebabkan oleh beredarnya kabar bohong yang menyatakan warga dusun tersebut banyak yang terinfeksi Covid-19.³⁴ Akibat berita bohong ini, banyak warga Dusun Karakan yang diberhentikan sementara dari pekerjaannya yang pada akhirnya mempengaruhi ekonomi warga dusun tersebut. Warga desa di Indonesia yang dikenal memiliki semangat *guyub* dan gotong royong bisa sampai mengucilkan anggota masyarakat yang lain karena kabar bohong yang beredar di antara warga desa. Hingga bulan Mei 2020 saja Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebutkan telah ada 600 berita bohong terkait pandemi Covid-19.³⁵

Sebab lain turunnya derajat modal sosial selama masa pandemi Covid-19 adalah adanya rasa takut berlebihan terhadap pandemi.

31 Harianjogja.com. (2020). "Gara-Gara Hoaks Corona, Warga Sedusun di Godean Dikucilkan". Retrieved July 25, 2020, from <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2020/07/05/512/1043583/gara-gara-hoaks-corona-warga-sedusun-di-godean-dikucilkan>

32 Telisik.id. (2020). "Positif COVID-19, Warga Terpenjara di Kampung Sendiri". Retrieved July 25, 2020, from <https://telisik.id/news/positif-covid-19-warga-terpenjara-di-kampung-sendiri>

33 kumparan.com. (2020). "Dapat Stigma ODP dari Warga, Keluarga di Sulut Ini Terpaksa Tinggal di Mobil". Retrieved July 26, 2020, from <https://kumparan.com/manadobacirita/dapat-stigma-odp-dari-warga-keluarga-di-sulut-ini-terpaksa-tinggal-di-mobil-1tEHqym5XgS>

34 Harianjogja.com, *ibid*.

35 detik.com. (2020). "Kominfo: 110 Hoax Terkait Corona Sudah Dilaporkan ke Polisi". Retrieved July 26, 2020, from <https://news.detik.com/berita/d-5062489/kominfo-110-hoax-terkait-corona-sudah-dilaporkan-ke-polisi>.

Keadaan ini disebut dengan istilah *hypochondriasis* atau suatu kondisi di mana seseorang sangat khawatir bahwa dirinya bisa terjangkit suatu penyakit dan akan sangat sakit karenanya.³⁶ Kejadian seperti di Minahasa Utara di mana satu keluarga terpaksa tinggal di hutan demi menghindari stigma negatif karena ketakutan berlebihan dari masyarakat di sekitar mereka karena keluarga tersebut tinggal berdekatan dengan keluarga yang merupakan pasien positif Covid-19.³⁷ Dampak lebih besar bahkan dialami oleh warga satu desa, yaitu Kosebo di Kabupaten Konawe Selatan yang diasingkan oleh penduduk desa lainnya, seperti jika mereka hendak berbelanja ke pasar.³⁸

***Hypochondriasis* dan Berita Bohong**

Penyebab menurunnya modal sosial secara drastis di masyarakat desa, baik karena faktor eksternal yakni termakan oleh kabar bohong (*fake news*) dan juga karena faktor internal yaitu rasa takut berlebihan akan menjadi sakit keras karena terkena Covid-19 (*hypochondriasis*) merupakan dua faktor utama yang saling berkaitan. Sebagian besar masyarakat mengetahui bahwa Covid-19 adalah pandemi yang disebabkan oleh infeksi virus yang bisa menjangkit dari manusia ke manusia. Apalagi pengobatan baik secara medis maupun vaksin untuk virus ini belum tersedia. Jadi tidaklah mengherankan jika semua masyarakat seperti halnya masyarakat desa merasa ketakutan ketika pandemi ini melanda. Ketakutan ini juga dipicu karena masyarakat belum banyak mengetahui tentang virus penyebab

36 Laato, S., Islam, A. K. M. N., Islam, M. N., Whelan, E., & Fi, S. (2020). "Why do People Share Misinformation during the COVID-19 Pandemic?" Retrieved from <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters>.

37 Kumparan.com, *ibid*.

38 Telisik.id, *ibid*.



pandemi ini secara khusus maupun virus secara umum. Oleh karena itu, hal yang alamiah dilakukan masyarakat adalah berusaha mencari jawaban dan penjelasan atas permasalahan yang dihadapi. Namun masalahnya, informasi yang beredar dan yang sampai ke masyarakat desa banyak yang merupakan berita salah (*missinformation*), berita bohong (*dissinformation*), maupun informasi yang tidak memiliki landasan sains yang benar (*fake science news* dan *pseudoscience*). Kombinasi *hypochondriasis* dan berita bohong akhirnya menjadi kombinasi yang sempurna dalam menciptakan bencana sosial pada saat bencana pandemi melanda dan secara drastis menurunkan derajat modal sosial di masyarakat.

Berita bohong atau yang kita kenal sebagai berita *hoax* saat ini ada di mana-mana. Di mana ada berita bohong, maka di situ juga ada berita sains palsu atau *fake sains*. Dalam ranah yang lebih subtil dikenal sebagai *pseudoscience*. Berita sains bohong maupun *pseudoscience* bukan hal baru di Indonesia, seperti dipercayanya bahwa memakan semangka bersamaan dengan gula ataupun minum kopi bisa berakibat fatal atau kematian. Apalagi dengan berkembangnya internet dan media sosial saat ini, berita sains bohong sangat mudah sekali menyebar hingga ke pelosok desa dan memiliki potensi yang jauh lebih berbahaya dari sebelumnya. Sebagai contoh bahaya berita sains bohong yang terjadi selama masa pandemi Covid-19 adalah terjadinya kasus warga desa Yapacani di Bolivia yang menghancurkan tiang pemancar sinyal telepon seluler karena menganggap tiang pemancar tersebut menyebarkan virus Corona.³⁹

39 Tribun banyumas. (2020). "Takut Tertular Virus Corona Melalui Jaringan 5G, Warga Desa Ini Hancurkan 4 Tower Telekomunikasi". Retrieved July 9, 2020, from <https://banyumas.tribunnews.com/2020/06/16/takut-tertular-virus-corona-melalui-jaringan-5g-warga-desa-ini-hancurkan-4-tower-telekomunikasi>.

Di Indonesia sendiri pun terjadi, di mana dua desa saling memblokir jalan dengan membangun dinding di tengah jalan batas desa antara Desa Sambigede dan Desa Sumberpucung Kabupaten Malang Jawa Timur yang disebabkan karena salah paham dalam memaknai istilah *Physical distancing*.⁴⁰

Relasi Disinformasi, Komunikasi Sains, Modal Sosial, dan Daya Lenting Masyarakat

Ketika kita mengetahui dampak berbahayanya apabila modal sosial di masyarakat mengalami penurunan dan menyebabkan daya lenting masyarakat dalam menghadapi pandemi semakin rapuh, maka pertanyaannya adalah apakah tidak ada yang telah dilakukan baik oleh masyarakat maupun pemerintah dalam menasar permasalahan tersebut. Jawabannya tentu saja pemerintah maupun komponen masyarakat telah banyak melakukan upaya, seperti sosialisasi mengenai Covid-19 oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.⁴¹ Hampir setiap hari juru bicara tim gugus tugas muncul di TV untuk memberikan perkembangan terkait pandemi. Selain itu, pemerintah juga memasang berbagai baliho sosialisasi di setiap penjuru desa dan para kepala desa pun banyak yang telah melakukan sosialisasi terkait pandemi Covid-19 ini.⁴²

40 GridMotor.ID. (2020). "Koplak, Gara-gara Virus Corona, Video Dua Desa Saling Blokir Jalan, Diawali Pakai Portal, Dibalas Dengan Tembok Beton." Retrieved July 9, 2020, from <https://gridmotor.motorplus-online.com/read/292146783/koplak-gara-gara-virus-corona-video-dua-desa-saling-blokir-jalan-diawali-pakai-portal-dibalas-dengan-tembok-beton?page=all>

41 covid19.go.id. (2020). "Empat Strategi Pemerintah Atasi COVID-19 - Berita Terkini | Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19". Retrieved July 26, 2020, from <https://covid19.go.id/p/berita/empat-strategi-pemerintah-atasi-covid-19>

42 Antaranews.com. (2020). "Cegah penyebaran virus COVID-19 dimulai dari desa" - ANTARA News. Retrieved July 26, 2020, from <https://www.antaranews.com/berita/1372646/cegah-penyebaran-virus-covid-19-dimulai-dari-desa>



Upaya yang telah banyak dilakukan oleh pemerintah dinilai masih belum mampu meningkatkan modal sosial di masyarakat. Pemerintah dinilai masih menggunakan bahasa elitis yang sulit dicerna oleh sebagian besar masyarakat Indonesia terutama masyarakat perdesaan. Penggunaan istilah-istilah sulit dalam sosialisasi terkait Covid-19 membuat masyarakat tidak memahami apa yang dimaksud oleh pemerintah.⁴³ Di tengah gempuran misinformasi dan disinformasi serta kondisi *hypochondriosis* di masyarakat membuat informasi yang disebar oleh pemerintah dengan bahasa elitis tersebut semakin sulit diterima oleh masyarakat yang menyebabkan beban kognitif berlebihan bagi masyarakat dan selanjutnya mengakibatkan kelelahan dalam mencerna informasi. Sekali masyarakat telah mengalami kelelahan, maka hal tersebut dapat memicu insting bertahan hidup manusia⁴⁴, seperti melakukan pengasingan secara berlebihan terhadap anggota masyarakat yang keluarganya ada yang terkena virus Corona, pengusiran tenaga medis, bahkan menolak jenazah pasien Covid-19 di daerahnya.

Upaya yang bisa ditempuh untuk mengatasi hal ini adalah dengan melakukan program komunikasi sains. Sains yang berasal dari Bahasa Latin "*Scientia*" berarti ilmu pengetahuan dan komunikasi sains secara umum diartikan sebagai upaya menyampaikan fakta-fakta ilmu pengetahuan kepada khalayak awam. Dalam hal ini, komunikasi sains berupaya menyampaikan pemahaman mengenai fakta-fakta ilmiah seputar pandemi dan virus penyebab pandemi

43 theconversation.com. (2020). "Akademisi: pemerintah masih gunakan bahasa langit dalam komunikasi COVID-19". Retrieved July 26, 2020, from <https://theconversation.com/akademisi-pemerintah-masih-gunakan-bahasa-langit-dalam-komunikasi-covid-19-134805>

44 Laato, *ibid.*

tersebut agar mampu dipahami oleh masyarakat awam terutama masyarakat di perdesaan.

Komunikasi Sains sebagai Strategi Kebijakan

Kondisi ketakutan yang berlebihan atau *hypochondriasis* dan kondisi di mana masyarakat mengalami kelelahan informasi yang menyebabkan sulitnya membedakan antara kabar akurat dan kabar bohong telah meruntuhkan modal sosial di masyarakat. Kondisi tersebut menurut Bavel⁴⁵ menekankan pentingnya komunikasi sains yang efektif sebagai suatu strategi kebijakan dalam menangani berbagai bentuk misinformasi selama pandemi Covid-19 mulai dari teori konspirasi, berita sains bohong, dan misinformasi.

Teori Konspirasi mulai muncul sejak awal mula munculnya pemberitaan mengenai wabah Covid-19 di Wuhan RRT. Isu-isu teori konspirasi yang beredar secara global antara lain yang menyatakan bahwa virus Corona baru ini adalah senjata biologi buatan RRT, ada juga teori konspirasi yang menyatakan virus ini dibuat oleh Bill Gates⁴⁶, dan bahkan ada teori konspirasi yang menyatakan bahwa virus Corona baru ada hubungannya dengan jaringan seluler generasi ke lima atau 5G⁴⁷. Di Indonesia teori konspirasi ini semakin menjadi

45 Bavel, J. J. V., Baicker, K., Boggio, P. S., Capraro, V., Cichocka, A., Cikara, M., Willer, R. (2020, May 1). "Using social and behavioural science to support COVID-19 pandemic response". *Nature Human Behaviour*, Vol. 4, pp. 460–471. <https://doi.org/10.1038/s41562-020-0884-z>

46 liputan6.com. (2020). "Deretan Teori Konspirasi Virus Corona COVID-19 dan Fakta di Baliknyaa" – Global Liputan6.com. Retrieved July 26, 2020, from <https://www.liputan6.com/global/read/4241720/deretan-teori-konspirasi-virus-corona-covid-19-dan-fakta-di-baliknyaa>

47 bbc.com. (2020). "Covid-19: Disinformasi dan teori konspirasi soal virus corona yang menelan korban jiwa" - BBC News Indonesia. Retrieved July 26, 2020, from <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-52821352>



perbincangan setelah berbagai pesohor tanah air, seperti Young Lex, Deddy Corbuzier, dan Jerinx mempercayai bahwa kejadian pandemi ini sebagai konspirasi global.⁴⁸ Melakukan komunikasi sains dengan menyuguhkan informasi sains faktual sebelum terpapar teori konspirasi akan mengurangi tingkat kepercayaan terhadap teori konspirasi.

Berita bohong dan misinformasi mengenai Covid-19 banyak menyebar melalui media sosial. Kegiatan komunikasi sains seperti pengecekan fakta tentang pemberitaan tersebut, menyuguhkan pendapat para ahli virus, dan mengoreksi misinformasi yang sudah telanjur tersebar terlihat cukup efektif dalam membantah misinformasi yang telah beredar. Namun dengan derasnya arus misinformasi selama pandemi, kegiatan memeriksa fakta dan memberikan informasi bantahan dibandingkan dengan ketersediaan sumber daya untuk melakukannya, kemungkinan besar tidak mencukupi untuk menangani seluruh misinformasi yang telah beredar dan tersebar luas di masyarakat⁴⁹.

Guna memersuasi, dalam ranah komunikasi sains, terdapat dua hal yang harus diperhitungkan, hal pertama yaitu kredibilitas penyampai pesan dan kedua adalah pesan seperti apa yang akan diterima oleh khalayak yang dituju. Kredibilitas pihak penyampai pesan sangat berpengaruh pada penerimaan pesan tersebut. Membuat program komunikasi sains yang disampaikan oleh pihak yang dipercaya oleh masyarakat telah terbukti efektif mampu mengubah perilaku masyarakat selama pandemi. Sebagai contoh,

48 Tirto.id. (2020). "Sesat Pikir Teori Konspirasi Deddy, Young Lex, dan Jerinx". Retrieved July 26, 2020, from <https://tirto.id/sesat-pikir-teori-konspirasi-deddy-young-lex-dan-jerinx-ffr4>

49 Bavel, *ibid*.

selama kasus pandemi Ebola yang terjadi di Afrika Barat, para tokoh agama dari berbagai agama mengampanyekan untuk mencuci tangan dan pemakaman yang aman. Keterlibatan para pemuka agama diakui sebagai titik balik dalam penanganan pandemi yang terjadi di Afrika Barat tersebut⁵⁰. Oleh karena itu, upaya untuk menemukan orang yang memiliki kredibilitas di mata masyarakat desa guna menyampaikan pesan-pesan komunikasi sains menjadi sangat penting guna keberhasilan program komunikasi tersebut.

Hal kedua yang menjadi perhatian adalah pesan seperti apa yang harus disampaikan. Pesan-pesan persuasif komunikasi sains yang memiliki kemungkinan efektif adalah pesan yang menunjukkan manfaat bagi masyarakat untuk mengikuti anjuran kesehatan dalam menghadapi pandemi. Misalnya saja, pesan yang berfokus untuk melindungi orang tercinta seperti memakai masker atau anjuran untuk menunda mudik demi melindungi keluarga di kampung halaman. Pesan mana yang terbaik kembali lagi tergantung dari motivasi khalayak itu sendiri.

Menemukan pesan yang tepat untuk perubahan sikap memang penting, namun hal yang lebih penting adalah bagaimana sikap tersebut mampu mengubah perilaku masyarakat. Caranya adalah dengan memberikan pemahaman dan meyakinkan pada masyarakat bahwa sikap barunya tersebut merupakan nilai moral yang harus dimiliki oleh semua masyarakat dalam menangani pandemi saat ini. Oleh karena itu, memahami setiap karakteristik masyarakat desa yang tersebar di seluruh Indonesia akan sangat berguna dalam menentukan komunikasi sains yang tepat untuk dilakukan.

50 Bavel, *ibid.*



Pemahaman ini penting, selain untuk diperolehnya dukungan masyarakat terhadap kebijakan komunikasi sains yang dijalankan, juga untuk memastikan dipraktikannya perilaku yang dibutuhkan guna menanggulangi penyebaran virus penyebab pandemi Covid-19 ini.

Bavel⁵¹ memaparkan pendekatannya yang berfokus pada mengurangi dampak bahaya sosial yang disebabkan *hypochondriasis* dan berita bohong yang terjadi selama pandemi berlangsung. Program komunikasi dalam bentuk pendidikan informal berupa dongeng sains dan aktivitas praktik sains dapat meningkatkan literasi sains pada generasi muda dan dalam jangka panjang dapat mencegah ketakutan yang berlebihan, seperti fenomena *chemophobia* yang terjadi di masyarakat⁵². Kegiatan seperti ini dapat menumbuhkan sikap ilmiah dan memberikan pemahaman mengenai dunia di sekitar mereka dan memungkinkan mereka bereaksi secara efektif dalam membuat keputusan terkait isu-isu yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan seperti kasus pandemi yang mempengaruhi seluruh kehidupan kita saat ini. Memberikan pemahaman ilmu pengetahuan kepada masyarakat secara tepat dan membangun jiwa ilmiah di masyarakat diharapkan mampu menjadi “vaksinasi” yang ampuh dalam menangkal berita sains palsu atau *hoax* dalam ilmu pengetahuan⁵³. Hal ini penting karena *hoax* dalam ilmu pengetahuan

51 Bavel, *ibid.*

52 Morais, C. (2015). “Storytelling with chemistry and related hands-on activities: Informal learning experiences to prevent “chemophobia” and promote young children’s scientific literacy”. *Journal of Chemical Education*, 92(1), 58–65. <https://doi.org/10.1021/ed5002416>

53 European Research Council. (2019). “What it takes to “understand”. Looking for antidotes to fake news”. Retrieved July 13, 2020, from <https://erc.europa.eu/news/what-it-takes-understand-looking-antidotes-fake-news>

memiliki konsekuensi yang sangat besar termasuk konflik horizontal bahkan nyawa.

Penutup

Komunikasi sains sebagai sebuah strategi memupuk modal sosial bekerja dengan menyorot faktor-faktor kunci yang menentukan tingkat derajat modal sosial pada masyarakat seperti yang disebutkan Lee⁵⁴, yaitu faktor internal masyarakat seperti karakteristik individu dan pengetahuan masyarakat, serta faktor eksternal seperti adanya penyuluhan dan akses terhadap informasi. Komunikasi sains pada saat pandemi akan menjadi faktor eksternal yang memberikan akses informasi ilmiah yang mudah dicerna bagi masyarakat desa dalam memaknai pandemi Covid-19 ini.

Kolaborasi antara komunikasi sains dengan modal sosial yang telah ada dan dianut dalam setiap sendi masyarakat perdesaan diharapkan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya mendahulukan sikap kebersamaan, gotong royong, dan saling menolong. Karena sesungguhnya itulah sikap-sikap yang selama ini telah ada dan berakar di masyarakat Indonesia. Hadirnya komunikasi sains diharapkan dapat mengubah pengetahuan masyarakat desa tentang bencana pandemi ini sehingga mampu mengajak masyarakat untuk menerapkan sikap-sikap baru yang mencerminkan modal sosial yang tinggi. Hadirnya sikap-sikap baru ini diharapkan mampu menghadirkan lingkungan sosial yang lebih ramah sehingga tidak ada lagi stigmatisasi dan pengasingan, serta tumbuhnya rasa saling mempercayai antarkomponen desa. Dalam

54 Lee, *Ibid.*



jangka panjang komunikasi sains akan membentuk mental kritis masyarakat desa sehingga tidak akan dengan mudah terpengaruh oleh kabar bohong, tetap mengutamakan kebersamaan dan gotong royong, yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya lenting masyarakat ketika terjadi bencana.

Profil Penulis

Angga Wijaya Holman Fasa adalah merupakan seorang Analis Kebijakan di Biro Kerja Sama Hukum dan Hubungan Masyarakat LIPI. Alamat korespondensi: awijayahf@gmail.com

Uus Faizal Firdaussy adalah Pranata Humas di Pusat Pemanfaatan IPTEK dan Inovasi LIPI. Alamat korespondensi: uus.faizal@gmail.com

Sanusi adalah Peneliti Madya bidang Ekologi Manusia di Pusat Penelitian Kependudukan LIPI. Alamat korespondensi: mung.sanusi@gmail.com



Epilog

Kongres Kebudayaan Desa

Membaca Desa, Mengeja Ulang I-N-D-O-N-E-S-I-A:

Arah Tatahan Indonesia Baru dari Desa

Ryan Sugiarto

(Ketua Penyelenggara Kongres Kebudayaan Desa,

Ketua Yayasan Sanggar Inovasi Desa)

Pengantar: Cerita dari Ruang Kendali dan Operasi

Tepat dua hari sebelum Idulfitri (24 Mei 2020), ruang Pusdalop (Pusat Data dan Operasi) Balai Desa Panggunharjo masih tampak riuh. Sejumlah anak muda mengoperasikan komputer,

mengelola sistem informasi, dan menulis modul mitigasi Covid-19. Ruang ini merupakan tempat konsolidasi dan mitigasi Covid-19 Desa Panggungharjo. Dari ruangan ini pula beberapa langkah mitigasi klinis dan nonklinis (sosial, ekonomi, keamanan) Desa Panggungharjo disusun untuk memandu seluruh *stakeholder* desa bersama-sama melawan Covid-19.

Desa Panggungharjo melalui Panggung Tanggap Covid-19 (PTC-19) mengajarkan bagaimana desa tidak harus melakukan *lockdown* total, tetapi justru menjadi pemecah masalah Covid-19. Desa Panggungharjo dalam situasi darurat telah melakukan serangkaian pencegahan dengan aksi tanggap melalui identifikasi kondisi klinis harian warganya, baik secara fisik maupun psikologis. Desa Panggungharjo berinisiatif menghadirkan pelayanan dari negara untuk penanganan Covid-19 dengan mengedepankan penggunaan teknologi melalui dua platform utama yakni Platform Laport dan Platform Dukung.

Selain mitigasi klinis, ekonomi, dan sosial, desa juga mentransformasikan dirinya sebagai representasi negara yang paling depan untuk mengorganisir segala sumber daya. Pemerintah desa aktif menggerakkan kemampuan kerelawanan warga mulai dari logistik hingga bantuan nonfisik. Warga juga didorong menjadi warga negara aktif untuk saling membantu sesama dengan prinsip *tanggung renteng*. Semua dilakukan berbasis data desa.

Dari sisi mitigasi ekonomi, *pasardesa.id* menjadi platform penting pengelolaan ekonomi di tengah pandemi dan sesudahnya. Pasar desa menjadi *market place*—toko barang-barang warga desa—

agar ekonomi terus berputar di desa, alih-alih lari ke luar desa. *Tagline* berbagi belanja menjadi napas lini ini.

Bagaimana dari sisi tata pemerintahan dan pengaturan hidup bersama warga? Kongres Kebudayaan Desa disusun sebagai panduan merevisi rencana pembangunan jangka menengah desa. Tepat dua hari sebelum lebaran, gagasan ini dilahirkan sebagai respons terhadap pandemi dan bagaimana hidup serta kehidupan warga desa kemudian dirumuskan. Selama 2 minggu awal, konsep dirumuskan, kerangka acuan kerja dituliskan, 18 tema sekaligus *term of reference* disusun, ide digelindingkan. Dan kita tahu gagasan ini menjadi gerakan bersama. Cukup banyak jejaring kemudian turut mengusung gagasan ini, membantu dalam implementasi, pewacanaan gagasan, hingga perumusan-perumusan hasil Kongres Kebudayaan Desa. Pertanyaannya, kenapa Kongres Kebudayaan Desa?

Memahami Situasi di Tengah Pandemi

Bangunan kebudayaan Indonesia bukanlah sesuatu yang terberi (*given*) begitu saja. Kebudayaan Indonesia adalah hasil interaksi historis pelbagai kebudayaan nusantara, mulai dari Melayu, Jawa, Bugis, Papua, Aceh, dan suku bangsa lain yang hidup dalam ruang kultural dan sosial kepulauan nusantara. Interaksi historis kebudayaan Indonesia itu adalah bukti sejarah kebudayaan kita yang dinamis. Interaksi jalin menjalin antarkebudayaan-kebudayaan nusantara menghasilkan rona kebudayaan yang plural sebagai kekayaan negara bangsa kepulauan. Terdapat lebih dari 17.000 pulau di Indonesia yang terhubung melalui media laut, pelayaran, perdagangan, dan pertukaran-pertemuan antarkebudayaan sejak



berabad-abad lalu. Jadi, generalisasi bahwa kebudayaan Indonesia adalah umum dan abadi perlu kita kaji ulang.

Perubahan kebudayaan menempatkan manusia menjadi ekosistem hidup yang sangat berkuasa dengan teknologi yang ia miliki: mengeksploitasi alam habis-habisan dengan kecenderungan besar merusaknya, alih-alih hidup berdampingan dengan alam dan memeliharanya. Dengan teknologi, manusia memproduksi barang yang tak diperlukan. Nilai barang pun ditentukan oleh kemasan. Sebagai contoh, air yang seharusnya dimiliki oleh publik berubah kepemilikannya di tangan korporasi yang memproduksi dan mengemasnya dalam botol-botol plastik. Pertambahan nilai inilah yang menyebabkan harga air menjadi jauh lebih mahal ketimbang nilai aslinya.

Rantai produksi-konsumsi manusia pun semakin panjang. Pola ini mengingatkan kita bahwa dunia telah bergeser dari paradigma *kosmosentris* ke paradigma antroposentris. *Kosmosentris* memandang alam sebagai sesuatu yang sakral. Kosmos yang sakral membuat hidup manusia tidak terpisah dari alam. Dengan demikian, pada paradigma ini, manusia tidak melakukan perusakan terhadap lingkungan karena alam merupakan bagian tidak terpisahkan dari dirinya dan berada dalam pola relasi yang sederajat. Dalam paradigma antroposentrisme, manusia menjadi pusat segala sesuatu. Manusia sangat mengandalkan rasionalitas dan subjektivitas yang individualis. Hal ini berdampak pada pola relasi manusia dan alam. Pola relasinya menjadi *subordinatif* dan *dominatif*. Alam tidak lagi dipandang sakral dan tidak menjadi bagian dari dirinya sendiri. Alam dianggap sebagai benda mati yang bisa diatur. Akibatnya, manusia seenaknya melakukan eksploitasi

terhadap alam untuk kepentingan diri sendiri. Ujungnya, sistem ekonomi pun menjadi terbalik. Semula orang memproduksi untuk memenuhi kebutuhan, sementara sekarang sistem ekonomi berfokus menciptakan kebutuhan konsumsi (yang perlu atau tidak perlu) dan produksi pun mengikutinya. Akibat dorongan konsumsi yang selalu diciptakan dan produksi yang terus digenjut maka bumi kita pun menjadi korban. Bumi dieksploitasi habis-habisan. Kapitalisme neoliberal diamini meski bencana ekologis mengintip dan perlahan pasti datang.

Hari-hari ini manusia tengah menuai bencana itu. Sejak Desember 2019, pelan tapi pasti, dunia memasuki *retreat* yang panjang. Aktivitas berhenti, pemerintahan di seluruh dunia menghadapi virus Covid-19 yang belum ditemukan vaksinnya. Alam menunjukkan taringnya, mengurung manusia untuk tidak serakah. Manusia kemudian menjadi resah: ekonomi, agama, teknologi, birokrasi terkendala luar biasa. Negara-negara yang sebelum Covid-19 memberi jarak pada pengaturan ekonomi dan memberikan tempat seluas-luasnya kepada peran swasta melalui kapitalisme neoliberal kini kembali memainkan kendali penuh meski akhirnya tampak keteteran dan merapuh. Birokrasi yang menjadi kaki tangan negara macet. Semua orang frustrasi dan kecewa dengan gerak negara yang cenderung lamban berhadapan dengan Covid-19⁵⁵.

Di Indonesia, sejak pertengahan Maret 2020, seluruh pekerja kantor mengubah ritme kerjanya menjadi *work from home* (WFH). Kondisi ini menjadi pukulan telak di berbagai sektor kehidupan.

55 Wibowo, A. Setyo. 2020. "Covid 19: Meditasi Heideggerian". Dalam Majalah Basis, Nomor 05-06, Tahun ke 69 2020, hlm. 11.



Kelas menengah yang biasanya sibuk beraktivitas di berbagai tempat kini berdiam di rumah. Sektor informal bubar karena sepi aktivitas akibat pembatasan sosial berskala besar. Pekerja warteg, buruh bangunan, pedagang kecil, tukang parkir serabutan, pengemudi ojol dan taksi, sampai mal, kafe, gedung bioskop, hotel dan ruang-ruang diskusi serta seminar mengalami hibernasi. Saat roda ekonomi berhenti, risiko yang dihadapi ke depan semakin menyheramkan. Sebanyak 1,2-2 juta pekerja terkena PHK⁵⁶.

Angka kemiskinan yang sejak reformasi bergulir coba dikurangi, dalam sekejap naik berkali-kali lipat. Mereka yang sempat terangkat dari kemiskinan, akibat Covid-19 akhirnya kembali ke jurang kemiskinan. Bantalan dan jaring pengaman sosial diturunkan. Dana 110 triliun direlokasi menjadi bantuan sosial bagi masyarakat. Hingga 8 Mei 2020, 479 daerah telah menyampaikan laporan penyesuaian APBD. Dari laporan ini, komposisi belanja daerah mengalami perubahan, yaitu adanya penurunan belanja barang/jasa dari 24,87% menjadi 20,86% dan modal dari 18,16% menjadi 12,89%. Di sisi lain, ada kenaikan belanja lainnya, yaitu dari 24,63% menjadi 30,33% yang ditujukan untuk bansos dan belanja tidak terduga. Total belanja yang direalokasi dan *refocusing* sebesar Rp51,09 triliun, yang ditujukan untuk bidang kesehatan (Covid-19) sebesar Rp22,34 triliun, jaring pengaman sosial sebesar Rp18,88 triliun, dan penanganan dampak ekonomi sebesar Rp9,88 triliun⁵⁷.

56 Wibowo, A. Setyo. 2020. Ibid. Lihat pula <http://www.cnbcindonesia.com/news/20200408213040-4-150737/bikin-merinding-12-juta-pekerja-kena-phk-dirumahkan>.

57 <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/siaran-pers-perkembangan-ekonomi-dan-refocusing-anggaran-untuk-penanganan-covid-19-di-indonesia/>.

Selain dampak ekonomi, Covid-19 juga membawa dampak lain dalam kehidupan sosial masyarakat. Timbul rasa curiga dan hilangnya kepercayaan terhadap orang-orang di seputar kita, juga pada orang yang kita belum kenal. Sebagai contoh, saat membeli makanan, baik di rumah makan maupun warung kaki lima, ada kecurigaan yang muncul. Apakah pelayan bersentuhan dengan orang yang terjangkit virus atau tidak, apakah pekerja warung mencuci tangan pada saat mengolah makanan yang dipesan atau tidak, dan seterusnya. Keraguan pun muncul. Prasangka dan diskriminasi terus terjadi, bukan hanya karena apakah seseorang menderita Covid-19, melainkan juga karena identitas yang sudah melekat padanya. Mereka diberikan label, stereotip, didiskriminasi, diperlakukan berbeda, dan/atau mengalami pelecehan status karena terasosiasi dengan sebuah penyakit. Relasi berubah, perilaku pun demikian.

Di sektor pendidikan, sekolah dan kampus lumpuh. Seluruh proses pendidikan dilakukan dari rumah. Covid-19 menyadarkan kita bahwa pendidikan yang selama ini sepenuhnya ditanggung pada sekolah telah berubah dan dikembalikan pada intinya, yaitu pendidikan keluarga. Orang tua diajak kembali memperhatikan pendidikan anak. Anggapan bahwa sekolah sebagai penanggung jawab tunggal atas pengajaran kini direvisi total. Kondisi ini membuat seluruh tatanan keluarga berbenah. Mau tidak mau, keluarga diharapkan menjadi tangguh karena ia satu-satunya ruang yang dianggap aman secara fisik maupun secara psikologis dari Covid-19.

Wabah ini telah merenggut ribuan nyawa manusia dan membuat dunia panik, takut, dan cemas. Orang tak lagi mampu



menguasai serta mengendalikan diri dengan menciptakan situasi yang kondusif. Orang cenderung responsif terhadap penyebaran wabah ini sampai-sampai melupakan orang di sekitarnya. Bahkan berita-berita hoaks oleh berbagai media pun akan dibenarkan karena setiap pribadi dihalusinasi oleh keadaan.

Pada bagian lain, tata kelola dan perlakuan kita terhadap alam harus direfleksikan ulang. Proyek modernitas yang menurut Immanuel Kant merupakan proses “pendewasaan manusia” harus dikritik agar proyek ini tidak terus-menerus merusak alam yang artinya merusak dirinya sendiri (manusia). Salah satu pendapat kritis muncul dari filsuf Fritjof Capra yang mengungkapkan keberadaan dan makna kehidupan manusia dalam segala tingkatan, baik pada level biologis sampai ke level ekonomis dan spiritual, tidak bisa dilepaskan dari keberadaan alam semesta dan seluruh isinya. Berdasarkan pandangan Capra, pandemi Corona adalah bentuk pembalasan alam terhadap manusia yang telah mengingkari dirinya sendiri. Dalam terminologi Jawa, kita mengenal *sapa nandur bakal ngunduh* ‘siapa yang menanam akan menuai’.

Covid-19 telah membuat peradaban manusia modern dikoyak-koyak menjadi tak berharga. Kehidupan manusia modern yang dibangun berdasarkan pada kecepatan gerak, *linearitas* berpikir, ketajaman rasio, kemenangan cara pandang individualis, dan perang teknologi kini lumpuh total di hadapan virus yang tak kasat mata. Kita baru sadar bahwa manusia modern adalah manusia-manusia rapuh. Peradaban politik, ekonomi, sosial di bawah bendera modernisme kini berada di titik nadir dan layak untuk kembali dipertanyakan ulang. Mau dibawa ke manakah kehidupan manusia

dan bumi ini? Apakah kita sudah berada di arah membangun yang benar? Mungkin inilah waktu yang diberikan kepada manusia untuk mempertanyakan apa yang telah mereka jalani selama ini. Mungkin manusia sedang berada pada ujung kepunahannya?

Pandemi yang Mendekonstruksi dan Upaya Merumuskan Tatanan Baru

Fakta dan data virus Corona membuka sudut pandang bahwa ketidakpastian kognitif berhubungan dengan tingkat ketidakpastian yang terkait dengan kepercayaan dan sikap. Dalam situasi ini, satu sama lain tidak mampu diatasi oleh perusahaan industri kesehatan. Setidaknya sejauh ini positivisme juga fenomenologi belum mampu menjawabnya.

Covid-19 menyadarkan kita bahwa manusia dan sistem pemikirannya sangat rapuh dan rentan. Kapitalisme sebagai buah gagasan manusia telah menghancurkan dirinya sendiri. Konsepsi neoliberalisme luluh lantak oleh Covid-19. Ideologi sistem ekonomi pasar kapitalisme dan sistem demokrasi dunia mengindikasikan kegagalan dalam membangun industri kesehatan untuk menghormati martabat manusia yang dibuktikan dengan langkanya alat-alat kesehatan. Di beberapa negara, industri tradisional mulai dilibatkan untuk menanggulangi kondisi tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa kapasitas basis ideologi pembangunan ekonomi tidak dapat menjamin martabat manusia dan keadilan sosial. Sementara sosialisme juga tak mampu menawarkan apa pun dalam kondisi semacam ini.



Kesimpulannya, ideologi ekonomi dan paradigma pembangunan kesehatan manusia dengan fakta empiris data wabah virus Corona sama dengan apa yang dikatakan oleh Daniel Bell dalam buku *The End of Ideology* (1960). Ia menuturkan bahwa ideologi *grand-humanistik* yang lebih tua, yang berasal dari abad ke-19 dan awal abad ke-20 telah habis, dan ideologi baru yang lebih baik akan segera muncul. Daniel Bell berpendapat bahwa ideologi ekonomi, demokrasi, dan sistem politik telah menjadi tidak relevan di antara orang-orang yang “masuk akal”, dan pemerintahan masa depan akan didorong oleh penyesuaian dekonstruksi tatanan baru.

Maka perlu upaya dekonstruksi atas isme-isme dan instrumen pelaksanaannya. Tatanan baru pun mesti dirumuskan. Meminjam konsep filsafat analitik pascamodern yang dipopulerkan oleh Jacques Derrida (1930-2004), *dekonstruksi* ditujukan kepada upaya pembongkaran terhadap kemapanan pemaknaan simbol dan bahasa (analitik) yang melekat kesadaran manusia. Dekonstruksi istilah gerak sosial dalam konteks bencana wabah justru membatasi gerak persinggungan fisik yang bermuara pada jalinan sosial dan bertentangan dengan pemaknaan yang selama ini melekat kesadaran masyarakat umum sebagaimana aktivitas jabat tangan, berpelukan, atau aktivitas fisik lain. Gerak sosial tersebut kemudian dapat diarahkan kepada aktivitas akal budi yang melibatkan segenap instrumen *ruhiah* meliputi rasa, karsa, dan cipta, untuk memproduksi konsep gerak sosial baru.

Selama ini, Covid-19 sering kali dinilai dari sisi negatif sebagai sebuah ancaman, tetapi satu hal yang luput dari kesadaran kita adalah bahwa wabah ini mendekonstruksi semua tatanan. Berangkat

dari kenyataan bahwa pemerintah tidak membangun perencanaan yang baik dan selalu bergerak lambat, tata ruang itu kemudian diambil alih oleh swasta dan kekuatan modal. Tebersit di pikiran, “Apakah Covid-19 diciptakan bukan bebas nilai? Apakah ada sebuah gelombang baru pasca-Covid-19? Apakah ada sebuah upaya dekonstruksi dan konstruksi lain yang sudah disiapkan?”

Hipotesis

Dalam kondisi ini penting untuk setidaknya membangun gagasan alternatif dan konstruksi baru dalam relasi-relasi sosial kebudayaan. Selama 3-4 bulan bercengkerama dengan Covid-19 telah menyadarkan banyak hal. *Pertama*, kita tidak bisa hidup sendiri. Institusi sekolah dan agama tidak lagi penting dan keluarga menjadi sandaran akhir sekaligus juga awal dari segalanya. Nilai utama relasi sosial berasal dari keluarga hingga melahirkan etik baru dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, politik, budaya, dan seterusnya.

Covid-19 mendekonstruksi semua tatanan tanpa teriakan revolusi. Maka hipotesis yang perlu dibuktikan adalah apakah puncak dari relasi sosial adalah gotong royong? Apakah puncak dari relasi ekonomi adalah kerja sama? Apakah puncak dari relasi politik adalah musyawarah? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang ingin diuji dan dibuktikan dari serangkaian agenda Kongres Kebudayaan Desa. Dan kesemuanya itu tentu saja membutuhkan kesetaraan yang oleh Habermas dinamai sebagai *demokrasi deliberatif*. Rebut kesempatan untuk membangun tatanan yang lebih bermartabat, lebih berkeadilan, dan lebih *berkesetaraan*. Dan hal ini tidak lepas dari nilai-nilai luhur nusantara, sehingga gagasan alternatif ini bercorak



khas nusantara. Kita tidak lagi mengadopsi gagasan dari luar yang berjarak dengan konteks kita. Kita punya gagasan gotong royong, selain sosialisme dan kapitalisme.

Kongres Kebudayaan Desa

Kita telah mencermati, mengalami, dan berjibaku dengan Covid-19 dan kenyataannya hingga hari ini kita belum bisa keluar darinya. Namun, tidak ada kata menyerah di dalamnya. Perjuangan harus berumur panjang. Maka siasat-siasat kebudayaan perlu dirumuskan untuk mengelak dari kehancuran dan kehilangan nyawa yang lebih banyak lagi, mengelak dari kepunahan manusia. Pandemi memberikan sisi positif bahwa manusia dengan segala daya, akal budi, dan kreativitasnya harus mencari ruang “perlawanan” yang lebih baik. Menyerah berarti mengantarkan kematian dan hancurnya kemanusiaan. Maka tidak ada kata lain selain terus berjuang. Dan perjuangan itu harus dimulai dari desa, sebuah entitas negara yang paling dekat denganarganya. Tidak ada jenjang pemerintahan yang lebih dekat dengan warga selain desa.

Karena itulah perlu disusun serangkaian upaya untuk merumuskan tata nilai dan tata kehidupan baru bernegara dan bermasyarakat di era pandemi dan sesudahnya. Sekali lagi, dimulai dari desa. Apa dan bagaimana tatanan baru itu? Kongres Kebudayaan Desa (KKD) yang akan menjawabnya.

Kongres Kebudayaan Desa adalah pertemuan antara para pemangku desa (pemerintah desa, lembaga, komunitas, dan warga desa), para pemikir, akademisi yang memiliki ketertarikan terhadap isu desa ataupun bisa jadi lahir dan tumbuh dalam ekosistem desa,

para praktisi, birokrat, pelaku bisnis, dan pekerja media yang berupaya merumuskan kembali arah tatanan Indonesia baru dari desa.

Kongres ini melibatkan beberapa *stakeholder* yang meliputi ABCGFM: akademisi, birokrasi, *community*, *government*, *finance*, dan media. Kesemuanya akan berkontribusi untuk bersama-sama dengan warga desa merumuskan tatanan Indonesia baru dari desa. Kongres ini bergerak pada dua ranah sekaligus. *Pertama*, tataran konseptual dengan menggali pemikiran-pemikiran dari para akademisi, pemikir, peneliti, praktisi, birokrat, pelaku bisnis, dan media yang menghasilkan dokumen-dokumen konseptual hasil olah pikir dan nalar budi. *Kedua*, tatanan praksis dengan menghasilkan dokumen panduan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa) yang memberi pola tata kelola pemerintahan dan tata hidup baru warga desa untuk desa-desa di Indonesia.

Festival Kebudayaan Desa-Desa Nusantara

Festival Kebudayaan Desa-Desa Nusantara adalah bagian dari pelaksanaan Kongres Kebudayaan Desa. Dua bagian ini menjadi satu kesatuan yang saling melengkapi. Kongres Kebudayaan Desa sebagai bagian dari upaya serius untuk merumuskan kembali tatanan Indonesia baru dari desa, sedangkan Festival Kebudayaan Desa-Desa Nusantara adalah bagian dari perayaan kebudayaan, perayaan gagasan, rekognisi desa-masyarakat adat di Indonesia. Perayaan nusantara. Kongres adalah perayaan kebudayaan itu sendiri.

Maka tepat di sini jalinan dan upaya saling melengkapi antara bentuk kongres dan festival mewujud. Istilah *kongres* yang selama



ini lekat dengan kesan serius dan penuh khidmat diubah menjadi sebuah perayaan. Pengertian *kongres* yang biasa dipahami sebagai bentuk pertemuan tertinggi, eksklusif, dan terpusat dari organisasi-organisasi sosial dan politik, kini dikembangkan menjadi semacam perhelatan dari ruang-ruang partisipasi masyarakat.

Maka festival kebudayaan ini didorong untuk merayakan dua hal sekaligus. *Pertama, culture experience*. Pelestarian budaya yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke dalam sebuah pengalaman kultural. Dengan demikian kebudayaan lokal selalu dapat lestari. *Kedua, culture knowledge* yang merupakan pelestarian budaya yang dilakukan dengan cara membuat suatu pusat informasi mengenai kebudayaan yang dapat difungsionalisasi ke dalam banyak bentuk. Tujuannya adalah untuk edukasi ataupun untuk kepentingan pengembangan kebudayaan itu sendiri.

Membaca Desa, Mengeja Ulang I-N-D-O-N-E-S-I-A: Arah Tatanan Indonesia Baru dari Desa

Desa adalah tempat di mana sebagian besar kita berasal. Karenanya kita lebih fasih membaca desa *tinimbang* Indonesia. Faktanya, desa lebih dulu ada dibandingkan Indonesia. Bahkan hingga hari ini kita masih selalu saja terbata-bata membaca Indonesia. Artinya kita perlu mengeja ulang Indonesia. *Reason d'etre* agenda ini adalah desa maka yang harus dieja ulang adalah Indonesia yang sudah sengkabut. Apakah Indo-nesia, Indon-esia, Ind-one-sia, In-do-nesia ataukah akan kita sebutkan dalam satu tarikan napas: Indonesia? Artinya, tanpa (huruf) D-E-S-A, kata Indonesia tak akan sempurna.



Bagaimana cara kita mengeja ulang sangat tergantung dari kemampuan kita membaca desa sebagai ibu bumi. Desa menjadi sosok ibu yang *nuturing, ngopeni, ngrumat, ngemonah, nggulowentah, murakabi* semua anggota keluarga.

Lihatlah di masa pandemik seperti ini. Orang-orang desa yang merantau ke kota mengalami kecemasan. Ia yang papa tak diterima di lingkungan kota dan terusir darinya. Kota menjadi tidak ramah. Lihatlah bagaimana orang mencuri-curi cara agar tetap pulang kampung ketika kota tak lagi menyediakan kerja dan orang-orang kelas menengahnya mengurung diri di rumah. Mereka pulang ke desa.

Selayaknya ibu, desa adalah ibu bumi tempat kembalinya para petarung kehidupan yang harus rela meninggalkan desa untuk bekerja di ibu kota dan karena kondisi saat ini harus kembali pulang. Kembalilah ke pangkuan ibu bumi, selayaknya ibu. Desa akan menerima kehadiran kembali, apa pun adanya kita saat ini. Selayaknya ibu, desa adalah ibu bumi, tempat kembali dan berbagi.

Tema ini ingin menguatkan Indonesia dari desa. Dan tampaknya ungkapan “masa depan Indonesia adalah desa” semakin relevan. *Merdesa* berasal dari kata *desa* dalam bahasa Jawa Kuno, artinya ‘tempat hidup yang layak, sejahtera, dan patut’. Dalam pengertian ini juga tersirat makna desa, suatu kawasan yang merdeka dan berdaulat. Dalam rumus *otak-atik gathuk*, ada persamaan antara *paradise* (surga) dengan *paradesa, para* (tertinggi), maka kedudukan desa diletakkan dalam *maqam*, derajat, dan martabat di puncak paling atas. Desa merupakan visi, cita-cita tertinggi, pencapaian pembangunan



surga di dunia nyata, yakni ‘tempat hidup yang layak, sejahtera, dan patut’. Layak secara ekonomi, layak secara sosial budaya, layak secara politik. Itulah sejahtera. Sedangkan patut (kepatutan) memiliki dimensi yang holistik: adanya pola hidup yang bersahaja, rukun, penuh kesederhanaan, tak ada individualisme karena sistem kehidupan dilandasi oleh pertimbangan kebersamaan, *komunalitas*, berjemaah, tidak mudah mengumbar keserakahan dan eksploitasi, tak ada yang dominan pada kepentingan diri pribadi karena orang yang mementingkan diri pribadi justru diyakini sedang membangun neraka dan dianggap durhaka, *dur-angkara*. Semua ada takarannya. Gandhi pun pernah berkata: “Bumi ini cukup untuk kesejahteraan seluruh umat manusia, tetapi tidak cukup untuk keserakahan satu manusia.”⁵⁸

Karenanya, upaya menuju kemandirian desa menjadi bagian penting dari Kongres Kebudayaan Desa. Terwujudnya kedaulatan politik dan pemerintahan desa, kedaulatan perekonomian desa, kedaulatan data desa, adalah syarat desa sebagai “*paradise*”. Tata kelola pemerintahan dan warga desa dalam tatanan baru Indonesia dengan sendirinya harus memastikan tata kelola pemerintahan dan kehidupan sosial warga yang bersih dan antikorupsi, sejahtera lahir dan batin, pendidikan yang merdeka, dan seterusnya.

Penekanan kongres ini selain mengkaji tata kelola pemerintahan dan aspek-aspek kehidupan warga desa juga mengarusutamakan isu-isu antikorupsi. Membangun pemerintahan yang bersih dan politik yang bermartabat sangat mungkin didorong dari ruang negara yang

58 Raharjo, T. 2013. “Menyambut Buku Indonesia Bagian dari Saya”. <https://www.caknun.com/2013/menyambut-buku-indonesia-bagian-dari-desa-saya/>.

lebih kecil, yaitu desa. Dan desa jauh lebih memungkinkan untuk menerapkan praktik tata kelola dan implementasi negara yang bebas dari korupsi.

Langkah yang lebih jauh, kongres ini berupaya memberikan tawaran alternatif untuk membangun kembali tatanan yang lebih setara, lebih adil, bermartabat, dan antikorupsi, serta model kehidupan yang lebih harmonis antara manusia dan alam. Tawaran alternatif tentang “*new normal*” akan mengisi ruang-ruang kosong tentang reproduksi pengetahuan dari berbagai aspek kehidupan masyarakat yang selama ini seolah direduksi hanya pada tataran tata cara teknis kehidupan (cuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak). Tawaran ini juga menyediakan seperangkat panduan untuk penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa yang bisa diadopsi oleh sebanyak mungkin desa di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah desa-desa adat beserta masyarakat adat di seluruh nusantara.

Kongres Kebudayaan Desa dalam Angka

Dua setengah bulan persiapan dan pelaksanaan Kongres Kebudayaan Desa (Juni-Agustus), memberikan gambaran-gambaran angka partisipasi berbagai *stakeholder* dalam KKD. Pertama, riset kondisi dan imajinasi masyarakat desa tentang arah tatanan Indonesia baru dari desa. Riset ini merespons pandemi dan harapan warga desa. Sebanyak 1.231 responden telah terlibat dan memberikan pandangannya. Rentang responden bergerak dari berbagai provinsi dari Aceh hingga Papua. Pengambilan data yang menggunakan Google Form cukup mampu menjangkau jumlah responden, warga,



dan pemangku pemerintahan desa. Dilihat dari komposisi gender, responden cukup seimbang.

Kedua, *call for papers* Kongres Kebudayaan Desa. Menyadari bahwa tidak semua gagasan dan keterwakilan bisa diringkus dalam 20 seri webinar, KKD membuka seluas-luasnya ruang bagi masyarakat desa, akademisi, peneliti, warga desa, birokrat, aktivis sosial, mahasiswa, dan siapa pun yang memiliki ikatan serta pemikiran tentang desa untuk *urun rembuk* tentang tatanan Indonesia baru. Sebanyak 57 naskah masuk melalui *call for papers* KKD. Jumlah tersebut tentu saja diseleksi secara ketat untuk bisa masuk dalam buku yang diterbitkan sebagai bagian dari *output* KKD. Hasilnya, sebanyak 31 naskah lolos kurasi dan berhak masuk dalam buku yang diterbitkan.

Ketiga, seri webinar KKD yang dilaksanakan dalam rentang 10 hari berturut-turut (1-10 Juli 2020), 100 jam webinar dengan 20 tema dan 20 *term of reference*, melibatkan 20 moderator di berbagai tempat di Indonesia serta 100 narasumber dari berbagai perspektif keilmuan dan keahlian.

Dua puluh tema webinar tersebut adalah: Seri 1. Arah Tatanan Baru Indonesia: “New Normal” Apa dan Bagaimana Hidup di Era Pandemi dan Sesudahnya; Seri 2. Ekonomi Berkeadilan: Perekonomian Desa dalam Tatanan Indonesia Baru; Seri 3. Pendidikan yang Membebaskan: Membalik Paradigma Pendidikan Urban; Seri 4. Kesehatan Semesta: Menghadirkan Kembali Kesehatan yang Setara untuk Semua dari Desa; Seri 5. Keamanan dan Ketertiban: Menghadirkan Rasa Aman dan Pelindungan dalam

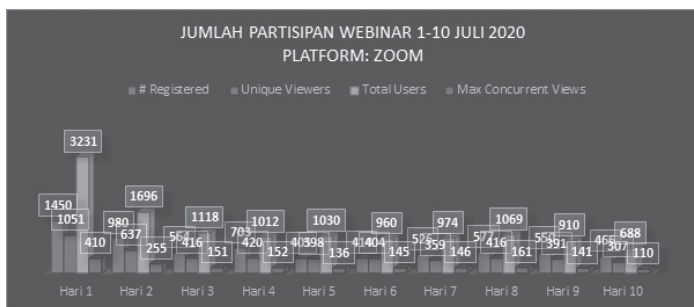
Tatanan Indonesia Baru; Seri 6. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Perempuan untuk Masa Depan Desa dan Arah Tatanan Indonesia Baru yang Inklusif; Seri 7. Kedaulatan Pangan dan Lingkungan Hidup: Merdeka Sandang, Pangan, dan Papan dari Desa untuk Tatanan Indonesia Baru; Seri 8. Pemuda Desa: Merekonstruksi Ulang Formasi Strategis Pemuda Desa di dalam Tatanan Indonesia Baru; Seri 9. Agama: Dari Ritus ke Substansi (Transformasi Peran Agama dalam Mengawal Tatanan Nilai Indonesia Baru); Seri 10. Kebudayaan: Mengonstruksi Ulang Alam Pikiran Nusantara sebagai Basis Peradaban dan Tata Nilai Indonesia Baru; Seri 11. Tata Ruang Desa dan Infrastruktur Lingkungan Pemukiman: Menegosiasikan Ulang Peta Ruang dan Lingkungan Pemukiman Desa; Seri 12. Reformasi Birokrasi: Merumuskan Tata Birokrasi Desa yang *Compatible* untuk Tatanan Indonesia Baru; Seri 13. Hukum dan Politik Desa: Membangun Habitus Politik dan Regulasi yang Memuliakan Martabat Manusia dalam Tatanan Indonesia Baru; Seri 14. Prinsip Antikorupsi, Akuntabilitas, dan Transparansi: Membangun Sistem dan Habitus Antikorupsi dari Desa untuk Tatanan Indonesia Baru; Seri 15. Datakrasi: Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Desa Berbasis Data Menuju Tatanan Indonesia Baru; Seri 16. Keluarga: Reformulasi Peran Strategis Keluarga dalam Pemuliaan Martabat Manusia untuk Tatanan Indonesia Baru; Seri 17. Kewarganegaraan: Merumuskan Pola Relasi Baru Warga Desa dan Negara untuk Tatanan Indonesia Baru; Seri 18. Komunikasi, Media, dan *Influencer*: Merumuskan Kebijakan Komunikasi Publik dalam Tata Pemerintahan Desa Menuju Indonesia Baru; Seri Khusus Inklusi Sosial: Mewujudkan



Masyarakat Inklusif dalam Tatanan Indonesia Baru; Seri Khusus Revitalisasi Desa: Merajut Desa Membangun sebagai Bagian Gerakan Global.

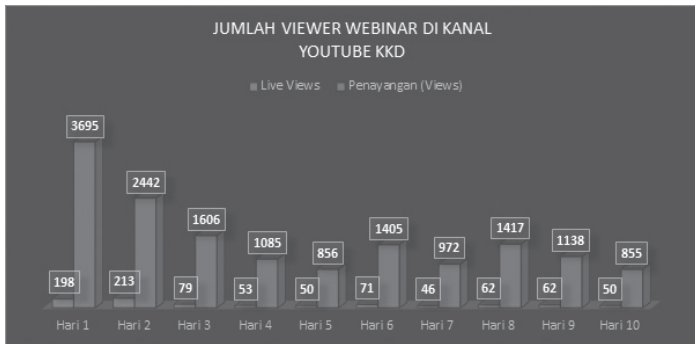
Dari sisi partisipan seri webinar KKD menunjukkan angka partisipasi yang cukup besar. Dilihat dari data yang ditarik langsung dari aplikasi Zoom dan merupakan gambaran partisipan webinar dalam satu hari, tabel berikut menggambarkan jumlah partisipasi webinar melalui kanal Zoom.

Tabel 1 Jumlah Peserta Webinar Melalui Aplikasi Zoom



Selain melalui kanal Zoom, peserta juga bisa mengikuti keseluruhan seri webinar melalui kanal YouTube Kongres Kebudayaan Desa, baik secara *live* atau tayang ulang. Sampai tanggal 18 Juli 2020, berikut data penayangan video webinar Kongres Kebudayaan Desa:

Tabel 2 Jumlah Peserta Webinar KKD Melalui YouTube



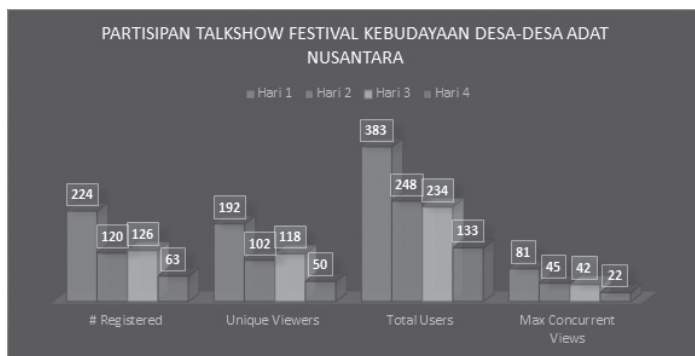
Selain ditayangkan melalui kanal resmi Kongres Kebudayaan Desa, serial webinar juga ditayangkan melalui kanal YouTube suara.com, *live* Facebook kata desa, bumdes.tv, Gatra.tv, kanal YouTube wiradesa dengan perkiraan *audience* lebih dari 10 ribu.

Keempat, Festival Kebudayaan Desa-Desa Nusantara. Festival ini membicarakan secara khusus gagasan dan pemikiran tentang arah tatanan Indonesia baru dari perspektif desa-masyarakat adat di Indonesia. Ada 13 desa-masyarakat adat yang ambil bagian dalam seri *talkshow* Festival Kebudayaan Desa-Desa Nusantara, yaitu: Desa Adat Boti, NTT; Desa Adat Papua; Desa Adat Sigi, Sulawesi Tengah; Desa Adat Baduy, Banten; Desa Adat Aceh; Desa Adat Minang; Desa Adat Melayu; Desa Adat Batak; Desa Adat Tidore; Desa Adat Dayak; Desa Adat Bajo; dan Desa Adat Sasak. Desa adat menyampaikan gagasan, pemikiran, serta praktik-praktik hidup dan penghidupan dalam konteks sehari-hari, misalnya tentang bagaimana membangun



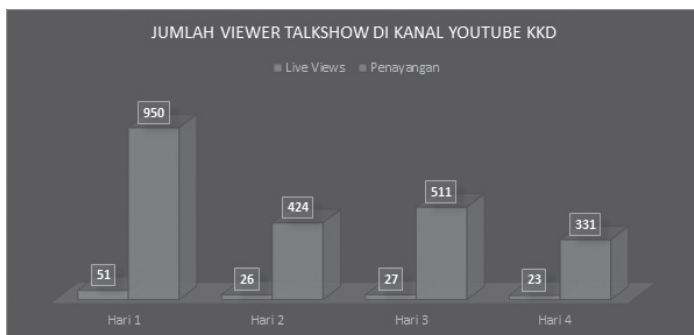
desanya masing-masing untuk memberi perspektif yang lebih besar bagi tatanan Indonesia baru. Ada 34 narasumber yang berasal dari 13 desa-masyarakat adat di Indonesia dan 8 moderator serta 8 video yang diproduksi untuk tiap-tiap *talkshow*.

Tabel 3 Peserta *Talkshow* Festival Kebudayaan Desa-Desa Nusantara (13-16 Juli 2020) via Zoom



Sama halnya dengan serial webinar Kongres Kebudayaan Desa, *talkshow* Festival Kebudayaan Desa juga ditayangkan langsung melalui kanal YouTube resmi Kongres Kebudayaan Desa selama *talkshow* berlangsung. Selain itu, video *talkshow* juga diunggah ke kanal YouTube tersebut untuk memfasilitasi peserta yang tidak dapat mengikuti *talkshow* secara langsung. Berikut gambaran dari penayangan video *talkshow* Festival Kebudayaan Desa di kanal YouTube Kongres Kebudayaan Desa sampai tanggal 18 Juli 2020.

Tabel 4 Peserta *Talkshow* Festival Kebudayaan Desa-Desa Nusantara (13-16 Juli 2020) via YouTube



Kelima, penerbitan buku. Rangkaian KKD ini menghasilkan 21 buku, terdiri dari 19 buku dari seri webinar, 1 buku bunga rampai strategi pemajuan kebudayaan nusantara, dan 1 buku putih (berisi hasil riset KKD dan panduan penyusunan RPJMDesa). Desain buku ini menggambarkan keseluruhan hasil-hasil Kongres Kebudayaan Desa. Sampul tiap-tiap buku adalah bagian dari peta Indonesia mulai Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, yang menggambarkan kekayaan endemik satwa dan tetumbuhannya. Salah satunya seperti yang tengah Anda baca sekarang ini.

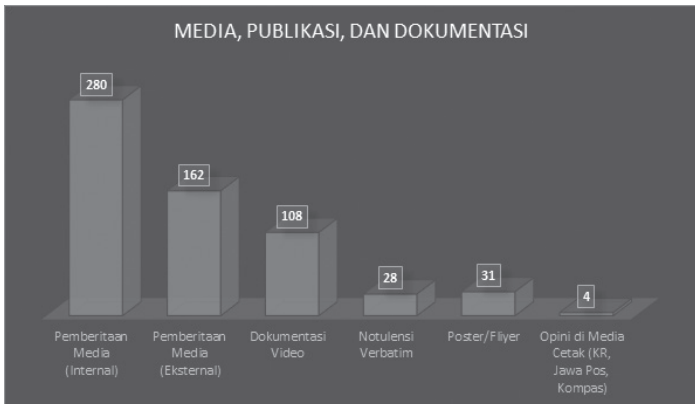
Keenam, buku putih Arah Tatanan Indonesia Baru dari Desa: Panduan Penyusunan RPJMDesa. Buku ini secara khusus merangkai hasil-hasil Kongres Kebudayaan Desa dan rekomendasi-rekomendasi yang selama pelaksanaan kongres terekam dengan baik. Selain itu buku ini juga merumuskan gagasan dan rekomendasi yang dihasilkan



dari pembacaan atas diskusi/tanya jawab selama webinar, *call for papers*, maupun hasil riset.

Ketujuh, publikasi dan media. Ada 280 berita yang diproduksi oleh tim media KKD di laman www.kongreskebudayaandesasda.id; 162 berita yang tayang di media nasional, baik *online* maupun cetak; 108 video dokumentasi yang diproduksi dan terunggah di kanal YouTube Kongres Kebudayaan Desa; 35 poster untuk tiap-tiap agenda kongres; dan ada 4 opini yang dimuat di koran *Kedaulatan Rakyat*, *Jawa Pos*, dan *Kompas*. Keseluruhan agenda webinar kongres dan *talkshow* festival juga didokumentasikan dalam *notulensi* verbatim sejumlah dua puluh delapan. Dan sebanyak 35 poster publikasi mengantarai semua agenda kongres.

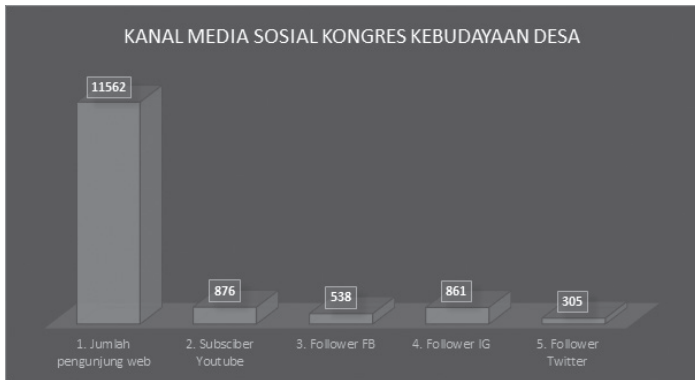
Tabel 5 Jumlah Pemberitaan, Publikasi, dan Dokumentasi KKD



Seluruh aktivitas pemberitaan dimulai dari 22 Juni hingga 27 Juli (ketika naskah ini dituliskan), artinya rerata dalam 1 hari ada sedikitnya 12 berita, baik yang diproduksi oleh tim internal KKD maupun media-media nasional, baik cetak maupun *online*.

Hampir keseluruhan rangkaian Kongres Kebudayaan Desa menggunakan platform *online*. Karena itu kanal-kanal informasi juga berbasis *online*. KKD menggunakan *landing page* utama web, diseminasi juga didesain menggunakan media sosial. Berikut jumlah jangkauan dari web utama dan media sosial yang digunakan selama pelaksanaan kongres. Catatan ini diambil tepat ketika epilog ini ditulis.

Tabel 6 Gambaran Jangkauan Melalui Kanal Media Sosial KKD



Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah pengunjung www.kongreskebudayaan.desa.id sejumlah 11.562 kunjungan, jumlah *subscriber* kanal YouTube 876, *follower* FB 538, *follower* IG 861, dan *follower* Twitter sebanyak 305. Angka itu dibukukan sejak 20 Juni 2020.

Kedelapan, dua kali “syukuran”. Di sela-sela pelaksanaan rangkaian kongres, penyelenggara menggelar dua *event offline*, yaitu Andrawina Budaya dan Suluk Kebudayaan. Andrawina Budaya dihadiri oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi beserta sekjen; Kiai Jadul Maula; serta berbagai jaringan pendukung kongres. Kedua, Suluk Kebudayaan yang digelar untuk memungksi agenda Festival Desa-Desa Nusantara dan menghadirkan budayawan Wani Dharmawan, Irfan Afifi, Nanang Garuda, dan lain-lain. Seluruh pelaksanaan agenda *offline* ini tetap menjalankan protokol kesehatan.

Kesembilan, jaringan kerja dan kepanitiaan. Kerja-kerja Kongres Kebudayaan Desa ini melibatkan 90 orang panitia penyelenggara yang terbagi dalam bagian-bagian kerja, mulai dari *steering committee*, tim LO, tim IT, tim festival, tim riset, tim *call for papers*, tim media, tim dokumentasi, tim buku, tim acara, tim perumus, tim administrasi dan keuangan, tim desain visual, tim medsos, tim konsumsi, tim *runner*, dan lain-lain. Selain itu pelaksanaan kongres juga didukung oleh 51 jaringan dan lembaga, dengan pendukung utama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan GIZ. Secara umum kolaborasi

dari berbagai *stakeholder* ini dirumuskan ABCGFM: akademisi, birokrasi, *community, government, finance*, dan media.

Kesepuluh, deklarasi arah tatanan Indonesia baru dari desa. Agenda deklarasi dibacakan Presiden Joko Widodo dua hari menjelang peringatan hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan melibatkan para kepala desa dan seluruh rakyat Indonesia.

Mengintip Hasil Kongres

Hingga epilog ini ditulis, tim perumus hasil-hasil kongres masih bekerja. Tim mencermati seluruh proses webinar, *notulensi*, makalah narasumber, naskah-naskah *call for papers*, hasil penelitian, hingga melihat ulang tayangan yang tersimpan di YouTube KKD. Semua itu akan menjadi bagian dari buku putih arah tatanan Indonesia baru dari desa yang disusun dalam panduan penyusunan RPJMDesa. Buku ini terdiri dari analisis kebijakan terkait desa, *review* RPJMN, *probematika*, dan isu-isu strategis kemandirian desa; visi Indonesia baru, asas, arah kebijakan, tujuan dan sasaran, serta indikator-indikator arah tatanan Indonesia baru dari desa.

Dari sekian banyak rekomendasi yang dihasilkan dari Kongres Kebudayaan Desa, klaster utama rekomendasi adalah mewujudkan kemandirian desa melalui tiga pilar: *pertama*, kedaulatan politik dan pemerintahan desa; *kedua*, kedaulatan perekonomian desa; *ketiga*, kedaulatan data desa. Tiga pilar kemandirian desa inilah yang akan diintrodusir untuk bersama-sama membangun gerakan kemandirian desa. Jika 75 ribu desa bergerak untuk membangun kemandiriannya maka gelombang ini akan dengan sendirinya mampu memperbaiki kondisi negara. Masa depan Indonesia adalah desa. Detail hasil-hasil



kongres bisa Anda simak di buku *Arah Tatanan Indonesia Baru dari Desa* (Panduan Penyusunan RPJMDesa).

Pada bagian akhir epilog panjang ini, kami hendak *menghaturkan* terima kasih *kagem* Bapak Dr. (H.C). Drs. H Abdul Halim Iskandar, M.Pd., Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi beserta jajaran Kemendesa yang telah memberikan dukungan penuh terhadap Kongres Kebudayaan Desa. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Sujanarko, Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Sama Antar Komisi dan Instansi (PJ KAKI) KPK, untuk dukungan yang luar biasa. Rasa terima kasih kami sampaikan pula kepada Bapak Dr. Hilmar Farid, Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kemendikbud. Terima kasih pula kami sampaikan kepada Mbak Meta Yanti mewakili GIZ untuk semua diskusi dan dukungannya. Juga kepada segenap jaringan kerja Kongres Kebudayaan Desa dengan segenap dukungan dan bentuknya. *Matur nuwun*.

Ucapan terima kasih sungguh-sungguh pula kami sampaikan kepada seluruh moderator, narasumber, dan tentu saja sobat Kongres Kebudayaan Desa yang selama pelaksanaan kongres terus terlibat secara aktif, baik sebagai responden riset, *call for papers*, maupun sobat kongres yang mengikuti webinar dan *talkshow* festival.

Rasa bangga disertai ucapan syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Bapak Wahyudi Anggoro Hadi, inisiator Kongres Kebudayaan Desa, Lurah Desa Panggungharjo, beserta jajaran pemerintah desa yang terus

ngesubi dan *ngemong* seluruh tim penyelenggara. Dan tentu saja kepada seluruh panitia penyelenggara Kongres Kebudayaan Desa yang telah bekerja keras dan bekerja cerdas untuk bersama-sama menyelenggarakan KKD serta mengemas gagasan arah tatanan Indonesia baru dari desa. Sungguh sebuah kerja yang menyejarah. Untuk itu *matur nuwun*, terima kasih.

Akhirnya, semoga Kongres Kebudayaan Desa yang pertama kali diselenggarakan di Indonesia ini memberi sumbangan yang besar kepada sebanyak mungkin desa juga kepada Indonesia. Sekali lagi kami sampaikan *sakalangkong, matur nuwun, hatur nuhun, matur suksme, amanai, muliate, tampiaseh, tarimo kasi, kurusumang'epanngawang*, terima kasih. Salam budaya desa. Panjang umur perjuangan!

Senin, 28 Juli 2020

Desa Panggunharjo, Bantul, Yogyakarta





Deklarasi

ARAH TATANAN INDONESIA BARU DARI DESA

Mengingat kekuatan tatanan kehidupan masyarakat desa merupakan hasil pergulatan nenek moyang dalam menggeluti pengalaman kosmologis, *epistemologis*, dan ontologis sehingga filosofi desa adalah filosofi yang mewujud dalam budi pekerti, perilaku, dan tindakan; serta mempertimbangkan situasi pandemi Covid-19 maka kekuatan desa harus dijadikan modal sosial, budaya, ekonomi, dan politik bagi arah tatanan baru masyarakat.

Pandemi membuat manusia harus terus berjuang mencari ruang kehidupan yang lebih baik. Dan perjuangan itu telah dimulai melalui Kongres Kebudayaan Desa yang mengajak desa-desa Indonesia bergerak dan bangkit dengan kesadaran *kebhinekaan* dalam merumuskan tatanan baru bangsa Indonesia. Bahwa desa-desa yang membentuk ke-Indonesia-an harus membangun tatanan yang lebih bermartabat, lebih berkeadilan, dan lebih *berkesetaraan*.

Bahwa tatanan itu lahir dari kekayaan sejarah panjang pengetahuan nusantara dan cara pandang jauh ke depan dengan kesadaran bahwa puncak dari relasi sosial adalah gotong royong, puncak dari relasi politik adalah musyawarah, dan puncak dari relasi ekonomi adalah kerja sama. Bahwa semua itu bersumber dari kekayaan kebudayaan desa dari Aceh hingga Papua.

Atas berkat dan rahmat Tuhan Yang Mahakuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur maka desa menyatakan cita-cita tatanan Indonesia baru dari desa adalah terselenggaranya politik pemerintah desa yang jujur, terbuka, dan bertanggung jawab untuk mewujudkan masyarakat yang partisipatif, emansipatif, tenggang rasa, berdaya tahan, mandiri, serta memuliakan kelestarian semesta ciptaan melalui pendayagunaan datakrasi yang ditopang oleh cara kerja pengetahuan dan pengamalan lintas ilmu bagi terwujudnya distribusi sumber daya yang setara untuk kesejahteraan warga.

Bahwa perwujudan tatanan Indonesia baru dari desa tersebut ditempuh dengan cara menjadikan desa sebagai arena demokratisasi politik lokal sebagai wujud kedaulatan politik, menjadikan desa sebagai arena demokratisasi ekonomi lokal sebagai wujud kedaulatan



ekonomi dan *pemberkuasaan* desa melalui aktualisasi pengetahuan warga sebagai wujud kedaulatan data.

Bahwa untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan kemandirian dan inovasi desa yang mampu mengelola kewenangan dan hak atas asal-usulnya, yang mampu memberikan *pemberkuasaan* pada warga desa. Kita berdoa memohon rahmat, hidayah, kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa, menyongsong Tatanan Indonesia Baru dari Desa.

Salam budaya desa. Panjang Umur Perjuangan.

Desa Panggungharjo

Yogyakarta 15 Agustus 2020



KERABAT KERJA KONGRES KEBUDAYAAN DESA 2020

Dewan Pengarah

1. Wahyudi Anggoro Hadi (Ketua)
2. Rumakso Setyadi
3. FX Rudy Gunawan
4. Andreas Budi Widyanta
5. Eko Pambudi
6. Ilham Yuli Isdiyanto
7. Achmad Musyaddad
8. Ryan Sugiarto

PANITIA KONGRES KEBUDAYAAN DESA

Ketua: Ryan Sugiarto

A. Strategis Business Unit: Sholahuddin Nur'azmy

Administrasi dan Keuangan

1. Ahmad Arief Rohman
(Koordinator)
2. Any Sundari
3. Rindy Widya Rasmono
4. Cintya Raffa Fathiya

Tim Media

1. Edy SR (Koordinator)
2. Ahmad Za'im Yunus
3. Ashilly Achidsti
4. Elyvia Inayah
5. Endah Sulistyorini
6. Gunawan Wibisono
7. Lutfi Retno Wahyudyanti
8. Vitus Kevinda Bramantya Viastra

Tim Humas

1. Muhammad Zidny Kafa
(Koordinator)
2. Aina Ulfah
3. Lina Listia

4. Nava Anggita Ardiana

5. Yesseta Novi Sukma

Tim Dokumentasi

1. Akhmad Nasir (Koordinator)
2. Amirul Mukmin
3. Annisa Suryantari
4. Ari Aji Heru Suyono
5. Khoiril Azmi
6. Shavira L. Phinahayu
7. Syaiful Choirudin
8. Veronika Yasinta
9. Windi Meilita W.

Tim IT

1. Muhammad Hanif Rifai
(Koordinator)
2. Ahmad Mizdad Hudani
3. R. Nurul Fitriana Putri
4. Adam Hanafi Syafrudin
5. Damar Saksomo Jati



B. Program: Aditya Mahendra Putra

Tim Webinar

1. Ambar Sari Dewi (Koordinator)
2. Angga Kurniawan
3. Emira Salma
4. Farhan Al Faried
5. Johan Visky Catur Aga
6. Okky Yayan Putra Armanda
7. Robi Setiyawan
8. Ruliyanto
9. Satrio Yoga Rachmanto
10. Tommy Destryanto
11. Toni Fajar Ristanto
12. Tri Muryani
13. Yusan Aprilianda

Tim Festival

1. Eko Nuryono (Koordinator)
2. Gundhi Aditya
3. Hardiansyah Ay
4. Linggar Ajikencono
5. Mona Kriesdinar
6. Nanang Garuda
7. Nandar Hutadima Idamsik
8. Nurohmad
9. Raliyanto Bw
10. Saptaji Prasetyo
11. Siska Aprisia
12. Very Hardian Kirnanda
13. Warsono

1. Faiz Ahsoul (Koordinator)
2. Ageng Indra Sumarah
3. Agus Teriyana
4. Ahmad Yasin
5. Amanatia Junda Solikhah
6. Asy Syaffa Nada Amatullah
7. Berryl Ilham
8. Chusna Rizqati
9. Citra Maudy Mahanani
10. Rheisnayucyntara
11. Dadang Ari Murtono
12. Diah Rizki Fitriani
13. Dwi Cipta
14. Dyah Permatasari
15. Fawaz
16. Fitriana Hadi
17. Fiqih Rahmawati
18. Gregorius Ragil Wibawanto
19. Irfan Afifi
20. Iswan Heriadjie
21. Ketjilbergerak
22. Kusharditya Albihafifzal
23. Prima Hidayah
24. Rio Anggoro Pangestu
25. Rofi Ali Majid
26. Suhairi Ahmad
27. Yona Primadesi

Tim Buku dan Call Of Papers



JARINGAN KERJA KONGRES KEBUDAYAAN DESA 2020





KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

diimplementasikan oleh:
**kerja sama
jerman**
GIZ
German Development
Cooperation Agency
DEUTSCHE ZUSAMMENARBEIT



KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DAN KESIBUKAN

